Sukses Jakarta untuk Indonesia

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP 2024









DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
Jl Taman Jatibaru No. 1 Gambir Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dan signifikan dalam pengelolaan transportasi di DKI Jakarta. Hal yang paling dirasakan masyarakat adalah kemacetan yang saat ini masih menjadi isu utama di DKI Jakarta. Untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menerapkan *Push and Pull Strategy.* Fokus dari strategi ini adalah mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan angkutan umum pada aktivitas perjalanan harian mereka. Pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik dan Jumlah Titik Integrasi Antar Moda. Pada tahun 2024 kedua IKU Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tercapai dengan baik.

Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai entitas pelaporan akuntabilitas kinerja, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk menyusun laporan hasil prestasi kerja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP).

LKIP juga merupakan amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi serta Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

LKIP disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan

terhadap target dan capaian program-program strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur DKI Jakarta secara periodik. Laporan ini tidak terlepas dari implementasi integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja memiliki dua fungsi:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja;
2. Sebagai sarana evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan bertujuan juga untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah / Pemerintah Daerah di periode-periode selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, tujuan Pelaporan Kinerja yaitu: 1) memberikan laporan kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 2) Sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pada Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 akan menjabarkan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (*Performance Results*) tahun 2024 dengan analisis pendekatan Rencana Kinerja (*Performance Plan)* tahun 2024. Pada tahun 2024 kedua IKU Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tercapai dengan baik, bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Akhir kata, sebagai bentuk keterbukaan infomasi, baik capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran disampaikan pada Laporan Kinerja ini dan dianalisis lebih lanjut sebagai bahan perbaikan kinerja yang perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun-tahun berikutnya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA

SYAFRIN LIPUTO
NIP 197103261994031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dan signifikan dalam pengelolaan transportasi di DKI Jakarta, hal yang paling dirasakan masyarakat adalah kemacetan yang saat ini masih menjadi isu utama di DKI Jakarta. Untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menerapkan *Push and Pull Strategy.* Fokus dari strategi ini adalah mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan angkutan umum untuk aktivitas perjalanan hariannya. Melalui Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik dan Jumlah Titik Integrasi Antar Moda.

Pada Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 akan menjabarkan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (*Performance Results*) tahun 2024 dengan analisis pendekatan Rencana Kinerja (*Performance Plan)* tahun 2024. Pada tahun 2024 kedua IKU Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tercapai dengan baik, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Berikut gambaran capaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian					
				2023		2024		2025	2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	18,78	18,86	20,97	22,19	21,87	23,01

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian					
				2023		2024		2025	2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
2	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses Dan Integrasi Transportasi	Jumlah Titik Integrasi antar moda	Titik	22	22	26	37	30	34

Untuk mendapatkan nilai capaian IKU tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan beberapa startegi dalam hal peningkatan jumlah penumpang, aksesibilitas dan penanganan kemacetan, diantaranya adalah:

1. Pemberian Subsidi Transjakarta, MRT, dan LRT.
2. Pengadaan Kapal Pelayanan Penumpang sebagai layanan transportasi perairan kepada masyarakat ke pulau-pulau di kepulauan seribu.
3. Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Transit Oriented Development (TOD) dan titik integrasi
4. Pembangunan *Intelligent Transport Control System* (ITCS)
5. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) berbasis Listrik untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, hal ini juga sebagai Upaya perbaikan kualiatas udara di DKI Jakarta.
6. Pembangunan Dermaga Apung di Pulau Tidung
7. Penyelenggaraan Mudik Gratis pada Angkutan Lebaran

dan kegiatan startegis lainnya

Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah Rp 7.170.007.662.820, dengan realisasi sebesar Rp 6.557.630.799.290 atau senilai 91,46%. Sebagian besar anggaran digunakan untuk pencapaian IKU Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik pada Tahun 2024 memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp

6.884.835.784.491 dengan 4 (empat) Program Kegiatan dan capaian IKU 105,82% dari target. Nilai Efisiensi anggaran sebesar 86,98%.

2. Indikator Jumlah Titik Integrasi antar moda pada Tahun 2024 memiliki nilai realisasi anggaran sebesar Rp 8.062.508.086 dengan 1 (satu) Program Kegiatan dan capaian IKU 104,39% Nilai Efisiensi anggaran sebesar 100.00%.

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 memiliki target dan realiasi pada Sasaran Stategis sebanyak 12 indikator, Sasaran Khusus 8 indikator dan Sasaran Operasional 4 indikator. Untuk Sasaran Strategis dan Sasaran khusus semua indikator tercapai , bahkan beberapa indikator memiliki capaian diatas 100%, namun untuk sasaran oprasional dari 4 Indikator, tercapai 3 indikator dan 1 indikator TLHP BPK tidak tercapai, dari target 100% hanya tercapai 27.36%. Hal ini disebabkan karena banyak rekomendasi temuan yang terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan menumpuknya rekomendasi temuan yang harus diselesaikan sehingga menyebabkan tidak terselesaikannya pekerjaan. Tindak lanjut berikut yaitu diperlukan strategi yang lebih baik untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan. Sasaran operasional memiliki capaian 75%. Secara keseluruhan dari ketiga sasaran tersebut capaian Dinas Perhubungan berada pada 95,83% (23 dari 24 indikator sasaran).

Capaian *modal share* DKI Jakarta pada tahun 2024 menurut Factsheet-Jakarta adalah 22.19 jika dibandingkan dengan Tokyo dan London, pengguna angkutan umum di DKI Jakarta masih jauh lebih sedikit dibandingkan keduanya. Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum di Tokyo berada di kisaran 36%, dan London di berada di capaian 36%. Menurut *Transformative-mobilty* pada Factsheet-Jakarta alasan utama mengapa penduduk DKI Jakarta masih minim pengguna angkutan umum dikarenakan waktu tempuh angkutan umum lebih lama, jadwal tidak pasti, dan waktu operasi yang terbatas. Sedangkan di Tokyo Jepang terdapat faktor regulasi tingginya harga BBM dan biaya parkir, serta sarana dan prasarana untuk pedestrian yang memadai sehingga hal ini membuat penduduk di Kota Tokyo cenderung berjalan kaki atau bersepeda, faktor lain yang mendukung data ini adalah jadwal angkutan umum yang tepat waktu dan terkontrol. Sementara itu di

pengguna transportasi umum di kota London juga menyentuh angka 36%, dikarenakan Kota London memiliki *tube* atau *London Underground Network* yang merupakan transportasi umum berupa kereta bawah tanah tercepat dan terpopuler di Kota London.

Penjelasan lebih detil terkait kegiatan strategis Dinas Perhubungan dapat dilihat pada BAB III LKIP ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
RINGKASAN EKSEKUTIF 4
DAFTAR ISI 8
DAFTAR DIAGRAM 11
DAFTAR GAMBAR 11
DAFTAR TABEL 12
DAFTAR LAMPIRAN 15
BAB I PENDAHULUAN 16
1.1 Latar Belakang 16
1.2 Tujuan dan Manfaat 16
1.3 Data Umum Organisasi 16
1.3.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 17
1.3.2 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 18
1.3.3 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 20
1.3.4 Isu Strategis 21
1.3.5 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 24
1.3.6 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 25
1.4 Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 27
1.5 Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 35
1.6 Sistematika Penulisan 36
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA 39
2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 39
2.2 Perencanaan Kinerja 42
2.2.1 Sasaran Strategis 42
2.2.2 Sasaran Khusus 43
2.2.3 Sasaran Operasional 43

2.3 Rencana Anggaran 52
BAB III PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA 53
3.1 Capaian Kinerja 53
3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama 54
3.2.1 Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik 54
3.2.2 Jumlah Titik Integrasi Antar Moda 93
3.2.3 Analisis Kepegawaian Pengampu IKU 108
3.2.4 Kondisi Lalu Lintas berdasarkan Kecepatan Ruas Jalan Utama 109
3.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang Bersumber dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 115
3.4 Indikator Kinerja Sasaran Khusus 115
3.5 Indikator Kinerja Sasaran Operasional 115
3.6 Indikator Kinerja Pejabat Administrator Perangkat Daerah 115
3.7 Indikator Kinerja Pejabat Pengawas 116
3.9 Realisasi Anggaran 118
3.10 Efisiensi Anggaran 121
3.10.1 Efisiensi Anggaran Berdasarkan IKU Integrasi 121
3.10.2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan IKU *Modal Shared* 122
3.11 Kegiatan Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024 123
3.11.1 Pembangunan Dermaga Apung di Pulau Tidung 124
3.11.2 Pengadaan Kapal Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 125
3.11.3 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Listrik 127
3.11.4 Perencanaan Pekerjaan Peningkatan Standar Penyelengaraan Pelayanan (SPP) Terminal Bus Kalideres 130
3.11.5 Pemberian Subsidi Transjakarta, LRT, dan MRT 131

3.11.6 Penyelenggaraan Mudik Gratis 132
3.12 Prestasi dan Penghargaan 135
BAB IV PENUTUP 143
1.1 Kesimpulan 143
1.2 Saran 144
LAMPIRAN 145
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 145
Lampiran 2. Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024 160

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan Pegawai Laki-Laki dan Perempuan..... 20
Gambar 1. 2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 20
Gambar 1. 3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan..... 21
Gambar 1. 4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia 21
Gambar 1. 5 Perbandingan *Modal Share* di Tokyo dan London dengan Jakarta 23
Gambar 1. 6 *Modal Share* di Provinsi DKI Jakarta..... 23
Gambar 1. 7 Pelabuhan Provinsi DKI Jakarta..... 30
Gambar 1. 8 Ruang Sistem Pengendalian Lalu Lintas..... 33
Gambar 1. 9 CCTV Kondisi Lalu Lintas..... 34
Gambar 1. 10 CCTV Pemantau Lalu Lintas 34
Gambar 1. 11 Sistem Lampu Lalu Lintas 35

Gambar 3. 1 Capaian Modal Share Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2020-2024 58
Gambar 3. 2 Persentase Perjalanan Menggunakan Angkutan Umum 59
Gambar 3. 3 Infografis Penutupan Putaran Lalu Lintas (*U-Turn*) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta 72
Gambar 3. 4 Infografis Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta 74
Gambar 3. 5 Infografis Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta 77
Gambar 3. 6 Infografis Pengaturan Ulang Fase dan Waktu Siklus Lampu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta..... 80
Gambar 3. 7 Penertiban Operasi Lintas Jaya Tahun 2024..... 90
Gambar 3. 8 Peluncuran Bus Listrik Transjakarta 92
Gambar 3. 9 Data Kecepatan Tahun 2024 109
Gambar 3. 10 Kecepatan Rata-Rata di DKI Jakarta Tahun 2020-2024..... 110

Gambar 3. 11 Jumlah Penumpang Angkutan Umum yang Terlayani Per Hari 113
Gambar 3. 12 Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi 114
Gambar 3. 13 Jumlah Terminal Penumpang Angkutan Perairan (Pelabuhan) yang Memenuhi Standar Pelayanan Prima 2024 114
Gambar 3. 14 Capaian Kinerja Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2024..... 115
Gambar 3. 15 Capaian Kinerja Pejabat Pengawas Triwulan IV Tahun 2024 117
Gambar 3. 16 Dermaga Apung di Pulau Tidung 124
Gambar 3. 17 Kapal Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 127
Gambar 3. 18 Kendaraan Dinas Operasional Listrik 128
Gambar 3. 19 Rencana Area Pekerjaan Peningkatan Standar Penyelengaraan Pelayanan (SPP) Terminal Bus Kalideres 130
Gambar 3. 20 Area Kantor dan Area UMKM yang Akan Dialokasikan 131

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.... 26
Tabel 1. 2 Terminal Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 27
Tabel 1. 3 Kapal Penumpang Dinas Perhubungan DKI Jakarta 28
Tabel 1. 4 Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 35

Tabel 2. 1 Target dan Capaian Sasaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta 39
Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 41
Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan (Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja) 44
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja yang Bersumber dari Kegiatan Strategis Daerah 45
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja yang Bersumber dari Sasaran Khusus 48
Tabel 2. 6 Indikator Kinerja yang Bersumber dari Sasaran Operasional 51
Tabel 2. 7 Anggaran Belanja Daerah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Program Sasaran Strategis TA 2024 52

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama pada Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 2024 54
Tabel 3. 2 Indikator Sasaran Tahun 2024 55

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 56
Tabel 3. 4 Jumlah Perjalanan Harian dengan Angkutan Umum di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 56
Tabel 3. 5 Target Sasaran Indikator Kinerja Utama pada RPD Tahun 2023-2026 57
Tabel 3. 6 Jumlah Perjalanan dengan Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2020-2024 58
Tabel 3. 7 Perangkat Daerah yang terkait serta Program/Kegiatan/KSD dan Anggaran 60
Tabel 3. 8 Faktor Keberhasilan Capaian 65
Tabel 3. 9 Kendala yang Terjadi 66
Tabel 3. 10 Rencana Aksi 2025 67
Tabel 3. 11 Penutupan Putaran Lalu Lintas (U-Turn) 70
Tabel 3. 12 Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) 72
Tabel 3. 13 Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan 75
Tabel 3. 14 Pengaturan Ulang Fase dan Waktu Siklus Lampu Lalu Lintas 78
Tabel 3. 15 Titik lokasi peningkatan lampu lalu lintas 81
Tabel 3. 16 Perbaikan Geometrik dan Ruas Jalan 88
Tabel 3. 17 Penertiban Parkir, Pedagang Kaki Lima, dan Angkutan Kota (dalops gakum) 89
Tabel 3. 18 Target Pengoperasian Bus Listrik Unit *High Deck* 90
Tabel 3. 19 Jumlah Titik Integrasi Antar Moda 93
Tabel 3. 20 Rincian Capaian Jumlah Titik Integrasi Antar Moda 94
Tabel 3. 21 Peningkatan Sistem Informasi Penunjuk Arah dan Fasilitas Penunjang Lainnya pada Simpul Transportasi Terintegrasi 101
Tabel 3. 22 Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik 108
Tabel 3. 23 Jumlah Titik Integrasi Antar Moda 108
Tabel 3. 24 Kecepatan Rata-Rata Tahun 2024 109
Tabel 3. 25 Kecepatan Rata-Rata di DKI Jakarta Tahun 2020-2024 110
Tabel 3. 26 Kecepatan Ruas Jalan Utama 112
Tabel 3. 27 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dengan Angkutan Umum 113

Tabel 3. 28 Realisasi Pencapaian Anggaran Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 119
Tabel 3. 29 Capaian dan Nilai Efisiensi IKU Integrasi 121
Tabel 3. 30 Capaian dan Nilai Efisiensi IKU Modal Shared 122
Tabel 3. 31 Rincian Subsidi Transjakarta, LRT, dan MRT 132
Tabel 3. 32 Ringkasan Kuota Peserta Mudik Arus Mudik 134
Tabel 3. 33 Prestasi dan Penghargaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta 135

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 145
Lampiran 2. Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024 160

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi unsur akuntabilitas Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengungkapkan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta secara transparan, obyektif, dan relevan pada pelaporan capaian kinerja (*performance result)* tahun 2024 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. LKIP Dinas Perhubungan 2024 disusun berdasarkan dari kinerja aktual yang dilaksanakan pada tahun 2024. Penyusunan LKIP ini berdasarkan Dokumen Perjanjian Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini adalah untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan di periode-periode selanjutnya. Selain itu, manfaat dari penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja dan sarana evaluasi kinerja Dinas Perhubungan.

1.3 Data Umum Organisasi

Profil data umum organisasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berikut dijelaskan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Susunan Organisasi dan Bagan Struktur Organisasi.

1.3.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, fungsi Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
5. Pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
6. Pelaksanaan pengelolaan pelayaran;
7. Pelaksanaan pengelolaan penerbangan;
8. Pelaksanaan pengelolaan perkeretaapian;
9. Pelaksanaan pengendaliandan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
10. Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan angkutan jalan;
11. Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan angkutan perairan dan kepelabuhanan;
12. Pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
13. Pelaksanaan dukungan pengembangan *transit oriented development*;
14. Pelaksanaan integrasi pelayanan transportasi;
15. Pelaksanaan pengelolaan *electronic road pricing*.
16. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasipengemudi angkutan umum;

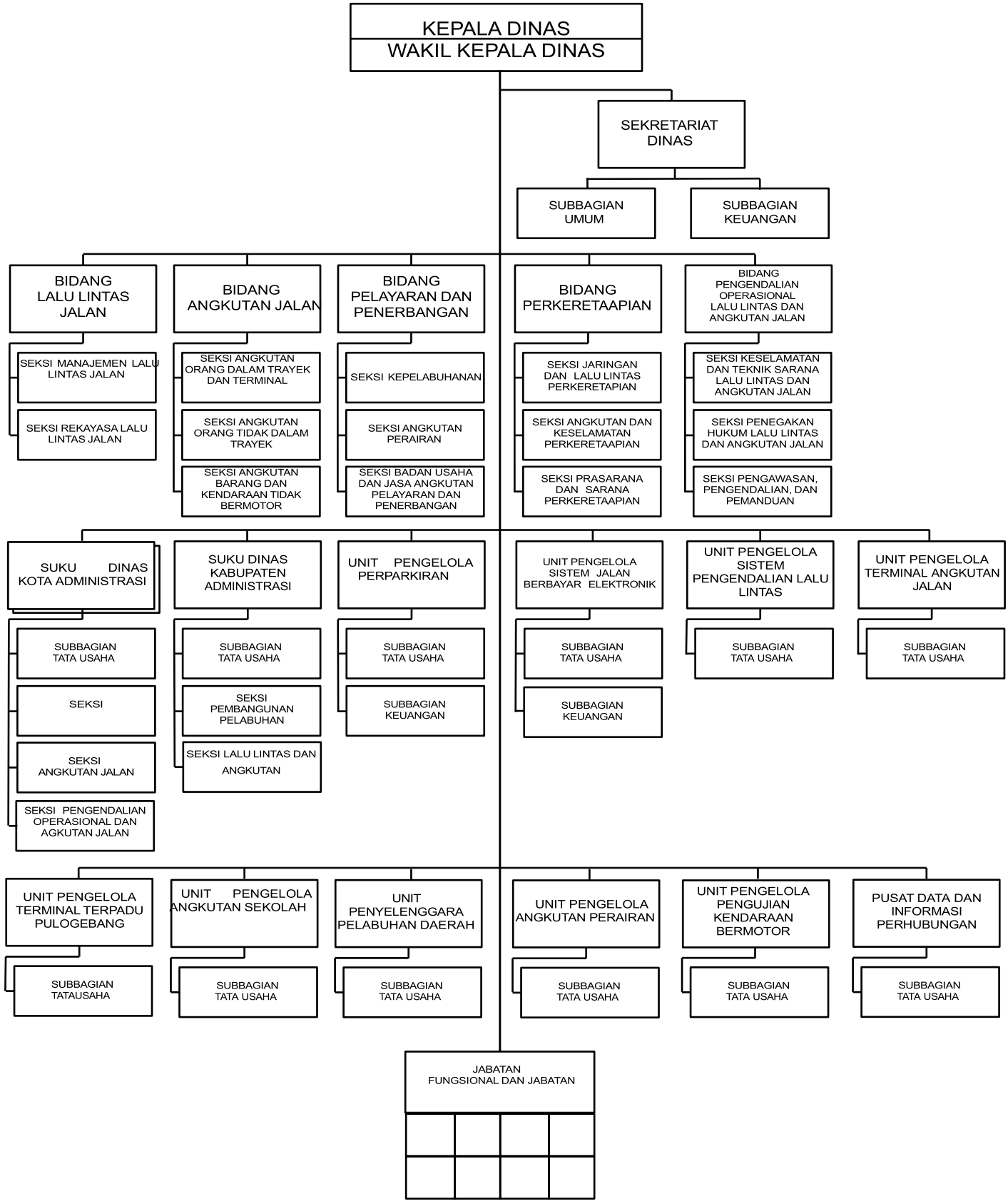
17. Pelaksanaan revitalisasi terminal.
18. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan fasilitas park and ride.
19. Pelaksanaan manajemen perparkiran;
20. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaansistem pembayaran elektronik transportasi;
21. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
22. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
23. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.3.2 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin A diatas, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 5 (lima)Kepala Bidang, 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Suku Dinas Wilayah Kota Administrasi, 1 (satu) Suku Dinas Kabupaten Administrasi, 15 (lima belas) Kepala Unit Pengelola (UP), Kelompok jabatan Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai gambaran Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dijelaskan pada gambar bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan di bawah ini.

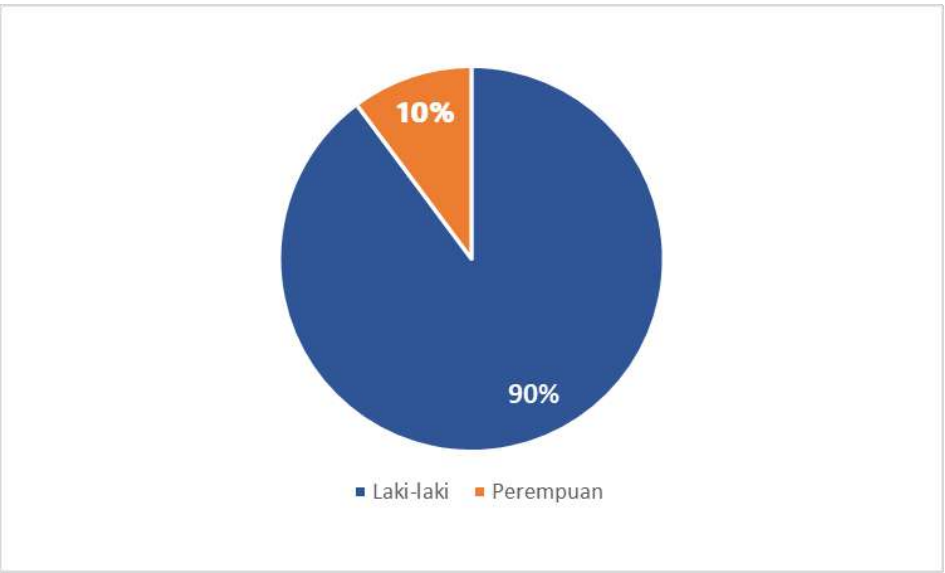
Diagram 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



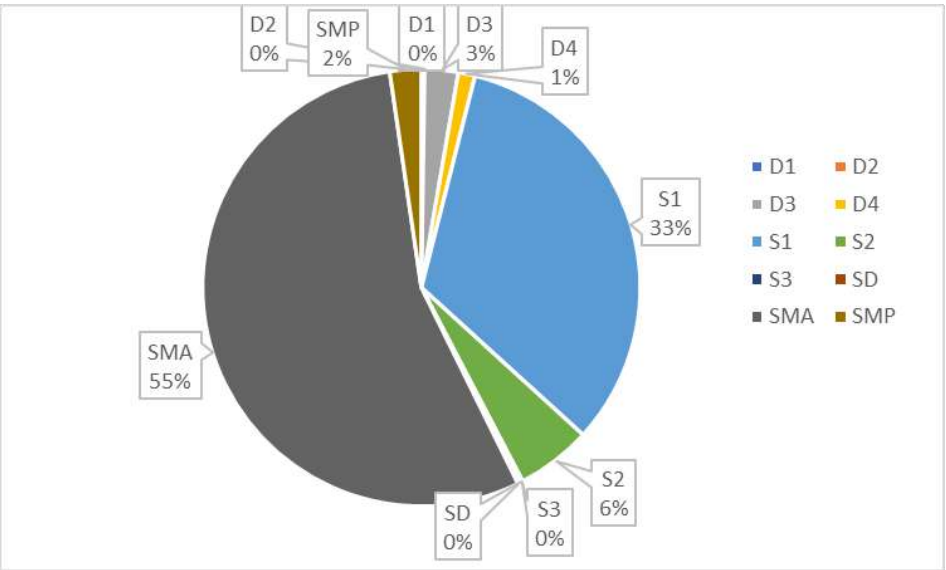
1.3.3 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta data sampai dengan akhir Tahun 2024 sebanyak 1293 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

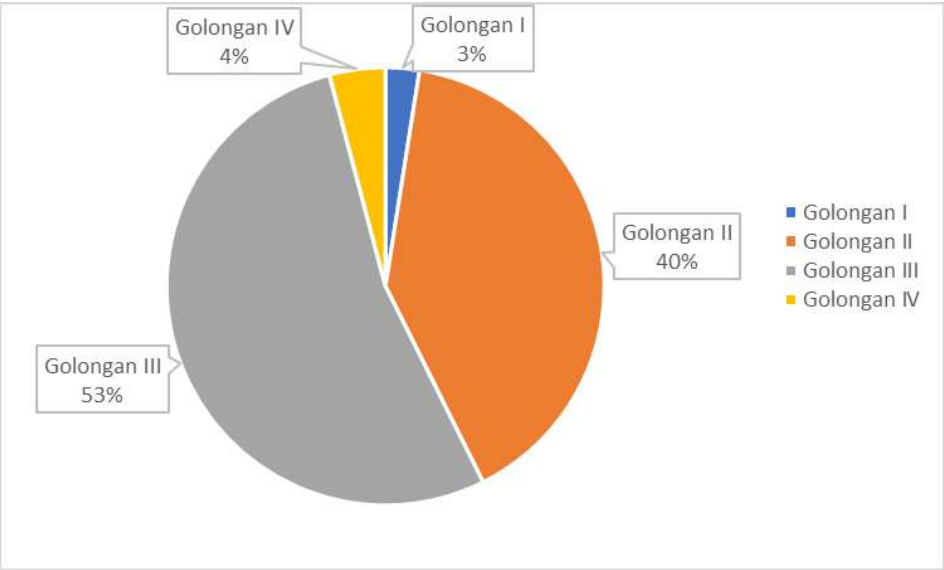
Gambar 1. 1 Perbandingan Pegawai Laki-Laki dan Perempuan



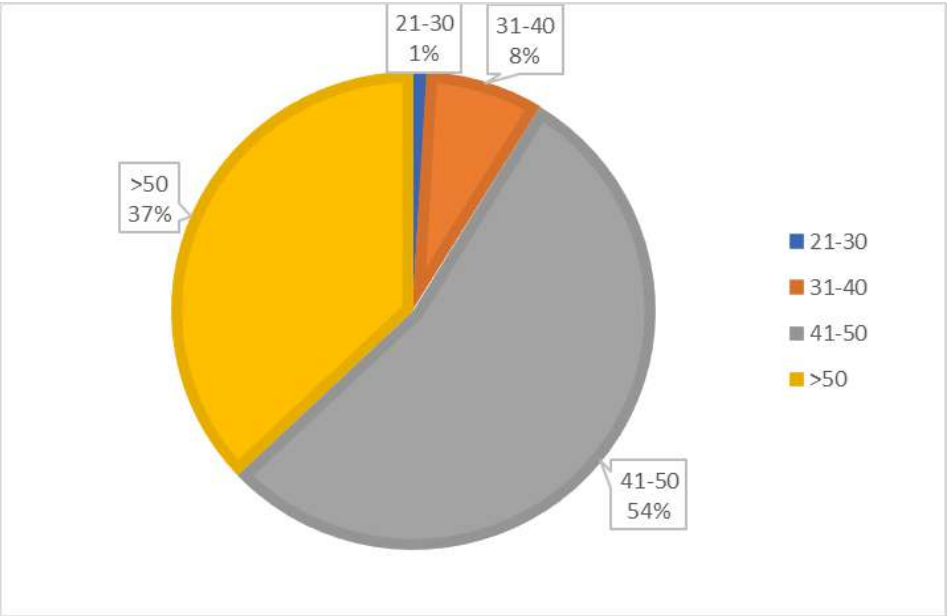
Gambar 1. 2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1. 3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan



Gambar 1. 4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia



1.3.4 Isu Strategis

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki tingkat populasi yang sangat tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 DKI Jakarta memiliki 10.679.951 penduduk yang akan meningkat pada setiap tahunnya jika melihat trend dari tahun-tahun sebelumnya. Seiring dengan kenaikan penduduk,

maka akan muncul beberapa isu permasalahan di Provinsi DKI Jakarta yaitu diantaranya isu transportasi.

Isu transportasi yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta adalah terkaitkemacetan yang disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang menggunakan kendaraan pribadi, yang diiringi oleh pertumbuhan instrastruktur jalan yang hanya sebesar 0,1%. Ditambah masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait parkir kendaraan secara liar yang menambahpermasalahan kemacetan ibukota.

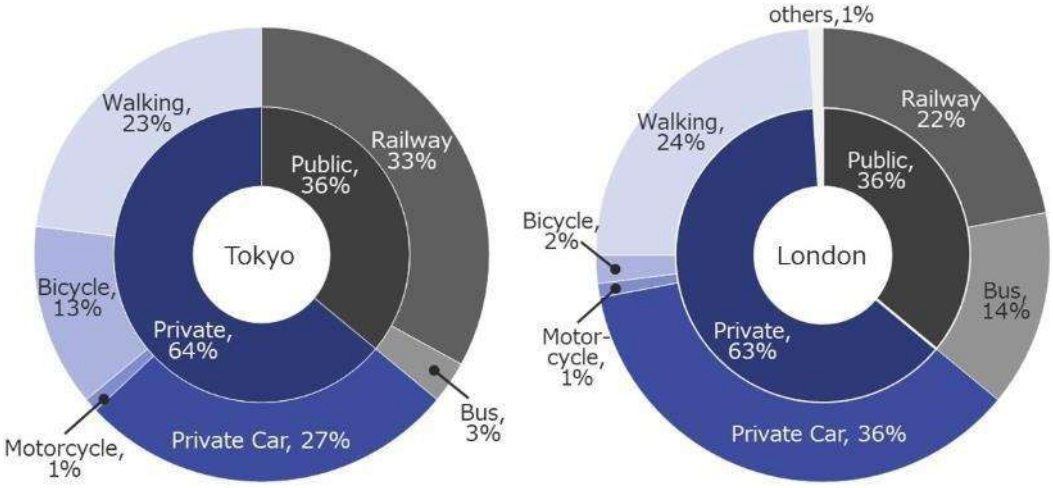
Dengan munculnya isu kemacetan tersebut, secara langsung dampaknya akan dirasakan oleh penduduk ibukota, seperti menurunnya tingkat produktifitas akibat lelahnya fisik dan mental yang disebabkan lamanya waktu tempuh perjalanan, borosnya penggunaan BBM, serta menurunnya tingkat kesehatan akibat polusi udara dan stress.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakartadibentuk untuk mengatasi permasalahan transportasi di DKI Jakarta dengan menerapkan strategi *Push and Pull*, yaitu menurunkan tingkat kemacetan dengan merekayasa *modal share* untuk meningkatkan persentase jumlah pengguna angkutan umum dan menurunkan persentase pengguna kendaraan bermotor pribadi. Pembangunan infrastruktur di wilayah DKIJakarta sedang menerapkan perubahan dari *Car Oriented Development* menjadi *Transit Oriented Development* untuk mendukung usaha tersebut.

Beberapa prioritas penanganan isu transportasi Provinsi DKI Jakarta berupa meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, angkutan umum,kendaraan ramah lingkungan, dan disinsentif kendaraan pribadi.Pembangunan di Provinsi DKI Jakarta sudah berorientasi pada area/wilayah, mengoptimalkan kepadatan kota dengan pembangunan vertikal, serta mewujudkan integrasi antar moda transportasi.

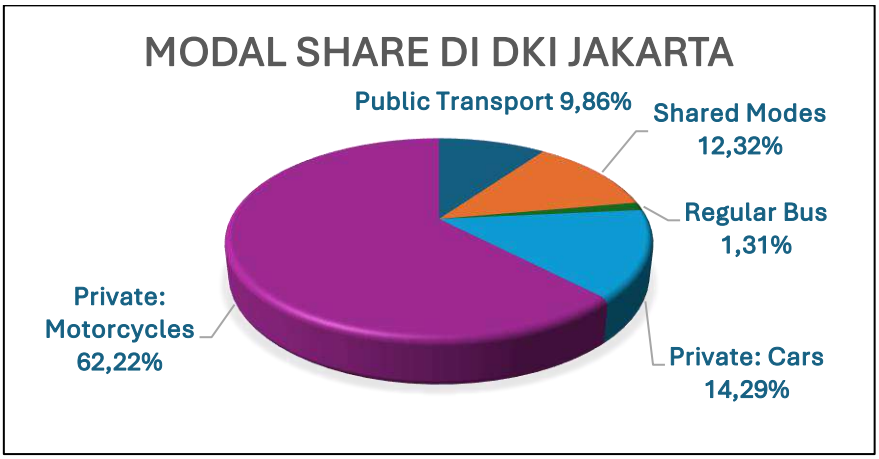
Modal share merupakan data yang penting untuk perencanaan dan pembangunan kota. *Modal share* dibagi berdasarkan pengguna angkutan umum dan kendaraan pribadi, yang kemudian keduanya akan dibagi lagi menjadi pengguna kereta, bus, taksi, mobil pribadi, motor pribadi, sepeda, berjalan kaki, dan lain-lain.

Gambar 1. 5 Perbandingan *Modal Share* di Tokyo dan London dengan Jakarta



Sumber: sc-abeam.com (*Comparisons of Cities' Transportation Modal Shares and Post-CoronavirusProspects | & MOBILITY*)

Gambar 1. 6 *Modal Share* di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: *Factsheet-Jakarta.pdf (transformative-mobility.org)*

Jika dibandingkan dengan Tokyo dan London, pengguna angkutan umum di DKI Jakarta masih jauh lebih sedikit dibandingkan keduanya. Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi umum di DKI Jakarta masih di angka 23,49%, Tokyo di angka 36%, dan London di angka 36%. Menurut *Transformative-mobilty* pada *Factsheet*-Jakarta alasan utama mengapa penduduk DKI Jakarta masih minim pengguna angkutan umum dikarenakan waktu tempuh lebih lama, jadwal tak terkendali, dan waktu operasi yang terbatas. Angka penggunaan transportasi umum di Kota Jepang sudah menyentuh angka 36%, penyebabnya tingginya angka penggunaan angkutan umum di Kota Jepang diantaranya faktor regulasi yang

membuat tingginya harga BBM dan biaya parkir, terlebih sarana dan prasarana untuk pedestrian yang memadai sehingga membuat penduduk di Kota Tokyo lebihcenderung berjalan kaki atau bersepeda, faktor lain yang mendukung data ini adalah jadwal angkutan umum yang tepat waktu dan terkontrol.

Sementara itu di pengguna transportasi umum di kota London juga menyentuh angka 36%, dikarenakan Kota London memiliki *tube* atau *London Underground Network* yang merupakan transportasi umum berupa kereta bawah tanah tercepat dan terpopuler di Kota London yang memiliki jalur kereta sepanjang 402 KM, dan sudah beroperasi sejak 1863. Kereta bawahtanah ini juga tiba setiap 2-3 menit di jam sibuk dan beroperasi 24 jam.

1.3.5 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, Sebagai langkah pertama dalam penyusunan Rencana Strategis adalah menetapkan visi organisasi. Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, telah ditetapkan visi, maka visi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta adalah :

Mewujudkan Jakarta melalui sistem transportasi terintegrasi yang terjangkau, handal, modern, dengan angkutan umum sebagai layanan utama

Dalam pelaksanaan penyusunan dan perumusan visi, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah memperhatikan keselarasannya dengan visi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengingat Dinas Perhubungan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah pernyataan misi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang menggambarkan hal yang perlu dilaksanakan, sehingga hal yang masih abstrak pada visi akan lebih

nyata pada misi tersebut. Pernyataan misi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dirumuskan sebagai berikut:

a. Mewujudkan layanan transportasi yang selamat, lancar, aman, nyaman, dan terintegrasi;
b. Mewujudkan layanan transportasi yang informatif berbasis teknologi informasi;
c. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan menunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
d. Mewujudkan biaya transportasi yang terjangkau bagi masyarakat.

1.3.6 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Dari visi misi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya dapat dijelaskan tujuan dan sasaran untuk mengatasi setiap permasalahan dan isu-isu strategis yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk dapat dilaksanakan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan diuraikan pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target			
						2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Transportasi Terintegrasi Dan Berkelanjutan		Persentase Perjalanan Penduduk menggunakan Transportasi Publik	Definisi: Perbandingan antara jumlah perjalanan penduduk dengan angkutan umum (12 moda) dibandingkan dengan total jumlah perjalanan Metode Pengukuran: Jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum per hari x 100% Total jumlah perjalanan per hari	Persen	14,76	18,78	20,97	21,87	23,01
	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses Dan Integrasi Transportasi	Jumlah Titik Integrasi antar moda	Definisi: Titik lokasi integrasi antar moda transportasi umum berbasis Jalan dengan transportasi umum berbasis rel dan/atau transportasi umum berbasis perairan Metode Pengukuran: Jumlah titik lokasi integrasi antar moda transportasi umum berbasis Jalan dengan transportasi umum berbasis rel dan/atau transportasi umum berbasis perairan	Titik	8	22	26	30	34

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan 2023-2026

1.4 Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan menjadi hal pokok yang harus dimiliki. Adapun dibawah ini beberapa sarana dan prasarana yang menjadi aset dan modal dalam pelaksanaan pekerjaan yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta diantaranya:

1. Terminal Penumpang, Terminal Barang, dan Tempat Penyebrangan Orang

Tabel 1. 2 Terminal Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

No	Nama Terminal	Layanan	Tipe	Lokasi
1	Kampung Rambutan	Layanan Angkutan Perkotaan dan AntarKota & Dalam Kota (AKAP)	A	Jl. TB Simatupang
2	Terpadu Pulogebang	Layanan Angkutan Perkotaan dan AntarKota & Dalam Kota (AKAP)	A	Jl. Raya Pulogebang
3	Kalideres	Layanan Angkutan Perkotaan dan AntarKota & Dalam Kota (AKAP)	A	Jl. Daan Mogot
4	Tanjung Priuk	Layanan Angkutan Perkotaan dan AntarKota & Dalam Kota (AKAP)	A	Jl. Enggano
5	Pulogadung	Layanan Angkutan Perkotaan	B	Jl. Raya Bekasi
6	Pinang Ranti	Layanan Angkutan Perkotaan	B	Jl. Bunga Rampai
7	Klender	Layanan Angkutan Perkotaan	B	Jl. Hasanudin
8	Rawamangun	Layanan Angkutan Perkotaan	B	Jl. Perserikatan
9	Cililitan	Layanan Angkutan Perkotaan	B	Jl. Letjen Sutoyo
10	Kampung Melayu	Layanan Angkutan Perkotaan	B	Jl. Jatinegara Barat
11	Grogol	Layanan Angkutan Perkotaan dan Antar Kota & Dalam Kota (AKAP)	B	Jl. Kyai Tapa
12	TPO Kota	Berhenti Layanan	-	Jakarta Barat
13	Blok M	Layanan Angkutan Perkotaan	B	Jl. Pondok Gede Raya
14	Ragunan	Layanan Angkutan Perkotaan	B	Jl. Margasatwa
15	Pasar Minggu	Layanan Angkutan Perkotaan	B	Jl. Pasar Minggu
16	Lebak Bulus	Layanan Angkutan Perkotaan dan Antar Kota & Dalam Kota (AKAP)	B	Jakarta Selatan
17	Manggarai	Berhenti Layanan	B	Jl. Minangkabau
18	Senen	Layanan Angkutan Perkotaan	B	Jl. Senen Raya
19	Muara Angke	Layanan Angkutan Perkotaan dan Antar Kota & Dalam Kota (AKAP)	B	Jl. Pluit
20	Tanah Merdeka	Terminal Barang	-	Jl. Cilincing
21	Pulogebang	Terminal Barang	-	Jl. Raya Pulo Gebang
22	Rawabuaya	Layanan Angkutan Perkotaan	-	Jl. Lingkar Luar Barat

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 22 buah terminal di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang melayani baik untuk pelayanan penumpang (orang) dan juga barang. Salah satu terminal terbesar yaitu Terpadu Pulo Gebang terdiri dari:

- Gedung A ± 1.000 m^2 ruang istirahat bus AKAP
- Gedung B ± 2.000 m^2 ruang tunggu penumpang dan lajur keberangkatan bus AKAP

- Gedung C ± 2.900 m^2, ruang tunggu kedatangan bus AKAP dan bus dalam kota
- 16 jalur bus dalam kota: 6 lajur bus kecil, 8 jalur bus sedang, 2 jalurbus besar.
- Gedung D ± 500 m^2, ruang tunggu dan lajur keberangkatan dan kedatangan bus Transjakarta

2. Kapal Penumpang Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Tabel 1. 3 Kapal Penumpang Dinas Perhubungan DKI Jakarta

No	Nama Kapal	Kapasitas (*Seats*)	Tipe Kapal (Material Konstruksi)	Tahun Pembuatan	Kondisi	Keterangan
1	KM. Lumba- Lumba Satu	50	Fiberglass	2003	Rusak Berat	Proses Penghapusan
2	KM. Lumba- Lumba Dua	50	Fiberglass	2003	Rusak Berat	Proses Penghapusan
3	KM. Kerapu I	30	Fiberglass	2005	Baik	Akan Beroperasi Di Tahun 2025
4	KM. Kerapu II	30	Fiberglass	2005	Baik	Akan Beroperasi Di Tahun 2025
5	KM. Kerapu III	30	Fiberglass	2005	Baik	Akan Beroperasi Kembali di Tahun 2025
6	KM. Kerapu IV	30	Fiberglass	2005	Baik	Akan Beroperasi Kembali di Tahun 2025
7	KM. Kerapu V	30	Fiberglass	2005	Baik	Akan Beroperasi Kembali di Tahun 2025
8	KM. Kerapu VI	30	Fiberglass	2005	Baik	Akan Beroperasi Kembali di Tahun 2025
9	KM. CATAMARAN	200	Aluminium	2012	Rusak Berat	Akan dihapuskan
10	KM. CATAMARAN II	80	Fiberglass	2013	Baik	Beroperasi
11	KM. CATAMARAN III	80	Fiberglass	2013	Baik	Beroperasi
12	KM. Paus	80	Fiberglass	2013	Baik	Akan Beroperasi Kembali di Tahun 2024
13	KM. Angkutan Sekolah 06	50	Fiberglass	2016	Baik	Beroperasi
14	KM. Angkutan Sekolah 07	50	Fiberglass	2016	Baik	Akan Beroperasi Kembali di Tahun 2025
15	KM. Angkutan Sekolah 08	50	Fiberglass	2016	Baik	Beroperasi

16	KM. Banawa Nusantara 24	GT. 35	Kayu	2017	Baik	Beroperasi
17	KM. Banawa Nusantara 74	GT. 35	Kayu	2018	Baik	Beroperasi
18	KM. Sangaji	48	Fiberglass	2018	Baik	Beroperasi
19	KM. Batara	48	Fiberglass	2018	Baik	Beroperasi
20	KM. Indra Kemala	48	Fiberglass	2018	Baik	Beroperasi
21	KM. Chabing Nusantara	48	Fiberglass	2018	Baik	Beroperasi
22	KM. Dewandra	48	Fiberglass	2018	Baik	Beroperasi
23	KM. Samudra Biru	48	Fiberglass	2018	Baik	Beroperasi
24	Kapal Patroli HIU I	15	Fiberglass	2003	Perlu dilakukan Pemeliharaan Mesin	Beroperasi
25	Kapal Patroli HIU IV	5	Fiberglass	2003	Perlu dilakukan Pemeliharaan Mesin	Beroperasi
26	Kapal Kerja 02	12	Fiberglass	2013	Perlu dilakukan Pemeliharaan Mesin	Beroperasi
27	Kapal Kerja 03	13	Fiberglass	2014	Perlu dilakukan Pemeliharaan Mesin	Beroperasi
28	Kapal Kerja 01	4	Fiberglass	2006	Mesin Rusak	Tidak Beroperasi
29	Kapal Patroli Hiu 05	15	Fiberglass	2012	Baik	Beroperasi
30	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus (Lain- Lain) / Kapal Catamaran	10	Fiberglass	2012	Baik	Beroperasi
31	Kapal Patroli 09	20	Fiberglass	2016	Baik	Beroperasi
32	KM. HIU 3 (Patroli)	10	Fiberglass	2004	Baik	Beroperasi
33	KM. Sonar 1	50	Fiberglass	2021	Baik	Beroperasi
34	KM. Sonar 2	50	Fiberglass	2021	Baik	Beroperasi
35	KM. Sonar 3	50	Fiberglass	2021	Baik	Beroperasi
36	KM. Sonar 4	50	Fiberglass	2021	Baik	Beroperasi
37	KM. Paus Dua	80	Fiberglass	2024	Baik	Akan Beroperasi Di Tahun 2025
38	KM. PAUS TIGA	80	Fiberglass	2024	Baik	Akan Beroperasi Di Tahun 2025

3. Pelabuhan

Provinsi DKI Jakarta memiliki 1 pelabuhan penumpang di Muara Angke dan 10 pelabuhan penumpang di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yaitu Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang, Pulau Pari, Pulau Payung, Pulau Tidung, dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara yaitu, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Harapan dan Pulau Sebira. Pada tahun 2019

jumlah penumpang yang menuju Kepulauan Seribu mencapai 5.000 orang per hari pada akhir pekan di musim liburan.

Dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan revitalisasi terhadap seluruh Pelabuhan Penumpang milik Provinsi DKI Jakarta. Perencanaan Detailed Engineering Design sampai tahun 2019 telah dilakukan pada Pelabuhan Pulau Pramuka, Pelabuhan Pulau Kelapa dan Pelabuhan Pulau Sabira. Pelaksanaan konstruksi Pelabuhan dilaksanakan secara bertahap dimulai sejak Tahun 2019 di Pelabuhan Muara Angke.

Gambar 1. 7 Pelabuhan Provinsi DKI Jakarta

Pelabuhan Muara Angke













Pelabuhan Untung Jawa





Pelabuhan Pulau Lancang





Pelabuhan Pulau Pari





Pelabuhan Pulau Tidung





Pelabuhan Pulau Payung



Pelabuhan Pulau Pramuka



Pelabuhan Pulau Panggang



Pelabuhan Pulau Kelapa





Pelabuhan Pulau Harapan



Pelabuhan Pulau Sabira



4. Sistem Pengendali Lalu Lintas

Gambar 1. 8 Ruang Sistem Pengendalian Lalu Lintas



Ruang NOC (Network Operation Center) yang difungsikan untuk mengontrol kegiatan lalu lintas wilayah DKI Jakarta yang berada di Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

5. Pusat Data dan Informasi Lalu Lintas

Gambar 1. 9 CCTV Kondisi Lalu Lintas



Terdapat 284 lokasi simpang Lampu Lalu Lintas yang tersebar di Wilayah DKI Jakarta dengan 3 jenis sistem kerja yaitu:

- 110 lokasi lampu lalu lintas menggunakan controller otonom (Lokal) tidak terhubung ruang NOC;
- 134 lokasi lampu lalu lintas menggunakan sistem ATCS (*Area Traffic Controller Systems*) yang terhubung jaringan komunikasi pada ruang pengendali NOC;
- 40 lokasi lampu lalu lintas menggunakan sistem ITCS (*Intelligent Traffic Control System*) yang terhubung jaringan komunikasi pada ruang pengendali NOC;

Gambar 1. 10 CCTV Pemantau Lalu Lintas

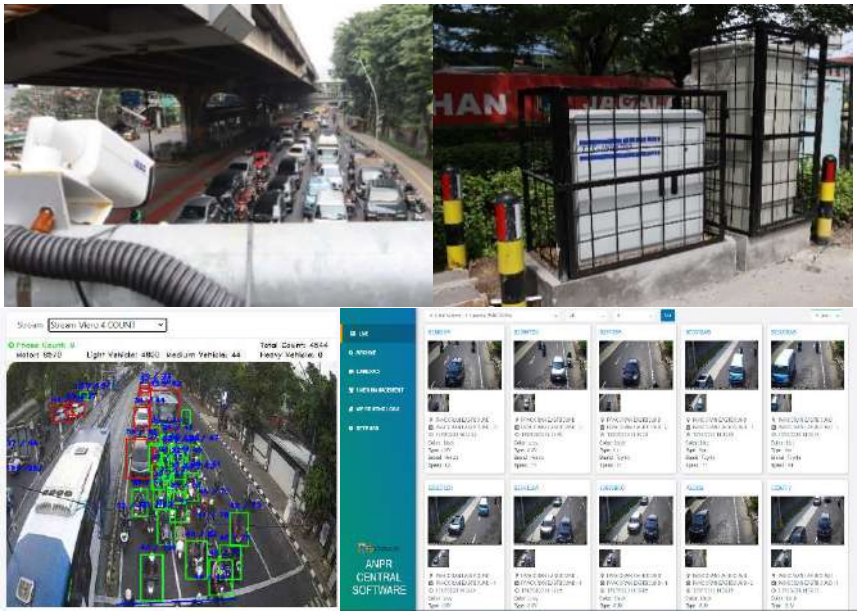
-



Terdapat 280 unit CCTV pemantau lalu lintas milik Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas yang terpasang dan tersebar di wilayah DKI Jakarta dengan 2 jenis type cctv yaitu:

- 194 unit CCTV type Fix;
- 86 unit CCTV type PTZ.

Gambar 1. 11 Sistem Lampu Lalu Lintas



1.5 Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2023

Tabel 1. 4 Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2023

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Rekomendasi	Data Dukung
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25,5	Agar Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan *(sustainable)* b. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja	a. Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang tertuang secara berkelanjutan dapat dilihat di 3.2 b. Penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dapat dilihat di 3.1

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Rekomendasi	Data Dukung
				yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24,9	Agar Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa: a. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi aktivitas dalam mencapai kinerja d. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	a. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja dapat dilihat di b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja dapat dilihat di c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi aktivitas dalam mencapai kinerja dapat dilihat di d. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dapat dilihat di 3.10
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13,2	Agar Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa informasi dalam Laporan Kinerja selalu telah mempengaruhi perubahan budaya organisasi.	Data dukung terkait upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memastikan informasi dalam Laporan Kinerja selalu telah mempengaruhi perubahan budaya organisasi dapat dilihat di
4.	Evaluasi Internal	25%	22	Agar Kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang	Data dukung terkait upaya-upaya yang telah dilkukan untuk memastikan bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang dapat dilihat di 3.5 dan 3.6

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sebagai berikut.

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan dan Manfaat
1.3 Data Umum Organisasi
1.3.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
1.3.2 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
1.3.3 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
1.3.4 Isu Strategis
1.3.5 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
1.3.6 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
1.4 Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
1.5 Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2023
1.6 Sistematika Penulisan
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026
2.2 Perencanaan Kinerja
2.2.1 Sasaran Strategis
2.2.2 Sasaran Khusus
2.2.3 Sasaran Operasional
2.3 Rencana Anggaran
BAB III PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja
3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
3.2.1 Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik
3.2.1.1 Penanganan Kemacetan
I. Penutupan Putaran Lalu Lintas (U-Turn)
II. Penerapan Sistem Satu Arah (SSA)
III. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
IV. Pengaturan Ulang Fase dan Waktu Siklus Lampu Lalu Lintas
V. Peningkatan Layanan Lampu Lalu Lintas (dari Otonom menjadi ITCS)
VI. Perbaikan Geometrik dan Ruas Jalan

VII. Penertiban Parkir, Pedagang Kaki Lima, dan Angkutan Kota
VIII. Peluncuran dan Pengoperasian Armada Baru Bus Listrik Transjakarta
3.2.2 Jumlah Titik Integrasi Antar Moda
3.2.3 Analisis Kepegawaian Pengampu IKU
3.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang Bersumber dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD)
3.4 Indikator Kinerja Sasaran Khusus
3.5 Indikator Kinerja Sasaran Operasional
3.6 Indikator Kinerja Pejabat Administrator Perangkat Daerah
3.7 Indikator Kinerja Pejabat Pengawas
3.8 Kondisi Lalu Lintas berdasarkan Kecepatan Ruas Jalan Utama
3.9 Realisasi Anggaran
3.10 Efisiensi Anggaran
3.10.1 Efisiensi Anggaran Berdasarkan IKU Integrasi
3.10.2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan IKU Modal Shared
3.11 Kegiatan Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024
3.11.1 Pembangunan Dermaga Apung di Pulau Tidung
3.11.2 Pengadaan Kapal Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3.11.3 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Listrik
3.11.4 Perencanaan Pekerjaan Peningkatan Standar Penyelenggaraan Pelayanan (SPP) Terminal Bus Kalideres
3.11.5 Pemberian Subsidi Transjakarta, LRT, dan MRT
3.11.6 Penyelenggaraan Mudik Gratis
3.12 Prestasi dan Penghargaan
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran
LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan penting dan signifikan dalam pengelolaan transportasi di DKI Jakarta, hal yang paling dirasakan masyarakat adalah kemacetan yang saat ini masih menjadi isu utama di DKI Jakarta. Untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menerapkan *Push and Pull Strategy.* Fokus dari strategi ini adalah mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan angkutan umum untuk aktivitas perjalanan hariannya. Melalui Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik dan Jumlah Titik Integrasi Antar Moda.

Pada Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 akan menjabarkan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (*Performance Results*) tahun 2024 dengan analisis pendekatan Rencana Kinerja (*Performance Plan)* tahun 2024. Pada tahun 2024 kedua IKU Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tercapai dengan baik, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Berikut gambaran capaian IKU Dinas Perhubungan Tahun 2024

Tabel 2. 1 Target dan Capaian Sasaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian					
				2023		2024		2025	2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	18,78	18,86	20,97	22,19	21,87	23,01

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian					
				2023		2024		2025	2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
2	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses Dan Integrasi Transportasi	Jumlah Titik Integrasi antar moda	Titik	22	22	26	37	30	34

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target			
						2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Transportasi Terintegrasi Dan Berkelanjutan		Persentase Perjalanan Penduduk menggunakan Transportasi Publik	Definisi: Perbandingan antara jumlah perjalanan penduduk dengan angkutan umum (12 moda) dibandingkan dengan total jumlah perjalanan Metode Pengukuran: Jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum per hari x 100% Total jumlah perjalanan per hari	Persen	14,76	18,78	20,97	21,87	23,01
	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses Dan Integrasi Transportasi	Jumlah Titik Integrasi antar moda	Definisi: Titik lokasi integrasi antar moda transportasi umum berbasis Jalan dengan transportasi umum berbasis rel dan/atau transportasi umum berbasis perairan Metode Pengukuran: Jumlah titik lokasi integrasi antar moda transportasi umum berbasis Jalan dengan transportasi umum berbasis rel dan/atau transportasi umum berbasis perairan	Titik	8	22	26	30	34

2.2 Perencanaan Kinerja

Sehubungan dengan permasalahan sektor transportasi yang menjadi isu strategis Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2024 yang disajikan dalam LKIP mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2023-2026 dan Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan tahun 2023-2025. Untuk memenuhi kewajiban berkaitan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai dan disusun secara jujur, obyektif, akurat, dan transparan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2025 tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2023-2025, sebagaimana akan dilakukan penyempurnaan pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2025 agar dapat memberi arah secara jelas bagi organisasi dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima.

Kinerja pada sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional menjadi dokumen perjanjian kinerja yang di tanda-tangan Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur DKI Jakarta, sebagaimana terlampir pada lampiran 1.

2.2.1 Sasaran Strategis

Penetapan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan merupakan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan sebagai sasaran strategis. Selain data yang diambil dari Renstra, kinerja yang bersumber dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebagai sasaran strategis. Berikut ini sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang diambil dari IKU Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1. Sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi DKI

Jakarta yang diambil dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2.

2.2.2 Sasaran Khusus

Berikut ini sasaran khusus yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3.

2.2.3 Sasaran Operasional

Berikut ini sasaran Operasional yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4.

Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan (Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal	Target			
						2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Transportasi Terintegrasi Dan Berkelanjutan		Persentase Perjalanan Penduduk menggunakan Transportasi Publik	Definisi: Perbandingan antara jumlah perjalanan penduduk dengan angkutan umum (12 moda) dibandingkan dengan total jumlah perjalanan Metode Pengukuran: Jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum per hari x 100% Total jumlah perjalanan per hari	Persen	14,76	18,78	20,97	21,87	23,01
	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses Dan Integrasi Transportasi	Jumlah Titik Integrasi antar moda	Definisi: Titik lokasi integrasi antar moda transportasi umum berbasis Jalan dengan transportasi umum berbasis rel dan/atau transportasi umum berbasis perairan Metode Pengukuran: Jumlah titik lokasi integrasi antar moda transportasi umum berbasis Jalan dengan transportasi umum berbasis rel dan/atau transportasi umum berbasis perairan	Titik	8	22	26	30	34

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja yang Bersumber dari Kegiatan Strategis Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target					Keterangan
				I	II	III	IV	Tahunan	
1	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	100	100	100	100	persen
2	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100	100	100	100	100	persen
3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100	100	100	100	100	persen
4	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	-	100	-	100	100	persen
5	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapnya	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapnya	100	100	100	100	100	persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target					Keterangan
				I	II	III	IV	Tahunan	
6	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	-	100	-	100	100	persen
7	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	-	-	-	100	100	persen
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	persen
9	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	100	-	100	100	persen
10	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Percepatan Penanganan Kemacetan Sub KSD Pembangunan dan	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Percepatan Penanganan Kemacetan Sub KSD	100	100	100	100	100	persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target					Keterangan
				I	II	III	IV	Tahunan	
		Pengoperasian Sarana Angkutan Umum Massal Berbasis Rel	Pembangunan dan Pengoperasian Sarana Angkutan Umum Massal Berbasis Rel						

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja yang Bersumber dari Sasaran Khusus

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
				I	II	III	IV		
1	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	persen
2	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data	-	-	-	3.25	3.25	persen
3	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau	Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.	5	25	55	100	100	persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
				I	II	III	IV		
		Kuasa Pengguna Barang							
4	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%	-	50	-	100	100	persen
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).	-	30	-	80	100	persen
6	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah	100	100	100	100	100	persen
7	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten	-	-	50	50	100	persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
				I	II	III	IV		
			Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.						
8	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.	-	-	-	71	71	nilai

Tabel 2. 6 Indikator Kinerja yang Bersumber dari Sasaran Operasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target				Tahunan	Keterangan
				I	II	III	IV		
1	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
2	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	100	25	25	25	25	Persen
3	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
4	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil Jak Survei	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	Persen

2.3 Rencana Anggaran

Pelaksanaan rencana aksi untuk menunjang tercapainya target indikator sasaran strategis serta penunjang pelayanan internal perlu ditunjang dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dari sumber lain yang sah menurut aturan perundang- undangan.

Sasaran strategis terkait terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta ditunjang oleh 3 (tiga) program teknis, sedangkan terkait terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel ditunjang oleh 1 (satu) program urusan kantor sebagai penunjang pelayanan internal.

Tabel 2. 7 Anggaran Belanja Daerah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Program Sasaran Strategis TA 2024

Sasaran Strategis	Program	Pagu (Rp)
Terwujudnya saranadan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.269.558.691.719
	Program Pengelolaan Pelayaran	39.767.739.396
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.939.602.119
Terwujudnya tata kelola pemerintahandan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Provinsi	856.741.629.586
Total APBD-P 2024	**Rp7.170.007.662.820**	

BAB III
PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin darihasil capaian perjanjian kinerja yang ditargetkan telah dapat dicapai dan dipenuhi pada tahun 2024.

3.1 Capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan melalui kontrak kinerja yang di implementasikan melalui Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) sebagai wujud nyata alat pengukuran dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta, maka pada tahun anggaran 2024 secara umum Dinas PerhubunganProvinsi DKI Jakarta telah berhasil mengimplementasikan dan memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan hal ini tercermin dari dapat tercapainya beberapa indikator dari sasaran strategis yang harus diwujudkan dalam tahun 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026.

Dari program prioritas Pembangunan Daerah serta Indikasi Kebutuhan Pendanaan yang terdapat dalam RPD 2023-2026, terdapat 3 (tiga) indikator sasaran / Indikator Kinerja Utama yang tidak berdiri sendiri, sasaran tersebut ditopang oleh program dengan indikator program yang mendukung secara langsung pencapaian Indikator Kinerja Utama. Pencapaian indikator program juga didukung dengan kegiatan-kegiatan dalam APBD maupun Non APBD. Keterkaitan antara pencapaian / pengukuran rencana aksi perjanjian kinerja Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama pada Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Keterangan
Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis							
1	Terwujudnya Transportasi Terintegrasi dan Berkelanjutan	Persentase Perjalanan Penduduk menggunakan Transportasi Publik	e-SAKIP	Perbandingan antara jumlah perjalanan penduduk dengan angkutan umum (12 moda) dibandingkan dengan total jumlah perjalanan	20,97	22,19	***Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan***
2	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses, dan Integrasi Transportasi	Jumlah titik integrasi antar moda	e-SAKIP	Titik lokasi integrasi antar moda transportasi umum berbasis Jalan dengan transportasi umum berbasis rel dan/atau transportasi umum berbasis perairan	26	37	***Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan***

3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

3.2.1 Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik

a. Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Indikator Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik merupakan sasaran dari Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit. Indikator ini merupakan penggambaran besar prevalensi warga untuk menggunakan transportasi umum dalam pergerakannya. Indikator ini diukur melalui perbandingan antara jumlah perjalanan penduduk dengan menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan

total jumlah perjalanan dalam periode waktu tertentu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 mempunyai target Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik sebesar 20,97% yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Tabel 3. 2 Indikator Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik: • Transjakarta • KRL • MRT • LRT Jakarta • LRT Jabodebek • Railink • Bus/Angkot reguler • Ojek (Online) • Taxi Bajaj • ASK • Kapal • Bus Sekolah	Persen	20,97

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

b. Realisasi dan Capaian

Realisasi Capaian nilai Persentase Perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik pada tahun 2024 mempunyai nilai Capaian sebesar 22,19% berdasarkan hasil perolehan jumlah perjalanan dengan angkutan umum sebesar 4.485.930 perjalanan/hari dan hasil perhitungan data lalu lintas tahun 2024 sebesar 20.214.870 perjalanan/hari.

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	20,97	22,19	105,82

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

`Adapun realisasi jumlah perjalanan penumpang angkutan umum sebanyak 12 moda pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Jumlah Perjalanan Harian dengan Angkutan Umum di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Jenis Angkutan Umum	Jumlah	Satuan
1.	Transjakarta	1.230.545	Perjalanan/hari
2.	KRL	828.679	Perjalanan/hari
3	MRT	110.381	Perjalanan/hari
4.	LRT Jakarta	3.310	Perjalanan/hari
5.	LRT Jabodebek	6.096	Perjalanan/hari
6.	Railink	6.102	Perjalanan/hari
7.	Bus/Angkot reguler	254.648	Perjalanan/hari
8.	Ojek *(Online)*	1.202.049	Perjalanan/hari
9.	Taxi Bajaj	200.414	Perjalanan/hari
10.	ASK	601.048	Perjalanan/hari
11.	Kapal	3.418	Perjalanan/hari
12.	Bus Sekolah	39.242	Perjalanan/hari
Jumlah perjalanan dengan angkutan umum		**4.485.930**	**Perjalanan/hari**

Berdasarkan data perbandingan antara jumlah perjalanan menggunakan 12 moda angkutan umum dengan jumlah perjalanan per hari pada tahun 2024, maka persentase jumlah perjalanan yang menggunakan angkutan umum di DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar 22,19%.

c. Perbandingan dengan RPD Tahun 2023-2026

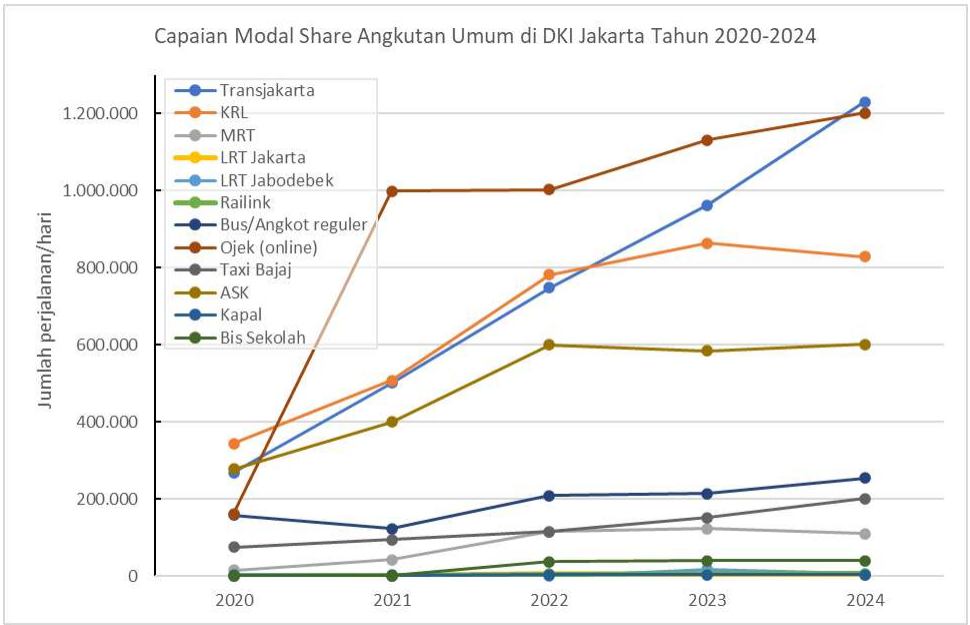
Sasaran Indikator kinerja utama persentase jumlah perjalanan dengan angkutan umum di DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu:

Tabel 3. 5 Target Sasaran Indikator Kinerja Utama pada RPD Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target dan Capaian					
				2023		2024		2025	2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	18,78	18,86	20,97	22,19	21,87	23,01

Berdasarkan target pada tabel di atas, target akhir untuk persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik sebesar 23,01%. Adapun capaian persentase perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum pada tahun 2023 sebesar 18,86%. Selisih capaian untuk mencapai target akhir sebesar 4,15% sehingga diperlukan peningkatan kinerja dalam implementasi strategi manajemen kebutuhan lalu lintas (*Transport Demand Management)*.

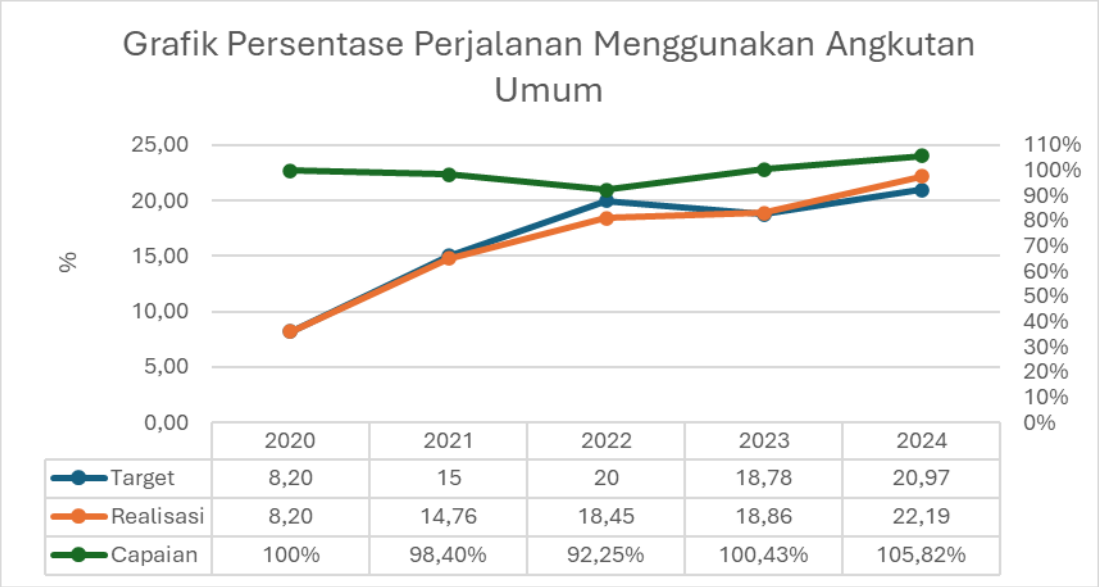
Gambar 3. 1 Capaian Modal Share Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2020-2024



Tabel 3. 6 Jumlah Perjalanan dengan Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Moda Transportasi	**Jumlah Perjalanan dengan Angkutan Umum**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Transjakarta	268.551	501.155	747.920	962.471	1.230.545
KRL	344.074	507.361	781.745	863.513	828.679
MRT	15.264	42.823	115.135	123.293	110.381
LRT Jakarta	780	1.473	5.640	4.363	3.310
LRT Jabodetabek	0	0	0	17.515	6.096
Railink	696	1.403	4.644	5.377	6.102
Bus/Angkot reguler	158.663	123.030	208.730	213.849	254.648
Ojek (*online*)	162.464 pe	999.160	1.003.160	1.131.227	1.202.049
Taxi Bajaj	74.387	94.386	115.308	152.176	200.414
ASK	277.548	399.096	599.844	584.640	601.048
Kapal	1.756	1.903	2.933	3.701	3.418
Bis Sekolah	0	785	36.990	40.152	39.242
Total Per Tahun	**1.304.183**	**2.672.575**	**3.622.049**	**4.102.277**	**4.485.932**

Gambar 3. 2 Persentase Perjalanan Menggunakan Angkutan Umum



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	8,20	15	20	18,78	20,97
Realisasi	8,20	14,76	18,45	18,86	22,19
Capaian	100%	98,40%	92,25%	100,43%	105,82%

d. Perangkat Daerah yang terkait serta Program/Kegiatan/KSD dan Anggaran

Sehubungan dengan capaian persentase perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum Tahun 2024, ada beberapa program yang dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan capaian tersebut terdiri dari:

Tabel 3. 7 Perangkat Daerah yang terkait serta Program/Kegiatan/KSD dan Anggaran

	INDIKATOR	NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	1	Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.225.309.284.569	5.662.143.843.503	90,95%
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.688.870.992.730	5.188.068.074.657	91,20%
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	286.861.812	273.816.060	95,45%
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	463.975.969.701	405.253.343.502	87,34%
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	18.899.312.333	16.857.472.442	89,20%
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	31.432.293.033	30.571.651.993	97,26%
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	15.125.098.221	15.046.076.403	99,48%
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.718.756.739	6.073.408.446	90,39%
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	39.767.739.396	35.829.816.457	90,10%

	INDIKATOR	NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	27.672.910.995	24.152.672.267	87,28%
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	11.043.167.626	10.711.571.236	97,00%
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1.051.660.775	965.572.954	91,81%
				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	3.939.602.119	3.615.327.522	91,77%
				Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	3.939.602.119	3.615.327.522	91,77%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	237.292.810.634	220.835.131.350	93,06%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.787.886.488	66.205.814.678	88,52%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.760.628.597	56.160.010.135	97,23%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.744.295.549	98.469.306.537	94,01%
				TOTAL	**6.506.309.436.718**	**5.922.424.118.832**	**91,03%**

Realisasi anggaran dalam program penunjang persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik tahun 2024 terlaksana sebesar Rp5.922.424.118.832 dari total pagu anggaran sebesar Rp6.506.309.436.718, atau capaian sebesar 91,03% dengan efisiensi sebesar 96,4% dari nilai total pagu anggaran.

Selain program di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang menunjang pencapaian indikator tersebut, seperti KSD nomor 2 Penanganan dan 8 Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan, dengan Sub-KSD dan Renaksi sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pengoperasian Sarana Angkutan Umum Massal Berbasis Rel;
   a. Pembangunan LRT Jakarta Fase 1 B Velodrome-Manggarai (Capaian: 100%)
      Pada sub-kegiatan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome – Manggarai), progres menunjukkan bahwa pada B03 target penyampaian dokumen final kriteria desain dan spesifikasi teknis belum tercapai karena dokumen masih dalam proses revisi oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pada B06, verifikasi kelengkapan dokumen Andalalin belum selesai karena gambar teknis perlu perbaikan oleh PT Jakarta Propertindo berdasarkan masukan Dinas Bina Marga dan BBWSCC. Selanjutnya, pada B09, kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) dan rekomendasi teknis Andalalin belum diterbitkan karena dokumen masih dalam proses penyelesaian dan pengesahan oleh Kementerian Perhubungan. Namun, pada B12, Keputusan Gubernur tentang Izin Membangun Prasarana (IMP) telah diselesaikan, meski tetap menunggu kelengkapan dokumen dari PT Jakarta Propertindo untuk progres lanjutan. Pembangunan LRT Fase 1B memerlukan percepatan pada penyelesaian dokumen teknis dan koordinasi antar instansi untuk memastikan keberlanjutan proyek.

   b. Pembangunan MRT Fase 2 A (Bundaran HI-Kota) (Capaian: 100%)
      Pada sub-kegiatan pembangunan MRT Fase 2A (Bundaran HI – Kota), progres pada B06 mencatat bahwa surat permohonan perpanjangan penetapan lokasi telah disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan kepada Pj. Gubernur,

sementara proses paraf perbal sedang berlangsung. Pada B09, pengadaan tanah mencapai 100%, termasuk musyawarah bentuk ganti rugi lahan, dengan beberapa surat terkait telah diterbitkan. Pada B12, finalisasi pengadaan tanah telah dilakukan, namun beberapa penandatanganan pelepasan hak oleh pemilik lahan masih dijadwalkan ulang. Proses pengadaan tanah mengalami kemajuan signifikan dengan capaian ganti rugi yang hampir rampung, meski ada keterlambatan pada penjadwalan ulang kesepakatan dengan pemilik lahan.

c. Perencanaan Pembangunan MRT East-West Phase 1 Stage 1 (Capaian: 100%)

Untuk sub-kegiatan perencanaan MRT East-West Phase 1 Stage 1, pada B03, proses input rancangan awal pengadaan tanah belum selesai karena masih menunggu pembahasan OPD terkait. Alternatif pelaksanaan pengadaan tanah sedang dirumuskan. Pada B06, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) masih dalam proses finalisasi, sementara pengalokasian anggaran sebesar Rp100 miliar telah diajukan. Pada B12, penyampaian DPPT dan audiensi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN telah dilakukan, dengan rencana pengadaan tanah diajukan secara bertahap. Progres pelaksanaan tahap awal pembangunan MRT East-West mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi kendala regulasi dan fiskal melalui penyusunan timeline yang realistis.

2. Pengembangan Transit Oriented Development (TOD);
   a. Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait peningkatan dan pengembangan area stasiun Tanah Abang (Capaian: 100%)

3. Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya.
   a. Penyelesaian Trotoar Complete Street di Provinsi DKI Jakarta (Capaian: 100%)

Pada sub-kegiatan penyediaan jalan dan infrastruktur pelengkapnya (Trotoar Complete Street), progres pada B09 meliputi relokasi aset, pengamanan lalu lintas, dan penertiban parkir di sekitar lokasi pembangunan trotoar yang telah terlaksana sepenuhnya. Rekomendasi teknis juga telah diterbitkan, termasuk

untuk Jalan H.R. Rasuna Said dan Jalan M.T. Haryono. Pada B12, kegiatan marka jalan, jalur sepeda, dan pemasangan rambu di sekitar lokasi pembangunan trotoar telah selesai. Seluruh target pada sub-kegiatan ini telah tercapai dengan koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga.

b. Pelaksanaan Bulan Tertib Trotoar (Capaian: 100%)
Pada sub-kegiatan pelaksanaan bulan tertib trotoar, pelaksanaan kegiatan pada TW 1 hingga TW 4 tercapai 100% dengan kegiatan yang dilaksanakan serentak di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Kegiatan ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya trotoar sebagai fasilitas umum.

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) di atas telah dilaksanakan dan hasilnya mencapai target yang ditetapkan dalam KSD guna mendorong pencapaian indikator persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik.

e. Perbandingan Capaian dengan Nasional

Secara nasional, penggunaan angkutan umum di Indonesia mengalami peningkatan pada masing-masing moda perjalanan. Jumlah penumpang angkutan udara domestik pada periode Januari-Agustus 2024 sebesar 42,0 juta orang dan jumlah penumpang internasional sebesar 12,3 juta orang, meningkat sebesar 1,50% dan 23,94% dari tahun 2023 (BPS, 2024). Adapun jumlah penumpang angkutan laut mencapai 17,3 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 26,02% dari tahun sebelumnya dan jumlah penumpang angkutan kereta api sebesar 277,5 juta orang, atau naik 14,87% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh beberapa institusi, persentase penggunaan angkutan umum di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 12,25% sedangkan 71,65% dari responden menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda utama perjalanan (Statista, 2024).

f. Faktor Keberhasilan/Kendala

Secara umum capaian persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik tahun 2024 telah tercapai karena koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholde*r yang baik serta adanya komitmen bersama untuk mewujudkan peningkatan penggunaan moda angkutan umum di DKI Jakarta. Selain itu, implementasi strategi integrasi antar moda, seperti integrasi layanan, integrasi tarif, dan fisik juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian target penggunaan angkutan umum, yaitu adanya layanan *feeder* di beberapa titik simpul transportasi, penataan kawasan stasiun, integrasi tarif antar moda, dan peningkatan infrastruktur *skywalk*/jembatan penghubung antar titik simpul yang memudahkan perjalanan pengguna angkutan umum sehingga aspek kenyamanan dan kemudahan dapat terpenuhi yang dapat meningkatkan penggunaan moda angkutan umum.

Adapun penggunaan angkutan umum masih didominasi oleh angkutan online. Harapan mendatang transportasi publik dapat lebih berperan sebagai moda utama perjalanan dengan meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat. Beberapa kendala, seperti aspek keandalan, contohnya *headway* yang tidak selalu sesuai pada moda angkutan massal berbasis jalan karena lajur masih bersinggungan dengan kendaraan lain, keterbatasan lahan sehingga kenyamanan pada titik simpul tidak dapat optimal. Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan persentase penggunaan angkutan publik Tahun 2024 antara lain:

Faktor Keberhasilan Capaian

Tabel 3. 8 Faktor Keberhasilan Capaian

No	Faktor	Kegiatan
1.	Koordinasi antar stakeholder yang intensif	- Rapat monitoring dan evaluasi layanan angkutan umum massal (BRT, MRT, LRT) secara berkala; - Pembahasan Rencana pengembangan angkutan massal MRT East - West - Pembahasan LRT Velodrome - Manggarai - Penandatanganan perjanjian kerja sama *e-ticketing* angkutan perairan
2.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada layanan angkutan umum	Pengawasan pelaksanaan SPM pada Transjakarta, MRT, LRT.

3.	Dukungan Pengoperasian angkutan umum massal	- Dukungan feeder dan prasarana lalu lintas pada pengoperasian layanan angkutan umum baru, seperti Kereta Cepat, LRT Jabodebek - Penyiapan kantong parkir atau park&ride pada area titik simpul angkutan umum
4.	Perluasan layanan angkutan umum	- Pelaksanaan layanan Transjakarta pada Bandara Soekarno Hatta - Penambahan jam operasional layanan angkutan umum pada acara-acara besar (event musik, tahun baru, dll)
5.	Integrasi	- Tarif Integrasi pada Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta - integrasi LRT Jabodebek - Pembangunan Jembatan Penyeberangan di Stasiun KRL - Pemasangan prasarana lalu lintas pada simpul transportasi terintegrasi (Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Duren Kalibata, Stasiun Klender, Stasiun Cikini - Aplikasi JaketBoat
6.	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung angkutan umum	- Modernisasi Terminal Kampung Rambutan - Pembangunan Dermaga Apung di Pulau Tidung - Peningkatan fasilitas dermaga pelabuhan di Kepulauan Seribu - Inspeksi Keselamatan (Ramp Check) pada Bus-Bus AKAP
7.	Inklusivitas dalam transportasi umum	Keberpihakan pada disabilitas dengan pemberian kartu khusus disabilitas bagi penyandang disabilitas dan berhak mendapatkan tarif gratis pada Transjakarta untuk 15 golongan.

Dalam upaya mencapai target perjalanan menggunakan transportasi publik, terdapat tantangan yang dihadapi sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan.

Kendala yang terjadi

Tabel 3. 9 Kendala yang Terjadi

No	Kendala	Rekomendasi/ Mitigasi
1.	Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi	diperlukan kebijakan disinsentif penggunaan kendaraan pribadi
2.	Keterbatasan lahan dalam pengembangan dan peningkatan prasarana angkutan umum	koordinasi dan penyesuaian desain
3.	Aspek keandalan angkutan umum	agar angkutan umum lebih adaptif dalam penerapan teknologi untuk layanan

		angkutan publik, seperti peningkatan pengalaman pengguna dengan peningkatan Sistem Informasi Penumpang (informasi rute, jadwal, lokasi armada, tarif) yang dapat diakses melalui gawai.

g. Rencana Ke depan terkait dengan target selanjutnya

Beberapa strategi praktek yang sesuai untuk keberhasilan penggunaan transportasi publik, adalah sosialisasi dan komunikasi publik secara konsisten. Selain itu, secara proaktif merencanakan layanan, dan fokus terhadap kelompok pengguna tertentu seperti pekerja, komunitas dan kesetaraan sosial serta memperkuat aspek keselamatan (APTA, 2023). Upaya lain adalah dengan memanfaatkan peluang untuk memperluas jumlah penumpang angkutan umum dan terus mengikuti perubahan. Guna meningkatkan persentase perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari:

Tabel 3. 10 Rencana Aksi 2025

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2025
1	Pemberian subsidi Transjakarta	Rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan
2	Pemberian subsidi MRT	Rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan
3	Pemberian subsidi LRT	Rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan
4	Pelayanan Angkutan Bus Sekolah	- Rencana pola operasi dan penambahan jumlah penumpang - Penambahan armada bus sekolah
5	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum Provinsi DKI Jakarta	- Pengemudi angkutan umum yang tersertifikasi - Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum
7	Peningkatan dan pengembangan Angkutan Perairan	- Rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan - Pengadaan kapal angkutan perairan
8	Peningkatan Terminal Bus Tipe A dan Tipe B	- Peningkatan Terminal Tipe A (Peningkatan SPP Terminal Bus Kalideres & Dokumen Kajian Pendukung Revitalisasi Terminal Bus Kampung Rambutan) - Peningkatan Terminal Tipe B (Peningkatan SPP/ Pemeliharaan Terminal Bus Cililitan, Pulogadung, Ragunan, Rawamangun, Muara Angke, TMB Pulogebang)
9	Peningkatan pelabuhan dan dermaga di wilayah DKI Jakarta	- Revitalisasi Pulau Pari

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2025
10	Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome – Manggarai	- Surat Penyampaian Dokumen Finalisasi gambar teknis LRT Tahap 1B Velodrome-Manggarai - Rekomendasi Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Persetujuan Andalalin Pembangunan Jalur (Pier 111B-198B) dan Stasiun LRT Fase 1B (Velodrome-Manggarai) - Perizinan dan pembangunan LRT Tahap 1B Velodrome-Manggarai
11	Pembangunan MRT Fase 2A (Bundaran HI – Kota)	- Pelepasan Hak di Lokasi Grand Paragon Kecamatan Taman Sari ang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat - Musyawarah bentuk ganti kerugian di Lokasi Hayam Wuruk Plaza Kecamatan Taman Sari yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat - Pelepasan Hak di Lokasi Hayam Wuruk Plaza Kecamatan Taman Sari yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat - Pengadaan tanah di Lokasi Grand Paragon di lokasi Grand Paragon Kecamatan Taman Sari, Hayam Wuruk Plaza Kecamatan Taman Sari, dan Bidang Tanah Milik L Yudianto Kecamatan Taman Sari
12	Pembangunan MRT Fase 2B	- Penetapan Trasse MRT Fase 2B (Kota – Ancol)
13	Pembangunan MRT *East-West*	- Review Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) (Lokasi terdiri dari 479 bidang) - Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) ke Gubernur (Lokasi terdiri dari 479 bidang)
14	Menyusun Rancangan Peraturan Daerah terkait Kebijakan Transportasi - Rancangan Peraturan Daerah terkait Rancangan Induk Transportasi - Rancangan Peraturan Daerah terkait Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas)	- Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah - Dokumen hasil kordinasi dengan Biro Hukum terkait Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah terkait Kebijakan Transportasi
15	Penyediaan Prasarana Integrasi Antar Moda sebanyak 4 (empat) titik di lokasi Stasiun Angke, Stasiun Buaran, Stasiun Mangga Besar, dan Stasiun Pancasila	- Menyusun Laporan Konsep Perencanaan Titik Integrasi di lokasi Stasiun Angke, Stasiun Buaran, Stasiun Mangga Besar, dan Stasiun Pancasila - Pengadaan Prasarana Integrasi Antar Moda

3.2.1.1 Penanganan Kemacetan

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dibentuk untuk mengatasi permasalahan di Jakarta, salah satu permasalahan tersebut adalah kemacetan. Kemacetan dapat

diukur sebagai derajat kejenuhan (*Degree of Saturation* atau *V/C ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan. Peningkatan jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan di Jakarta yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan, maka akan berdampak pada kemacetan.

Dari penjelasan diatas, kemacetan atau bisa disebut sebagai derajat kejenuhan atau dalam *American Highway Manual* dan KM Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 mengenai tingkat pelayanan jalan disebabkan oleh 2(dua) faktor utama yaitu Jumlah / volume kendaraan dan kapasitas jalan. Peranan Dinas Perhubungan dalam 2 (dua) faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Mengendalikan jumlah / volume kendaraan di jalan, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi dengan mendorong penggunaan angkutan umum. Kebijakan ini yang disebut sebagai *push and pull policy* dalam *Transport Demand Management*
2. Mengembalikan kapasitas jalan sebagai ruang lalu lintas jalan. Salah satunya, parkir liar mengambil kapasitas jalan yang seharusnya sebagai ruang lalu lintas jalan. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dinas Perhubungan melakukan pengendalian dan penertiban lalu lintas dalam mengatasi permasalahan kemacetan tersebut.

Beberapa penyebab kemacetan dapat dikerucutkan pada hal-hal berikut:

1. Kapasitas jalan yang berkurang karena hambatan samping diantaranya putaran lalu lintas (U-turn), parkir liar, pdagang kaki lima (PKL) dan angkutan kota yang mengetem sembarangan.

2. Kondisi jalan diantaranya jalan rusak, jalan menyempit *(Bottleneck), geometric* jalan dan persimpangan jalan.

Untuk mengatasai permasalahan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 setidaknya melakukan 6 (strategi) untuk mengurai kemacetan lalu lintas di titik-titik kemacetan di DKI Jakarta. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

I. Penutupan Putaran Lalu Lintas *(U-Turn)*

Dalam rangka penanganan lalu lintas jangka mendesak dilakukan Penutupan Putaran Lalu Lintas (*U-Turn*) pada 32 (tiga puluh dua) titik lokasi *U-Turn* di 5 (lima) wilayah Provinsi DKI Jakarta. dengan saat ini *progress* penutupan *U-turn* sebesar 100%, dengan rincian *progress* penutupan Putaran Lalu Lintas (*U-Turn*) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Penutupan Putaran Lalu Lintas (*U-Turn*)

No	Ruas Jalan	Implementasi	Penanggung-Jawab
Kota Administrasi Jakarta Pusat			
1	Jalan Garuda (Wuling Motor)	Sudah terlaksana	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2	Jalan Palmerah Utara (Apotik Bundaran Slipi)	Sudah terlaksana	
3	Jalan Sukarjo Wiryopranoto (BNI Sawah Besar)	Sudah terlaksana	
4	Jalan Pejompongan (Menara BNI)	Sudah terlaksana	
5	Jalan K.H. Mas Mansyur (Citywalk)		
Kota Administrasi Jakarta Selatan			
5	Jalan Pakubuowo VI (Akses menuju ke Jalan Martimbang II)	Sudah terlaksana	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
6	Jalan Raya Pasar Minggu (Pintu Masuk Perumahan Sat Brimobda Metro Batalyon B)	Sudah terlaksana	
7	Jalan Raya Pasar Minggu (Jalan Samali perbatasan Kec. Pancoran dan Kec. Pasar Minggu/ Jalan Samali dekat Halte H Samali Partai Bulan Bintang)	Sudah terlaksana	
8	Jalan RC Veteran Raya (Depan Pom Bensin Pertamina)	Sudah terlaksana	
9	Jalan Raya Ciledug (*U-Turn* dekat Bank Mega & Bank BSI)	Sudah terlaksana	
10	Jalan Rasuna Said (putaran dekat JPO karet Kuningan)	Sudah terlaksana	
11	Jalan Pangeran Antasari (*U-Turn* simpang Jalan H Naim II dan Jalan H Naim III)	Sudah terlaksana	
12	Jalan Pangeran Antasari (Depan SD Cilandak Barat 15 Pagi)	Sudah terlaksana	
Kota Administrasi Jakarta Utara			
13	Jalan Danau Sunter Utara Indomaret Danau Sunter Utara 33	Sudah terlaksana	Suku Dinas Perhubungan Kota

No	Ruas Jalan	Implementasi	Penanggung-Jawab
14	Jalan Mitra Bahari Apartemen Mitra Bahari	Sudah terlaksana	Administrasi Jakarta Utara
15	Jl.Yos Sudarso (*On Ramp* Masuk Tol Sunter)	Sudah terlaksana	
Kota Administrasi Jakarta Timur			
16	Jalan Raya Bekasi (dekat Halte Transjakarta Ujung Menteng)	Sudah terlaksana	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur
17	Jalan I Gusti Ngurah Rai (dekat halte Transjakarta Cipinang)	Sudah terlaksana	
18	Jalan DI Panjaitan (depan Kantor Camat Jatinegara)	Sudah terlaksana	
19	Jalan DI Panjaitan (dekat Pos Pemadam Jatinegara)	Sudah terlaksana	
20	Jalan Raya Kalimalang/Jalan Laksamana Malahayati (simpang Jalan Kapin Raya)	Sudah terlaksana	
21	Jalan Kayu Putih Raya (Arah Utara-Utara dan Jalur Cepat-Lambat Depan Simpang Pulo Nangka Timur)	Sudah terlaksana	
22	Jalan Raya Kalimalang (Depan KFC, Jalan Tol Becakayu)	Sudah terlaksana	
23	Jalan Raya Jakarta-Bogor (Depan PD Pasar Jaya Kramat Jati)	Sudah terlaksana	
Kota Administrasi Jakarta Barat			
24	Jalan Daan Mogot (Casa Jardin)	Sudah terlaksana	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
25	Jalan Daan Mogot (Victoria Residence)	Sudah terlaksana	
26	Jalan Palmerah Utara (Regina Pacis)	Sudah terlaksana	
27	Jalan Palmerah Utara (Playfield Court)	Sudah terlaksana	
28	Jalan Joglo Raya (*U-Turn Exit* Tol Joglo)	Sudah terlaksana	
29	Jalan Kembangan Raya (Depan Hotel Neo)	Sudah terlaksana	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
30	Jalan Outer Ring Road (Pos Polisi)	Sudah terlaksana	
31	Jl KH Moh Mansyur (TL Jembatan Lima Roxy)	Sudah terlaksana	

Gambar 3. 3 Infografis Penutupan Putaran Lalu Lintas (*U-Turn*) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta



II. Penerapan Sistem Satu Arah (SSA)

Penerapan Sistem Satu Arah pada 11 (sebelas) ruas jalan dilakukan untuk menurunkan tingkat kecelakaan dengan mengurangi titik konflik kendaraan dari arah berlawanan dan untuk meningkatkan kapasitas jalan. Progres penerapan Sistem Satu Arah (SSA) sampai dengan saat ini sebesar 100%. Rincian penerapan Sistem Satu Arah (SSA) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Penerapan Sistem Satu Arah (SSA)

No	Ruas Jalan	Implementasi	Keterangan	Penanggung-jawab
1	Jalan Jembatan Besi XII, Kota Administrasi Jakarta Barat	Sudah Terlaksana	Telah dilaksanakan untuk mendukung penataan Stasiun Duri	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Ruas Jalan	Implementasi	Keterangan	Penanggung-jawab
2	Jalan Gading Indah Raya Kota Administrasi Jakarta Utara	Sudah Terlaksana	Telah dilaksanakan uji coba pada tanggal 14 Juni 2023	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara
3	Jalan Pondok Pinang 3, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Sudah Terlaksana	Telah dilaksanakan uji coba pada tanggal 8-12 Mei 2023	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
4	Jalan Muhi Raya/Simpang Jalan Ciputat, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Sudah Terlaksana	Telah dilaksanakan uji coba pada tanggal 5 Juni 2023	
5	Jalan Taman Wijaya Kusuma, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Sudah Terlaksana	Telah dilaksanakan uji coba pada tanggal 26 Oktober 2022	
6	Jalan Kemang Utara IX, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dalam tahapan sosialisasi kepada warga	Telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 6 Juni 2023 di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan, menunggu rapat koordinasi lanjutan dari pihak Walikota/Kecamatan	
7	Jalan Duren Bangka, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dalam tahapan sosialisasi kepada warga		
8	Jalan Ciranjang, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Sudah Terlaksana	Pelaksanaan SSA di Jalan Ciranjang merupakan satu kesatuan dengan rekayasa *Traffic Light* Santa, dimana sesuai hasil evaluasi dikembalikan pada kondisi eksisting dikarenakan volume lalu lintas yang cukup tinggi dari arah Timur (Tendean/Mampang) maupun dari arah Selatan (Wijaya/Antasari) mengakibatkan tingginya antrian kendaraan pada simpang yang terdampak dan berpengaruh terhadap kepadatan ruas jalan di sekitarnya baik pada siang maupun sore hari.	
9	Jalan Laksamana Malahayati/Simpang Haji Naman Kota Administrasi Jakarta Timur	Dalam tahapan persiapan konstruksi	Telah dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan di tingkat Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 24 Mei 2023 perihal Rencana Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Laksamana Malahayati. Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Ruas Jalan	Implementasi	Keterangan	Penanggung-jawab
			masih akan melaksanakan pengaspalan ulang	
10	Jalan Karet Pasar Baru Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Sudah Terlaksana		Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat
11	Jalan Karet Pasar Baru Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Dalam tahapan sosialisasi kepada warga		

Gambar 3. 4 Infografis Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta



III. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Terhadap penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan di 17 (tujuh belas) lokasi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta *progress* sampai dengan saat ini sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

No	Titik Kemacetan	Upaya Penanganan	Implementasi	Penanggung-jawab
Kota Administrasi Jakarta Timur				
1	Jl. Jatinegara Barat	Penutupan *U-Turn*	Telah dilaksanakan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur
		Penyesuaian Jarak *Headway* Bus Transjakarta	Telah dilaksanakan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur
2	Jl. Jendral Basuki Rahmat (depan Mall Basura)	Merelokasi parkir di depan Mall Basura	Telah dilaksanakan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur
3	Jl. Laksamana Malahayati (simpang TL Pondok Bambu Batas)	Pemberlakuan belok kiri langsung	Telah dilaksanakan.	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur
4	Jl. Raya Bekasi (Simpang TL Radjiman)	Telah dilakukan MRLL *contra flow*	Telah dilaksanakan *contra flow* mulai pukul 06.00 s.d 09.30 dari *U-Turn* Bizpark sampai dengan *U-Turn* Krama Yudha pada Maret 2022	
5	Jl. Raya TB Simatupang (simpang TL Condet)	Pengaturan Simpang untuk aksesibilitas RS dan mobilitas TNI dari Kawasan Kopassus	Telah dilaksanakan pengaturan buka/tutup pada pukul 06.00-09.00 dam 16.00-19.00 sejak akhir tahun 2021	
Kota Administrasi Jakarta Utara				
6	Jl. Yos Sudarso (Gerbang Tol Sunter)	Penutupan *U-Turn* utara-utara	Telah dilaksanakan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara
7	Jl. Pegangsaan Dua (Pintu 1)	Akan dilakukan pengaturan lalu lintas Sistem Satu Arah	Telah dilaksanakan.	
8	Simpang Jl. Danau Sunter Selatan-Jl. Danau Sunter	Normalisasi Jumlah Lajur Pendekat Kaki	Telah dilaksanakan.	

No	Titik Kemacetan	Upaya Penanganan	Implementasi	Penanggung-jawab
	Barat (TL Jubilee)	Selatan (Jl. HBR. Motik)		
9	Jl. Danau Sunter Selatan (TL Karya Beton)	Akan dilakukan pemasangan *barrier* beton di lokasi untuk menutup pergerakan kendaraan dari *Batching Plant* Karya Beton yang memotong arus lalu lintas saat mendekati simpang	Telah dilaksanakan.	
10	Jl. Danau Sunter Utara (Putaran depan Shell Jalan Agung Karya)	Dilakukan pengaturan lalu lintas	Telah dilaksanakan.	
11	Jl. Yos Sudarso (putaran depan Artha Gading)	Dilakukan pengaturan lalu lintas	Telah dilaksanakan.	
Kota Administrasi Jakarta Selatan				
12	Jalan KH Abdullah Syafei (*Ramp* Naik *Fly Over* Stasiun Tebet Arah Timur - Barat)	Penerapan *Contra Flow*	Telah dilaksanakan. Saat ini dilakukan penempatan petugas dan kanalisasi menggunakan *traffic cone* pada *ramp* naik *fly over* stasiun Tebet sisi Timur.	
13	Jalan Lenteng Agung Raya (St. Lenteng Agung)	Pemasangan Pagar	Telah dilaksanakan penertiban (rutin) angkot yang ngetem yang menghambat arus lalu lintas.	
Kota Administrasi Jakarta Barat				
14	Jl. Daan Mogot (Simpang TL Cengkareng)	Penutupan Jl. Ring Road sisi Utara pada Simpang Cengkareng menggunakan MCB	Telah dilakukan penutupan sisi Utara, lalu lintas arah Jalan Kamal dari Rawa Buaya berputar di depan *U-Turn* Komplek Imigrasi	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Pusat				
15	Jl. Soeprapto (TL Galur dan *Underpass* Senen)	Pengaturan lalu lintas untuk Bus Transjakarta yang melintas	Telah terlaksana oleh Satpelhub Johar Baru	Suku Dinas Perhubungan Kota

No	Titik Kemacetan	Upaya Penanganan	Implementasi	Penanggung-jawab
16	Salemba Raya	penutupan *U-Turn* secara berkala (Pukul 07.00 - 10.00)	Telah terlaksana oleh Satpelhub Senen	Administrasi Jakarta Pusat
17	Jalan K.H Mas Mansyur		Telah dilaksanakan	

Gambar 3. 5 Infografis Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta



IV. Pengaturan Ulang Fase dan Waktu Siklus Lampu Lalu Lintas

Terhadap Pengaturan Ulang Fase dan Waktu Siklus Lampu Lalu Lintas di 21 (dua puluh satu) titik lokasi Wilayah DKI Jakarta *progress* sampai saat ini sebesar 100% telah terlaksana secara keseluruhan.

Tabel 3. 14 Pengaturan Ulang Fase dan Waktu Siklus Lampu Lalu Lintas

No	Kecamatan	Titik Kemacetan	Implementasi	Penanggung-jawab
Kota Administrasi Jakarta Timur				
1	Jatinegara	Jl. DI Panjaitan – Jl. Laksamana Malahayati (Simpang TL Cawang Baru)	Proses penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
2	Duren Sawit	Jl. Laksamana Malahayati (simpang TL Pondok Bambu Batas)	Telah dilakukan penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
3		Jl. I Gusti Ngurah Rai (Simpang TL Buaran)	Proses penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
4	Kramat Jati	Jl. Raya Bogor (Simpang TL Hek)	Proses penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
5		Jalan Dewi Sartika (TL. Jambul)	Telah dilakukan penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
6	Pulogadung	Jl. Perintis Kemerdekaan Simpang Jl. Kayu Putih Raya	Proses penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
7	Cakung	JL. Raya Bekasi (Simpang TL Radjiman)	Proses penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
8	Pasar Rebo	JL. Raya TB Simatupang (simpang TL Condet)	Proses penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
Kota Administrasi Jakarta Utara				
9	Kecamatan Tanjung Priok	Simpang Jl. Danau Sunter Selatan-Jl. Danau Sunter Barat (TL Jubilee)	Proses pengaturan Ulang Fase Lampu Lalu Lintas	UP SPLL
10		Jl. Danau Sunter Utara (Putaran depan Shell Jl.Agung Karya)	Akan dikaji untuk penutupan putaran atau pemasangan lampu lalu lintas	UP SPLL
11	Penjaringan	Simpang Jl. Pakin-Jl. Gedong Panjang (TL Pakin)	Telah dilakukan pengaturan ulang waktu siklus lampu lalu lintas	UP SPLL
12		Simpang Jl. Jembatan 3 Raya-Jl. Pluit Selatan Raya (TL. Emporium)	Proses pengaturan ulang waktu siklus lampu lalu lintas	UP SPLL
Kota Administrasi Jakarta Selatan				
13	Setiabudi	Jalan Prof Dr Satrio	Sedang dilakukan evaluasi *Pelican Crossing*/Sistem paralel menyala bersamaan hijau/merah	UP SPLL
14	Mampang Prapatan	TL Basmart	Proses penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL

No	Kecamatan	Titik Kemacetan	Implementasi	Penanggung-jawab
15	Kebayoran Baru	TL Santa	Pengaturan APILL	UP SPLL
Kota Administrasi Jakarta Barat				
16	Cengkareng	Jl. Daan Mogot (Simpang TL Cengkareng)	Proses penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
17	Grogol Petamburan	Jl. Daan Mogot (Simpang TL Grogol)	Proses penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
18		Jl. Tomang Mandala	Proses penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
19	Kebon Jeruk	Jl. Panjang (Simpang TL. Kedoya Pesing	Telah dilakukan penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
Kota Administrasi Jakarta Pusat				
20	Johar Baru	Jl. Soeprapto (TL Galur dan *Underpass* Senen)	Proses penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
21	Senen	Jl. Salemba Raya	Telah dilakukan penyesuaian Waktu Siklus APILL	UP SPLL
			Telah dilakukan penyesuaian Waktu Siklus APILL di bawah *Flyover* Pramuka	UP SPLL

Gambar 3. 6 Infografis Pengaturan Ulang Fase dan Waktu Siklus Lampu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta



V. Peningkatan Layanan Lampu Lalu Lintas (dari Otonom/ATCS menjadi ITCS)

Telah dilaksanakan peningkatan sistem kerja lampu lalu lintas ITCS *Traffic Light* (*Intelligent Traffic Control System*) di 40 (empat puluh) titik persimpangan wilayah DKI Jakarta yaitu sistem manajemen lalu lintas cerdas yang menerapkan teknologi komputasi, komunikasi, informasi dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligent*) untuk monitoring dan pengaturan lalu lintas simpang secara *real-time* (waktu nyata).

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligent*) yang diterapkan meliputi:

- *Recognition system* meliputi deteksi dan pengenalan jenis kendaraan, plat nomor kendaraan, dan pelanggaran lalu lintas;
- *Predictive system* yang mampu memprediksi volume lalu lintas dan waktu hijau maksimum yang optimal.

Berikut 40 titik lokasi peningkatan lampu lalu lintas:

Tabel 3. 15 Titik lokasi peningkatan lampu lalu lintas

No	Nama Simpang	Wilayah	Sistem Kerja Simpang		Maps Simpang
			Semula	Menjadi	
1	TL. Jembatan 5	Jakarta Barat	Otonom	ITCS	
2	TL. Grogol	Jakarta Barat	ATCS	ITCS	
3	TL. Jembatan II	Jakarta Barat	ATCS	ITCS	
4	TL. Slipi	Jakarta Barat	ATCS	ITCS	
5	TL. Tomang	Jakarta Barat	ATCS	ITCS	

No	Nama Simpang	Wilayah	Sistem Kerja Simpang		Maps Simpang
			Semula	Menjadi	
6	TL. MBAL	Jakarta Pusat	ATCS	ITCS	
7	TL. Wahidin	Jakarta Pusat	ATCS	ITCS	
8	TL. Pintu Besi	Jakarta Pusat	ATCS	ITCS	
9	TL. Kartini	Jakarta Pusat	ATCS	ITCS	
10	TL. Pangeran Jayakarta	Jakarta Pusat	ATCS	ITCS	
11	TL. Senen	Jakarta Pusat	ATCS	ITCS	

No	Nama Simpang	Wilayah	Sistem Kerja Simpang		Maps Simpang
			Semula	Menjadi	
12	TL. Kuningan	Jakarta Selatan	ATCS	ITCS	
13	TL. Pancoran	Jakarta Selatan	ATCS	ITCS	
14	TL. Rawamangun Golf	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	
15	TL. H. Ten	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	
16	TL. Trikora	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	
17	TL. Cawang UKI	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	

No	Nama Simpang	Wilayah	Sistem Kerja Simpang		Maps Simpang
			Semula	Menjadi	
18	TL. Pemuda	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	
19	TL. Coca Cola	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	
20	TL. Mangga Dua	Jakarta Utara	ATCS	ITCS	
21	TL. Pos pengumben	Jakarta Pusat	ATCS	ITCS	
22	TL. Amir Hamzah	Jakarta Barat	ATCS	ITCS	
23	TL. Cengkareng	Jakarta Barat	ATCS	ITCS	

No	Nama Simpang	Wilayah	Sistem Kerja Simpang		Maps Simpang
			Semula	Menjadi	
24	TL. Jembatan 3	Jakarta Barat	ATCS	ITCS	
25	TL. Pluit Junction	Jakarta Barat	ATCS	ITCS	
26	TL. Enggano	Jakarta Utara	ATCS	ITCS	
27	TL. Perintis Kelapa Gading	Jakarta Utara	ATCS	ITCS	
28	TL. Otista 3	Jakarta Timur	Otonom	ITCS	
29	TL. Otista 2	Jakarta Timur	Otonom	ITCS	

No	Nama Simpang	Wilayah	Sistem Kerja Simpang		Maps Simpang
			Semula	Menjadi	
30	TL. Otista 1	Jakarta Timur	Otonom	ITCS	
31	TL. Perdatam	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	
32	TL. Duren Tiga	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	
33	TL. Bulak Rantai	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	
34	TL. MCD Raden Inten	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	
35	TL. Hek	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	

No	Nama Simpang	Wilayah	Sistem Kerja Simpang		Maps Simpang
			Semula	Menjadi	
36	TL. PGC	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	
37	TL. Makam Kalibata	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	
38	TL. Cawang Kompor	Jakarta Timur	Otonom	ITCS	
39	TL. RS. Fatmawati	Jakarta Timur	ATCS	ITCS	
40	TL. Kartini Pondok Indah	Jakarta Selatan	ATCS	ITCS	

VI. Perbaikan Geometrik dan Ruas Jalan

Terhadap Perbaikan Geometrik dan Ruas Jalan di 7 (tujuh) titik lokasi Wilayah DKI Jakarta sampai dengan saat ini telah terlaksana 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Perbaikan Geometrik dan Ruas Jalan

No	Kecamatan	Titik Kemacetan	Upaya Penanganan	Penanggung-jawab
Kota Administrasi Jakarta Timur				
1	Jatinegara	Jl Jatinegara Barat	Perubahan Geometrik Pulau Lalu Lintas (Telah Dilaksanakan) Pembongkaran MCB (Telah Dilaksanakan)	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur
Kota Administrasi Jakarta Utara				
2	Cilincing	Jl. Akses Marunda (Jembatan Cakung Drainase)	Perbaikan pagar jembatan oleh Dinas Bina Marga (Telah dilaksanakan)	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara
Kota Administrasi Jakarta Selatan				
3	Pasar Minggu	U - Turn Brimob	Usulan Percepatan Penyelesaian Missinglink / Jalan Tembus Volvo (Telah dilaksanakan)	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
4	Pancoran	U - Turn Pomad	Pelebaran Jembatan (Telah dilaksanakan)	
5	Kebayoran Baru	TL Santa	Pemasangan Separator (Telah dilaksanakan) Perbaikan geometrik oleh DBM (Telah dilaksanakan)	
Kota Administrasi Jakarta Barat				
6	Kebon Jeruk	Jl. Panjang (Simpang TL Kedoya Pesing)	Evaluasi Jalur Pejalan Kaki (Telah dilaksanakan)	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
Kota Administrasi Jakarta Pusat				
7	Johar Baru	Jl. Soeprapto (TL Galur dan Underpass Senen)	Pelebaran *Underpass* (Telah dilaksanakan) pengangkatan MCB beton (Telah dilaksanakan)	

VII. Penertiban Parkir, Pedagang Kaki Lima, dan Angkutan Kota

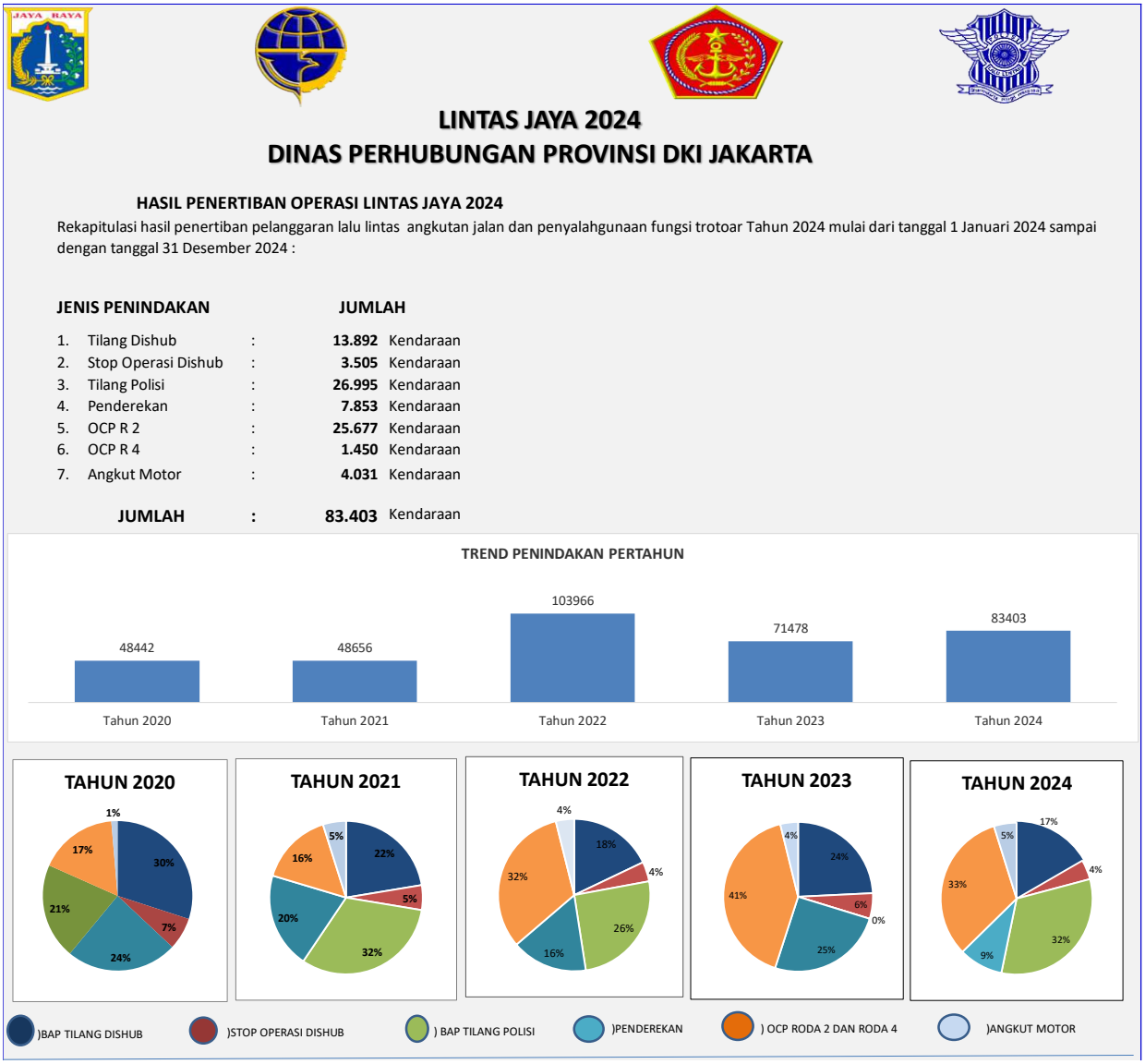
Terhadap Penertiban Parkir, Pedagang Kaki Lima, dan Angkutan Kota di 4 (empat) titik lokasi Wilayah DKI Jakarta sudah terlaksana 100% secara keseluruhan.

Tabel 3. 17 Penertiban Parkir, Pedagang Kaki Lima, dan Angkutan Kota (dalops gakum)

No	Kecamatan	Titik Kemacetan	Implementasi	Penanggung-jawab
Kota Administrasi Jakarta Selatan				
1	Kebayoran Lama	Pasar Cipulir	Telah dilakukan penertiban parkir liar secara rutin oleh tim Lintas Jaya	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2	Jagakarsa	Jalan Lenteng Agung Raya (St. Lenteng Agung)	Telah dilakukan penertiban parkir liar secara rutin oleh tim Lintas Jaya	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kota Administrasi Jakarta Pusat				
3	Kemayoran	Jl. Kalibaru Barat dan Jl. Kalibaru Timur (Pasar Nangka)	Sudah Terlaksana Telah dilakukan penertiban parkir liar oleh Dishub Telah dilakukan penertiban PKL oleh Satpol PP	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kota Administrasi Jakarta Timur				
4	Jatinegara	JL. Jendral Basuki Rahmat (depan Mall Basura)	Sudah Terlaksana	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur

Secara keseluruhan sepanjang Tahun 2024 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuan agar kapasitas jalan kembali optimal, tidak terganggu oleh hambatan samping seperti parkir liar, pedagang kaki lima, angkutan kota yang berhenti sembarangan tidak pada tempat dan waktu yang seharusnya termasuk terminal bayangan. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan penindakan terhadap 83.403 pelanggar kendaraan. Angka ini lebih besar dari tahun 2023 yang mencapai 71.478 pelanggar kendaraan.

Gambar 3. 7 Penertiban Operasi Lintas Jaya Tahun 2024



VIII. Peluncuran Dan Pengoperasian Armada Baru Bus Listrik Transjakarta

Target B12 Pengoperasian Bus Listrik sebanyak 200 (dua ratus) Unit *High Deck* oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta telah terpenuhi.

Tabel 3. 18 Target Pengoperasian Bus Listrik Unit *High Deck*

Operator	Jumlah	Rencana Operasional	
		Waktu operasi	Rute
Perum Damri	90 Unit		Koridor

		31 Desember 2024	2, 4, 12
PT Bianglala Metropolitan	90 Unit		Koridor 6, 6A, 6B, 6V, 8
PT Sinar Jaya Megahlanggeng	90 Unit		Koridor 10 dan 14

Untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, lancar dan terintegrasi, PT Transportasi Jakarta menetapkan beberapa target strategis. Diantaranya adalah tercapainya target 60% perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum dan kecepatan rata-rata jaringan jalan minimum 35 km/jam untuk transportasi jalan serta pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 50% pada Tahun 2030 dan Nol emisi (*net zero emission*) pada 2025. Selain itu, percepatan elektrifikasi layanan Transjakarta juga menjadi prioritas, dengan target elektrifikasi 50% pada 2027 dan 100% pada 2030 sesuai Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1053 Tahun 2022 Pedoman Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Layanan Angkutan Transjakarta.

Pada Tahun 2023 100 unit bus Listrik jenis *Low Entry* telah beroperasi pada 8 (delapan) rute layanan non BRT sebagai berikut:

1) Pondok Labu-Blok M
2) 1P Senen – Pondok Labu
3) 4B Stasiun Manggarai-UI
4) 4C Pemuda Merdeka-Bundaran Senayan
5) 4F Pinang Ranti-Pulo Gadung
6) 6D Stasiun Tebet-Bundaran Senayan
7) 7A (Kampung Rambutan-Lebak Bulus
8) D21 Universitas Indonesia-Lebak Bulus

Pada tanggal 10 Desember 2024 telah diluncurkan sebanyak 200 unit bus listrik jenis *High Deck* yang dioperasikan pada 10 (sepuluh) rute layanan BRT sebagai berikut:

1) Koridor 2 Pulo Gadung - Monumen Nasional
2) Koridor 4 Pulo Gadung – Galunggung
3) Koridor 8 Lebak Bulus – Juanda
4) Koridor 10 PGC - Tanjung Priok
5) Koridor 12 Pluit - Tanjung Priok
6) Koridor 14 Senen – JIS
7) Koridor 6 Ragunan – Galunggung
8) Rute 6A Ragunan - Balai Kota via Kuningan
9) Rute 6B Ragunan - Balai Kota via Semanggi
10) Rute 6V Ragunan - Senayan Bank DKI

Gambar 3. 8 Peluncuran Bus Listrik Transjakarta



Terdapat 4 (empat) operator yang saat ini memiliki total 300 unit bus listrik, yaitu:

1) Perum Damri : 26 unit *low entry* 90 unit *high deck*
2) PT Sinar Jaya Megahlanggeng : 20 unit *high deck*
3) PT Bianglala Metropolitan : 22 unit *low entry* 90 unit *high deck*
4) PT Mayasari Bakti : 52 unit *low entry*

Momentum bersejarah tercipta dengan peluncuran bus listrik pertama yang beroperasi di koridor BRT, melalui 20 (dua puluh) unit bus Listrik dari Sinar Jaya menjadi penanda terintegrasinya Operator Sinar Jaya ke dalam sistem layanan Transjakarta. Unit bus listrik bermerek BYD ini juga menjadi bus listrik Transjakarta pertama yang dirakit di Indonesia oleh karoseri lokal yaitu CV Laksana. Sebagai langkah lanjutan, pada tahun 2025 direncanakan penambahan 195 unit bus listrik *High Deck* untuk mendukung transformasi transportasi yang lebih ramah lingkungan.

3.2.2 Jumlah Titik Integrasi Antar Moda

Tabel 3. 19 Jumlah Titik Integrasi Antar Moda

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses, dan Integrasi Transportasi	Jumlah titik integrasi antar moda. Titik lokasi integrasi antar moda transportasi umum berbasis Jalan dengan transportasi umum berbasis rel dan/atau transportasi umum berbasis perairan	Titik lokasi	26	37

a. Jumlah Titik Integrasi antarmoda merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai tujuan Terwujudnya Transportasi Terintegrasi dan Berkelanjutan dan sasaran untuk Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses, dan Integrasi Transportasi sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, yang juga merupakan salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
b. Ukuran ketercapaian titik integrasi adalah jumlah titik lokasi integrasi antarmoda transportasi umum berbasis jalan dengan transportasi umum berbasis rel dan/atau transportasi umum berbasis perairan;
c. Target capaian Jumlah Titik Integrasi Antarmoda pada Tahun 2024 adalah 26 (dua puluh enam) titik;
d. Pada tahun 2024 realisasi jumlah integrasi antarmoda yaitu 37 (tiga puluh tujuh) titik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Rincian Capaian Jumlah Titik Integrasi Antar Moda

No.	Nama Stasiun	Tahun Pelaksanaan	Total Kebutuhan Pembiayaan Penataan Kawasan Stasiun	Realisasi Pemasangan Rambu Petunjuk	Persentase Realisasi Pemasangan Rambu Petunjuk terhadap Rencana Penataan Kawasan Stasiun	Keterangan
1	Stasiun MRT Lebak Bulus	2020-2024				Implementasi oleh Pengelola Kawasan
2	Stasiun MRT Fatmawati					Implementasi oleh Pengelola Kawasan
3	Stasiun MRT Blok M – Sisingamangaraja			Rp66.639.960,00		Dukungan Pemprov untuk KBT
4	Stasiun MRT Istora – Senayan			Rp83.299.950,00		Dukungan Pemprov untuk KBT

No.	Nama Stasiun	Tahun Pelaksanaan	Total Kebutuhan Pembiayaan Penataan Kawasan Stasiun	Realisasi Pemasangan Rambu Petunjuk	Persentase Realisasi Pemasangan Rambu Petunjuk terhadap Rencana Penataan Kawasan Stasiun	Keterangan
5	Stasiun MRT Dukuh Atas – LRT Dukuh Atas			Rp16.025.333,94		Dukungan Pemprov untuk KBT
6	Stasiun KRL Tanah Abang	2020				Dikerjakan secara bersama-sama oleh para SKPD terkait menggunakan APBD
7	Stasiun KRL Pasar Senen	2020				
8	Stasiun KRL Sudirman	2020				
9	Stasiun KRL Juanda	2020				
10	Stasiun KRL Tebet	2021	Rp33.915.420.000			
11	Stasiun KRL Palmerah	2021	Rp17.993.576.000			
12	Stasiun KRL Manggarai	2021	Rp23.470.048.800			

No.	Nama Stasiun	Tahun Pelaksanaan	Total Kebutuhan Pembiayaan Penataan Kawasan Stasiun	Realisasi Pemasangan Rambu Petunjuk	Persentase Realisasi Pemasangan Rambu Petunjuk terhadap Rencana Penataan Kawasan Stasiun	Keterangan
13	Stasiun KRL Gondangdia	2021	Rp50.993.202.955			
14	Stasiun KRL Jakarta Kota	2022	Rp57.146.928.905			
15	Stasiun KRL Cawang – LRT Cikoko	2021-2022				Implementasi oleh TransJakarta
16	Stasiun KRL Jatinegara 2					
17	Stasiun KRL Matraman					
18	Stasiun KRL Pasar Minggu	2022	Rp21.281.587.272	Rp24.881.438,48	0,12%	

No.	Nama Stasiun	Tahun Pelaksanaan	Total Kebutuhan Pembiayaan Penataan Kawasan Stasiun	Realisasi Pemasangan Rambu Petunjuk	Persentase Realisasi Pemasangan Rambu Petunjuk terhadap Rencana Penataan Kawasan Stasiun	Keterangan
19	Stasiun KRL Duren Kalibata		Rp41.182.857.277	Rp10.049.002,67	0,02%	
20	Stasiun KRL Klender		Rp15.931.752.654	Rp20.009.657,56	0,13%	
21	Stasiun KRL Cikini		Rp17.835.657.963	Rp19.375.001,50	0,11%	
22	Stasiun KRL Kebayoran	2023	Rp23.651.988.156	Rp32.685.323,94	0,14%	
23	Stasiun KRL Tanjung Barat		Rp79.067.560.614	Rp28.050.355,07	0,04%	
24	Stasiun KRL Lenteng Agung		Rp192.679.216.698	Rp23.257.850,89	0,01%	
25	Stasiun KRL Sawah Besar		Rp30.031.768.593	Rp6.569.321,26	0,02%	
26	Stasiun LRT Setiabudi	2023		Rp83.299.950,00		

No.	Nama Stasiun	Tahun Pelaksanaan	Total Kebutuhan Pembiayaan Penataan Kawasan Stasiun	Realisasi Pemasangan Rambu Petunjuk	Persentase Realisasi Pemasangan Rambu Petunjuk terhadap Rencana Penataan Kawasan Stasiun	Keterangan
27	Stasiun LRT Rasuna Said			Rp33.319.980,00		Dukungan Pemprov untuk LRT Jabodebek
28	Stasiun LRT Kuningan			Rp49.979.970,00		
29	Stasiun LRT Pancoran			Rp66.639.960,00		
30	Stasiun LRT Ciliwung			Rp49.979.970,00		
31	Stasiun LRT Taman Mini			Rp16.659.990,00		
32	Stasiun LRT Kampung Rambutan			Rp37.654,350,00		
33	Stasiun KRL Duri	2024	Rp33.140.647.296	Rp2.537.873,76	0,01%	
34	Stasiun KRL Jayakarta		Rp11.527.958.216	Rp6.242.701,11	0,05%	

No.	Nama Stasiun	Tahun Pelaksanaan	Total Kebutuhan Pembiayaan Penataan Kawasan Stasiun	Realisasi Pemasangan Rambu Petunjuk	Persentase Realisasi Pemasangan Rambu Petunjuk terhadap Rencana Penataan Kawasan Stasiun	Keterangan
35	Stasiun KRL Klender Baru		Rp50.750.828.080	Rp81.741.694,58	0,16%	
36	Stasiun KRL Kalideres		Rp14.232.846.436	Rp5.075.747,53	0,04%	
37	Stasiun KRL Cakung		Rp8.860.366.708	Rp4.974.273,30	0,06%	

Kawasan Berorientasi Transit sebanyak (5 titik):

Telah dilaksanakan program Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (KBT/TOD) pada 5 (lima) lokasi MRT N-S (Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M-Sisingamangaraja, Istora Senayan, dan Dukuh Atas) yang sampai dengan saat ini masih berjalan dan diperkirakan akan memakan waktu yang panjang (sampai dengan 20 tahun), namun secara titik integrasi pada kawasan ini telah berhasil diintegrasikan dengan angkutan massal berbasis jalan (BRT).

Kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mengintegrasikan sarana transportasi sebanyak (2 titik):

- Simpang Temu CSW (Integrasi antara Stasiun MRT ASEAN dengan Transjakarta Koridor 1 dan Koridor 13);
- *Skywalk* Kebayoran (Integrasi antara Stasiun KRL Kebayoran dengan Transjakarta Koridor 13 dan Koridor 1 yang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga).

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2024 Percepatan Penanganan Kemacetan dengan kriteria keberhasilan berupa Peningkatan Sistem Informasi Penunjuk Arah dan Fasilitas Penunjang Lainnya pada Simpul Transportasi Terintegrasi

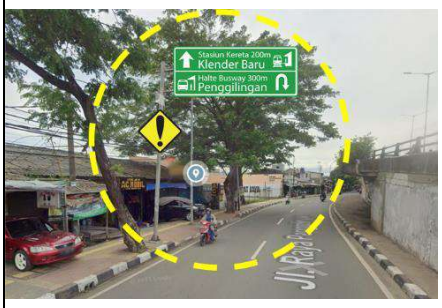
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Peningkatan Sistem Informasi Penunjuk Arah dan Fasilitas Penunjang Lainnya pada Simpul Transportasi Terintegrasi berupa pemasangan 13 (tiga belas) rambu petunjuk pada Kawasan Stasiun Tahap 6 (enam) yaitu 1 (satu) titik di Stasiun Duri, 2 (dua) titik di Stasiun Jayakarta, 6 (enam) titik di Stasiun Klender Baru, 2 (dua) titik di dan Stasiun Kalideres, dan 2 (dua) titik di Stasiun Cakung (dokumentasi terlampir).

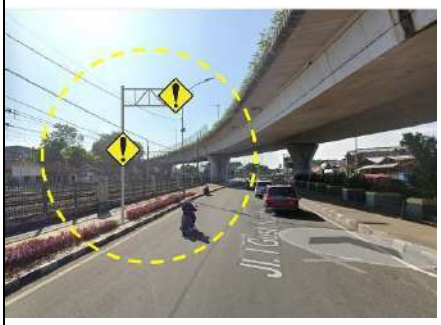
Sehingga, akumulasi Capaian Jumlah Titik Integrasi Antarmoda pada Tahun 2024 telah sesuai dengan target Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu 37 (tiga puluh tujuh) titik dari target 26 (dua puluh enam) titik.

Tabel 3. 21 Peningkatan Sistem Informasi Penunjuk Arah dan Fasilitas Penunjang Lainnya pada Simpul Transportasi Terintegrasi

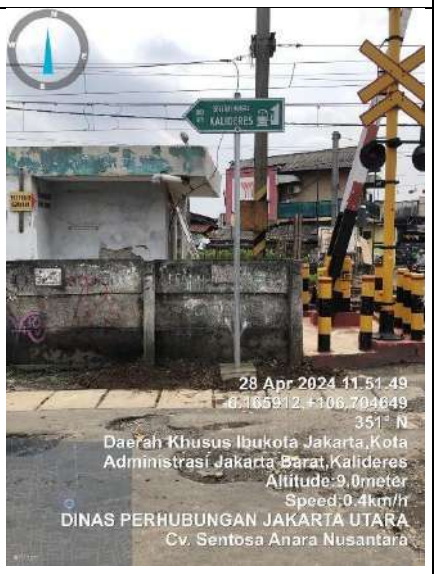
No	Nama Stasiun	Usulan Rambu Petunjuk	Dokumentasi Pemasangan Rambu Petunjuk
1	Stasiun Duri		
2	Stasiun Jayakarta		 Pemasangan rambu bergeser ke sisi KAI karena terdapat saluran sehingga tidak bisa dipasang pondasi.

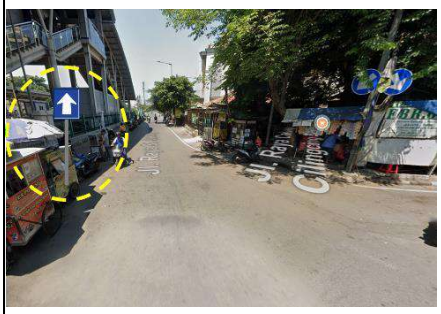
No	Nama Stasiun	Usulan Rambu Petunjuk	Dokumentasi Pemasangan Rambu Petunjuk
3	Stasiun Jayakarta		
4	Stasiun Klender Baru		

No	Nama Stasiun	Usulan Rambu Petunjuk	Dokumentasi Pemasangan Rambu Petunjuk
5	Stasiun Klender Baru		
6	Stasiun Klender Baru		

No	Nama Stasiun	Usulan Rambu Petunjuk	Dokumentasi Pemasangan Rambu Petunjuk
7	Stasiun Klender Baru		
8	Stasiun Klender Baru		 Telah dilakukanpemasangan rambu oleh instansi lain dan titik yang terpasang bergeser dari titik rencana.

No	Nama Stasiun	Usulan Rambu Petunjuk	Dokumentasi Pemasangan Rambu Petunjuk
9	Stasiun Klender Baru		
10	Stasiun Kalideres		

No	Nama Stasiun	Usulan Rambu Petunjuk	Dokumentasi Pemasangan Rambu Petunjuk
			
11	Stasiun Kalideres		 

No	Nama Stasiun	Usulan Rambu Petunjuk	Dokumentasi Pemasangan Rambu Petunjuk
12	Stasiun Cakung		
13	Stasiun Cakung		

3.2.3 Analisis Kepegawaian Pengampu IKU

1. Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik

Tabel 3. 22 Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik

No	Jabatan / JFU	Pendidikan	Jumlah	Transportasi Publik
1	Kepala Seksi Angkutan Orang dalam Trayek dan Terminal	Sarjana	1	Penumpang Transjakarta, Mikrotrans, dan Angkutan lainnya
2	Kepala Seksi Angkutan Orang tidak dalam Trayek	S2	1	
3	Staf Teknis Tingkat Ahli	Sarjana	2	
4	Tenaga Terampil Pendukung Administrasi Teknis	Sarjana	2	
5	Kepala Seksi Angkutan dan Keselamatan Perkeretaapian	S2	1	Penumpang MRT, LRT dan KRL
6	Staf Teknis Tingkat Terampil	Sarjana	1	
7	Staf Administrasi Tingkat Terampil	SMA	1	
8	Kepala Satuan Pelaksana UP. Angkutan Perairan	S2	1	Penumpang Angkutan Perairan
9	Tenaga PJLP	S1	1	
10	Kepala Satuan Pelaksana UP. Angkutan Sekolah	S1	1	Penumpang Bus Sekolah
12	Staf Teknis Tingkat Terampil	D3	1	
12	Tenaga PJLP	D3	1	

Unit yang mengampu IKU Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik terdiri dari Bidang Angkutan Jalan, Bidang Perkeretaapian, Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

2. Jumlah titik integrasi antar moda.

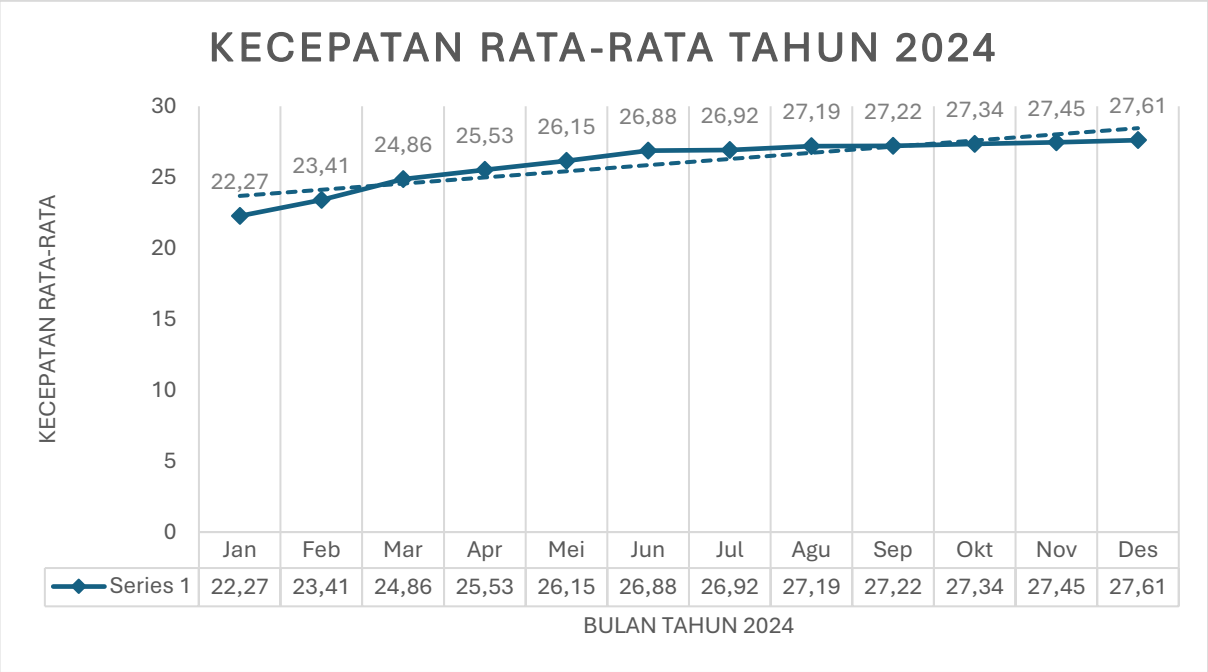
Unit yang mengampu IKU jumlah Integrasi antar moda adalah Sub Kelompok Integrasi dan Pengembangan Transportasi Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3. 23 Jumlah Titik Integrasi Antar Moda

No	Jabatan / JFU	Pendidikan	Jumlah
1	Ketua Sub Kelompok	S2 Teknik Sipil Perkeretaapian	1
2	Staf Teknis Tingkat Ahli	S1 Teknik Informatika	1
3	Staf Teknis Tingkat Terampil	S1 Administrasi Publik	1
4	Tenaga Terampil Pendukung Administrasi Teknis	S2 Teknik Sipil Transportasi	1
5	Tenaga Terampil Pendukung Administrasi Teknis	S1 Teknik Sipil	4

3.2.4 Kondisi Lalu Lintas berdasarkan Kecepatan Ruas Jalan Utama

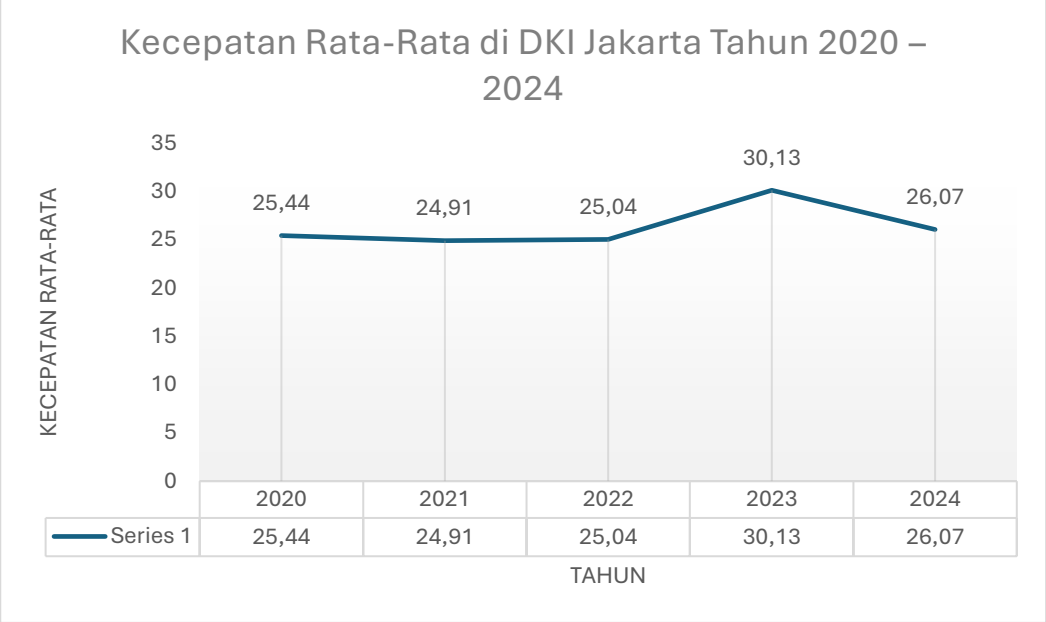
Gambar 3. 9 Data Kecepatan Tahun 2024



Tabel 3. 24 Kecepatan Rata-Rata Tahun 2024

	2024											
	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Ags**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Des**
V Kecepatan Rata-Rata (km/jam)	22,3	23,4	24,9	25,5	26,2	26,9	26,9	27,2	27,2	27,3	27,5	27,6

Gambar 3. 10 Kecepatan Rata-Rata di DKI Jakarta Tahun 2020-2024



Tabel 3. 25 Kecepatan Rata-Rata di DKI Jakarta Tahun 2020-2024

	Periode				
	2020	2021	2022	2023	2024
V Kecepatan Rata-Rata (km/jam)	25,44	24,91	25,04	30,13	26,07

Kecepatan Rata-Rata di Provinsi DKI Jakarta selama periode Tahun 2020 – 2024 memiliki trend menurun.

Dari grafik dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

1. Tingginya kecepatan rata-rata pada Tahun 2020 dikarenakan Pemerintah mengeluarkan instruksi pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus Covid-19 sehingga mobilitas masyarakat terbatas;
2. Penurunan kecepatan rata-rata pada Tahun 2021 dikarenakan peralihan mobiltas yang semula pergerakan terbatas menuju normal;
3. Pada Tahun 2022-2023 lalu lintas DKI Jakarta sudah kembali normal dan mengalami peningkatan kecepatan rata-rata;

4. Penurunan kecepatan rata-rata di Tahun 2024 diakibatkan sedang berlangsungnya pekerjaan konstruksi yang massif dan berkelanjutan sehingga berdampak pada pengurangan lebar badan jalan dan kapasitas jalan dengan total panjang jaringan jalan yang terdampak adalah sebesar 250,23 km atau 15,97 % dari total panjang arteri maupun kolektor di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:
    - Pembangunan Jalur dan Stasiun MRT segmen HI-Kota = 5,8 km;
    - Pembangunan Jalur dan Stasiun LRT Jakarta Tahap 1B (Velodrome-Manggarai) = 6,4 km;
    - Penataan Saluran Air = 1,5 km;
    - Pembangunan Sistem Distribusi Instalasi Pengolahan Air = 150,09 km;
    - Pembangunan Sistem Pengolahan Limbah (*Jakarta Sewerage Development Project*) = 76,74 km;
    - Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. (Section Harbour Road II) = 9,7 km.

Catatan: Pada Tahun 2020-2022 kecepatan rata-rata dihitung pada 41 Koridor Jalan Utama dan Pada Tahun 2023-2024 kecepatan rata-rata dihitung pada 25 Ruas Jalan dengan Penerapan Ganjil-Genap

Tabel 3. 26 Kecepatan Ruas Jalan Utama

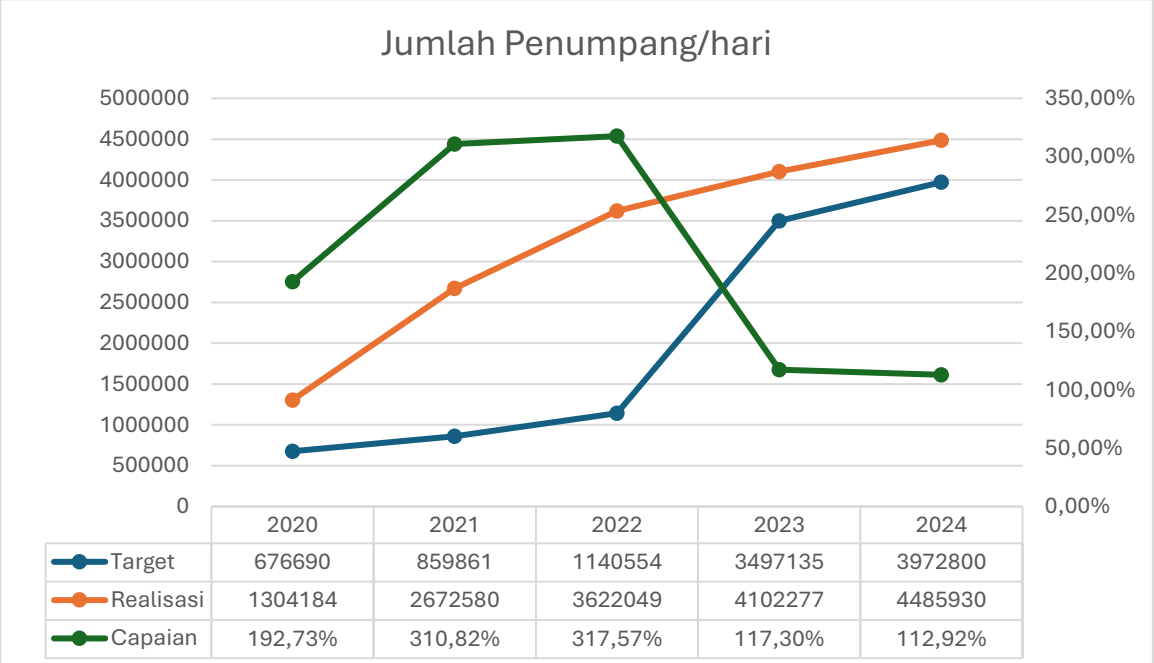
No	Lokasi	Data Kecepatan (km/jam)												Rata-Rata
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Jalan Pintu Besar Selatan	13,28	13,50	13,05	12,26	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,15	12,44
2	Jalan Gajah Mada	15,92	22,70	17,56	23,12	25,51	26,00	25,72	26,01	26,21	26,25	26,32	26,45	23,98
3	Jalan Hayam Wuruk	32,54	30,61	47,89	56,97	57,93	53,22	53,78	54,75	54,00	54,12	54,31	54,27	50,37
4	Jalan Majapahit	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
5	Jalan Medan Merdeka Barat	27,58	22,74	27,55	27,55	27,55	27,55	27,84	28,02	28,11	28,12	28,29	28,88	27,48
6	Jalan M.H. Thamrin	18,03	28,94	18,58	18,58	20,21	21,22	21,32	21,44	21,61	21,55	21,76	22,07	21,28
7	Jalan Jenderal Sudirman	21,26	22,53	22,99	22,99	23,00	24,31	23,12	23,53	23,55	24,00	24,12	24,41	23,32
8	Jalan Sisimangaraja	12,15	22,96	13,70	13,70	15,25	20,24	19,67	20,12	21,00	21,20	21,19	21,55	18,56
9	Jalan Panglima Polim	12,65	28,44	15,05	15,05	17,28	22,31	20,85	20,79	20,88	21,12	21,36	22,00	19,82
10	Jalan Fatmawati	17,25	25,80	22,77	25,80	27,00	27,64	28,12	28,22	28,31	28,41	28,77	28,80	26,41
11	Jalan Suryopranoto	18,67	22,40	17,85	17,85	17,87	18,01	18,04	18,15	18,13	18,15	18,15	18,15	18,45
12	Jalan Balikpapan	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
13	Jalan Kyai Caringin	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
14	Jalan Tomang Raya	30,98	22,09	30,00	30,00	30,00	30,00	30,73	32,01	31,91	32,00	32,05	32,09	30,32
15	Jalan Jenderal S. Parman	20,95	22,70	23,71	23,71	24,55	26,07	26,73	26,88	26,75	26,88	27,00	27,11	25,25
16	Jalan Gatot Subroto	29,29	28,94	37,25	37,25	39,26	40,21	43,22	45,21	44,79	44,87	45,03	44,31	39,97
17	Jalan M.T. Haryono	29,24	28,93	30,40	30,40	32,00	32,21	32,16	32,97	32,51	33,05	33,12	33,03	31,67
18	Jalan H.R. Rasuna Said	27,97	23,27	29,53	29,53	30,12	31,22	31,32	31,66	32,01	32,11	32,31	32,51	30,30
19	Jalan D.I. Panjaitan	39,32	25,61	37,81	37,81	38,12	37,85	38,57	38,71	38,74	38,88	38,71	38,91	37,42
20	Jalan Jenderal Ahmad Yani	38,38	22,40	42,86	42,86	41,22	41,56	42,01	42,13	42,04	42,11	42,15	42,05	40,15
21	Jalan Pramuka	25,42	21,24	31,63	31,63	30,45	32,43	32,17	31,10	31,31	31,05	31,32	31,77	30,13
22	Jalan Salemba Raya Sisi Barat dan Jalan Salemba Raya Sisi Timur	20,00	31,07	20,25	20,25	22,31	23,53	21,15	21,27	21,55	22,04	22,15	22,37	22,33
23	Jalan Kramat Raya	25,59	21,04	24,23	24,23	24,23	24,23	24,31	24,55	24,85	25,13	25,33	25,87	24,46
24	Jalan Stasiun Senen	12,88	24,73	21,19	21,19	21,38	22,46	21,52	21,77	21,97	22,02	22,14	22,61	21,32
25	Jalan Gunung Sahari	17,40	22,52	25,47	25,47	26,21	27,45	28,31	28,28	28,10	28,13	28,31	28,75	26,20
V Kecepatan Rata-Rata (km/jam)		**22,27**	**23,41**	**24,86**	**25,53**	**26,15**	**26,88**	**26,92**	**27,19**	**27,22**	**27,34**	**27,45**	**27,61**	**26,07**

Presentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa pertahun

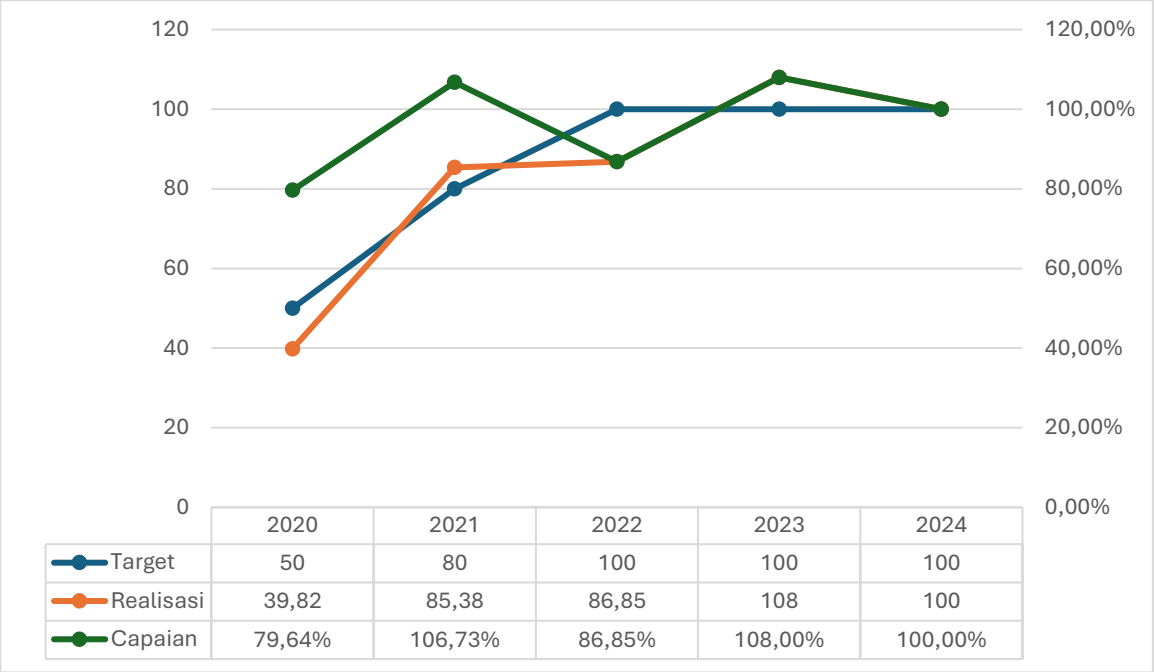
Tabel 3. 27 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dengan Angkutan Umum

No	Bulan	Kecelakaan Lalu Lintas dengan Angkutan Umum			
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Jumlah
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	0	0	6	6
5	Mei	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0
11	November	0	0	1	1
12	Desember	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	7	7

Gambar 3. 11 Jumlah Penumpang Angkutan Umum yang Terlayani Per Hari

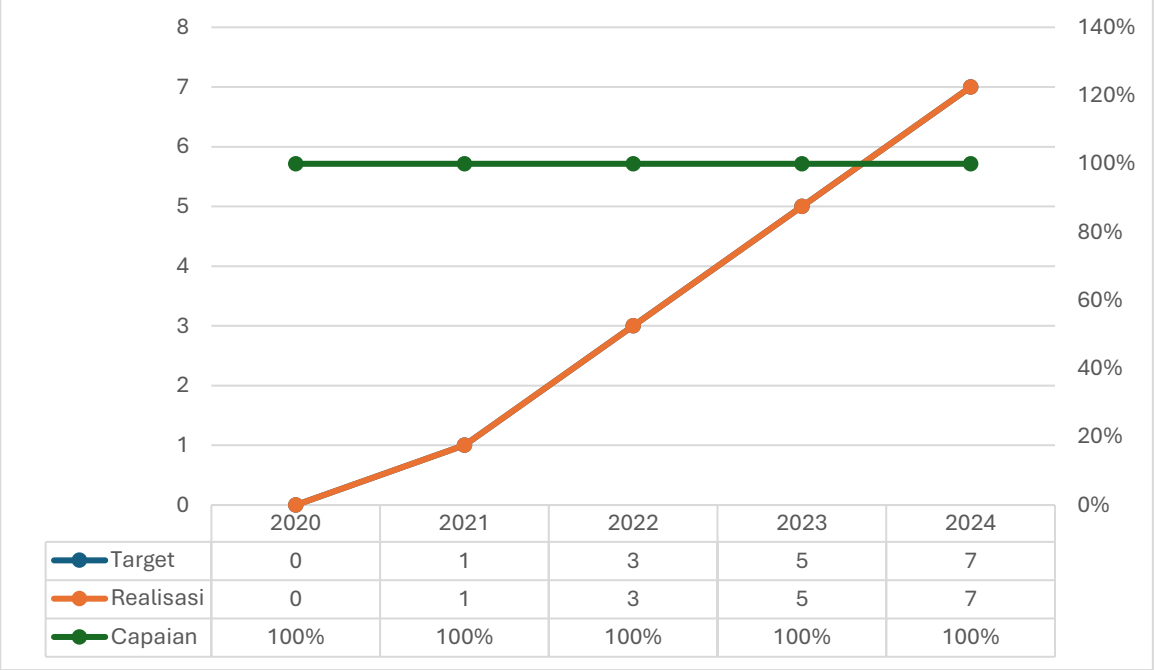


Gambar 3. 12 Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50	80	100	100	100
Realisasi	39,82	85,38	86,85	108	100
Capaian	79,64%	106,73%	86,85%	108,00%	100,00%

Gambar 3. 13 Jumlah Terminal Penumpang Angkutan Perairan (Pelabuhan) yang Memenuhi Standar Pelayanan Prima 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	1	3	5	7
Realisasi	0	1	3	5	7
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

3.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang Bersumber dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Dinas Perhubungan mengampu 7 KSD dengan 10 Sub KSD dengan masing-masing KSD terdapat rencana aksi dengan target per triwulan. Pengukuran rencana aksi KSD Dinas Perhubungan per triwulan dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.4 Indikator Kinerja Sasaran Khusus

Terdapat 13 indikator sasaran khusus yang diampu oleh Dinas Perhubungan yang memiliki target per triwulan. Pengukuran Kinerja Sasaran Khusus Dinas Perhubungan per triwulan dapat dilihat pada Lampiran 1.

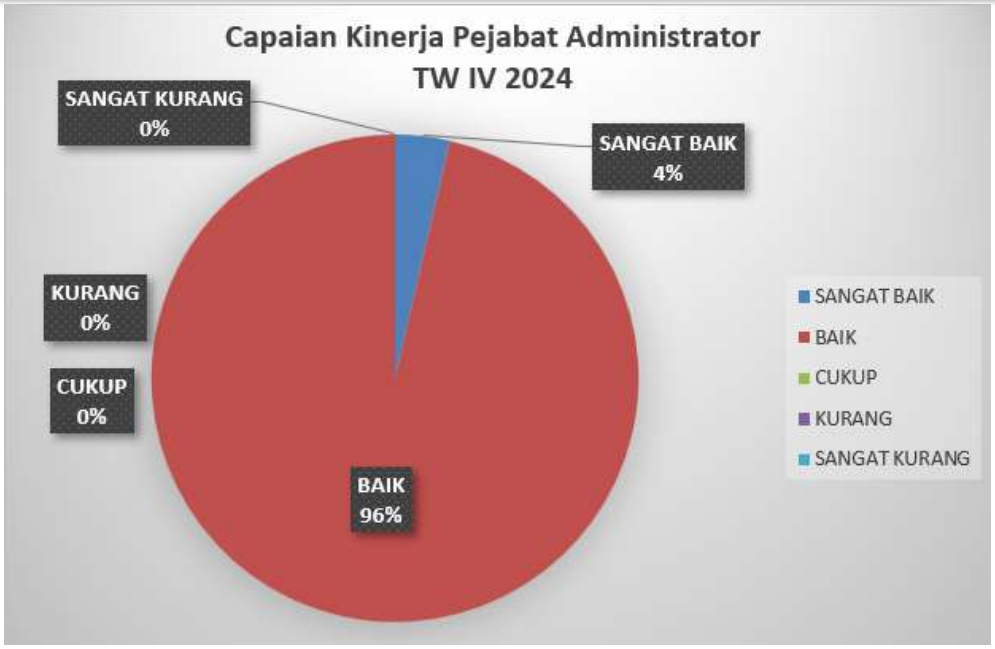
3.5 Indikator Kinerja Sasaran Operasional

Terdapat 4 indikator sasaran operasional yang diampu oleh Dinas Perhubungan yang memiliki target per triwulan, Pengukuran Kinerja Sasaran Operasional Dinas Perhubungan per triwulan dapat dilihat pada Lampiran 1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, terdapat indikator kinerja Sasaran Operasional yang belum mencapai nilai target rencana, yaitu persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK). Hal ini disebabkan karena banyak rekomendasi temuan yang terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan menumpuknya rekomendasi temuan yang harus diselesaikan sehingga menyebabkan tidak terselesaikannya pekerjaan. Tindak lanjut berikut yaitu diperlukan strategi yang lebih baik untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan.

3.6 Indikator Kinerja Pejabat Administrator Perangkat Daerah

Untuk mendukung capaian sasaran strategis Dinas Perhubungan, maka dilakukan perencanaan dan pengukuran kinerja secara berjenjang ke pejabat administrator di lingkup Dinas Perhubungan. Hasil pengukuran kinerja diambil dari sistem sakip.jakarta.go.id sebagai berikut:

Gambar 3. 14 Capaian Kinerja Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2024



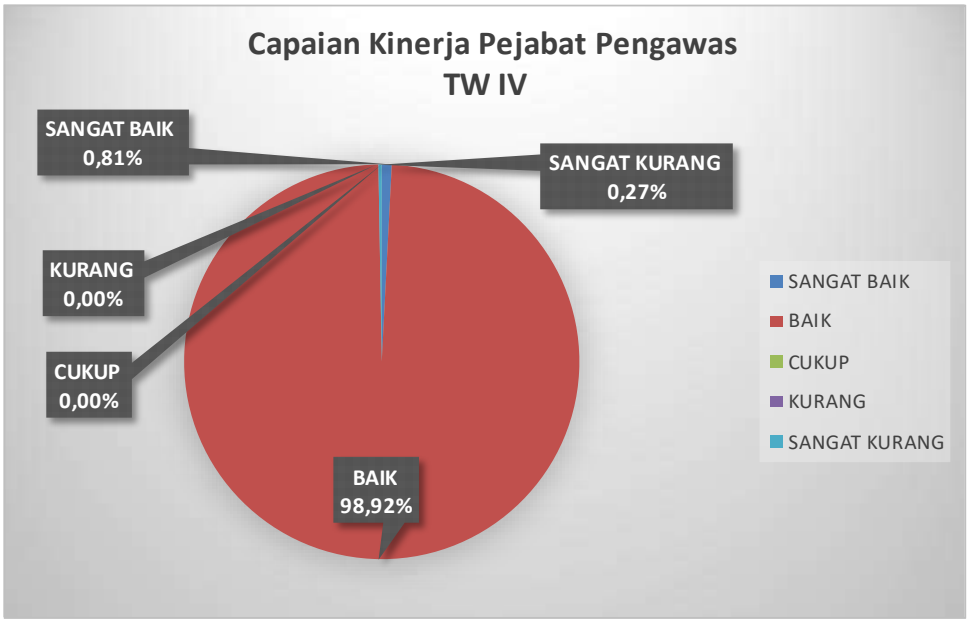
Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 dan e-SAKIP 2024, diolah

Dari Gambar 3.14 diatas, terdapat 5 (lima) kegiatan yang mendapatkan predikat sangat baik, indikator tersebut adalah indeks kepuasan terhadap pengelolaan terminal penumpang tipe A, indeks kepuasan terhadap pengujian berkala kendaraan bermotor, serta indeks kepuasan terhadap pengelolaan terminal penumpang tipe B.

3.7 Indikator Kinerja Pejabat Pengawas

Untuk mendukung capaian indikator kinerja pejabat administrator Dinas Perhubungan, maka dilakukan perencanaan dan pengukuran kinerja secara berjenjang ke pejabat pengawas di lingkup Dinas Perhubungan. Hasil pengukuran kinerja diambil dari sistem sakip.jakarta.go.id sebagai berikut:

Gambar 3. 15 Capaian Kinerja Pejabat Pengawas Triwulan IV Tahun 2024



Sumber: Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 dan e-SAKIP 2024, diolah

Dari Gambar 3.15 diatas, terdapat 1 indikator kinerja yang mendapatkan predikat sangat kurang, indikator tersebut adalah indikator tersebut adalah Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia. Hal tersebut dikarenakan sub-kegiatan tersebut diusulkan untuk dibatalkan pada APBD-P 2024.

3.9 Realisasi Anggaran

Dana yang dianggarkan dan realisasinya dalam tahun anggaran 2024 untuk mewujudkan pencapaian Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) sesuai dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 28 Realisasi Pencapaian Anggaran Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024

KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	APBDP	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Penumpang angkutan umum terlayani	3.972.800 penumpang/hari	4.485.930 penumpang/hari	6.269.558.691.719	5.705.198.220.669	91,00%
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Fatalitas kecelakaan angkutan umum	1,49 indeks	0			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata di ruas jalan dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas	27 km/jam	27,47 km/jam			
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Pelabuhan memenuhi Standar Pelayanan Prima	7 Pelabuhan	7 Pelabuhan	39.767.739.396	35.829.816.457	90,10%
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Badan Usaha Angkutan Perairan sesuai peraturan perundangan	49,52%	49,52%			

KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	APBDP	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	3.939.602.119	3.615.327.522	91,77%
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 indeks	4 indeks	856.741.629.586	812.987.434.642	94,89%
TOTAL					**7.170.007.662.820**	**6.557.630.799.290**	**91,46%**

3.10 Efisiensi Anggaran

3.10.1 Efisiensi Anggaran Berdasarkan IKU Integrasi

Pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Titik Integrasi Antar Moda pada tahun 2024 sebanyak 37 titik integrasi dari target 26 titik, sehingga pencapaian IKU tersebut sebesar 120%. Alokasi dan realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai IKU 120% tersebut adalah sebesar Rp6.718.756.739 dan sebesar Rp6.073.408.446. Untuk menghitung nilai efisiensi satu indikator utama dengan satu indikator program dengan memperhatikan nilai capaian SAKIP Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai SAKIP sebesar 85,6% dari target 82%. Sehingga capaian IKU berdasarkan SAKIP sebesar 104,39%. Nilai efisiensi akhir untuk IKU Titik Integrasi Antar Moda adalah 100%, dengan rincian yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 29 Capaian dan Nilai Efisiensi IKU Integrasi

Capaian Output Program									100,00%
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKU	Realisasi IKU	Realisasi IKU (%)	Capaian IKU	COP per Program	CP per UKE I/II
1	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses, dan Integrasi Transportasi	Jumlah titik integrasi antar moda	Predikat	82	85,6	104,39%	104,39%	104,39 %	104,39%

Efisiensi Output Program									20,00%
No	Program	Output Program	Capaian IKU	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	Hasil Capaian IKU dengan Anggaran	(AA x IKU)-RA	Efisiensi	Realisasi anggaran
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah titik integrasi antar moda. Titik lokasi integrasi antar moda transportasi umum berbasis Jalan dengan transportasi umum berbasis rel dan/atau transportasi umum berbasis perairan	120,00%	6.718.756.739	6.073.408.446	8.062.508.086	1.989.099.641	29,61%	90,39
Nilai Efisiensi									**100,00%**

3.10.2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan IKU *Modal Shared*

Pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik pada tahun 2024 sebesar 22,19% dari target 20,97% sehingga pencapaian IKU tersebut sebesar 105,82%. Untuk mencapai target dari IKU tersebut, didukung oleh 4 program utama, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Program Pengelolaan Pelayaran, Program Pengelolaan Perkeretaapian, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Alokasi dan realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai IKU 105,82% tersebut adalah sebesar Rp6.506.309.436.718 dan sebesar Rp5.922.424.118.832. Nilai efisiensi akhir untuk 1 IKU dengan 4 program adalah 86,98%, dengan rincian yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 30 Capaian dan Nilai Efisiensi IKU Modal Shared

Capaian IKU									100,00%
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKU	Realisasi IKU	Realisasi IKU (%)	Capaian IKU	Capaian IKU	CP per IKU I/II
1	Terwujudnya Transportasi Terintegrasi dan Berkelanjutan	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persentase	20,97	22,19	105,82%	105,82%	105,82%	105,82%

Efisiensi Output Program	14,79%

No	Program	Output Program	Capaian IKU	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	Hasil Capaian IKU dengan Anggaran	(AA x IKU)-RA	Efisiensi	Realisasi anggaran
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	105,82%	6.225.309.284.569	5.662.143.843.503	6.587.487.507.133	925.343.663.630		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi	105,82%	39.767.739.396	35.829.816.457	42.081.360.858	6.251.544.401		

No	Program	Output Program	Capaian IKU	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	Hasil Capaian IKU dengan Anggaran	(AA x IKU)-RA	Efisiensi	Realisasi anggaran
		Standar Pelayanan Prima							
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Penumpang Perkeretaapian. Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian provinsi	105,82%	3.939.602.119	3.615.327.522	4.168.801.670	553.474.148		
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105,82%	237.292.810.634	220.835.131.350	251.098.114.829	30.262.983.479		
				6.506.309.436.718	5.922.424.118.832	6.884.835.784.491	962.411.665.659	14,79%	96,32%
Nilai Efisiensi									**86,98%**

Dua indikator kinerja utama memiliki nilai efisiensi masing-masing adalah 105,82% dan 86,98%. Sehingga capaian efisiensi indikator kinerja utama Dinas Perhubungan adalah rataan dari nilai efisiensi kedua indikator tersebut, yaitu sebesar 96,4%.

3.11 Kegiatan Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024

Kegiatan Strategis yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Dermaga Apung di Pulau Tidung
2. Pengadaan Kapal Pelayanan Penumpang sebagai layanan transportasi perairan kepada masyarakat ke pulau-pulau di kepulauan seribu.
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) berbasis Listrik untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas, hal ini juga sebagai Upaya perbaikan kualiatas udara di DKI Jakarta.

4. Perencanaan Pekerjaan Peningkatan Standar Penyelengaraan Pelayanan (SPP) Terminal Bus Kalideres
5. Pemberian Subsidi Transjakarta, MRT, dan LRT;
6. Penyelenggaraan Mudik Gratis pada Angkutan Lebaran;
7. Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Kawasan Transit Oriented Development (TOD) dan titik integrasi;
8. Pembangunan *Intelligent Transport Control System* (ITCS).

3.11.1 Pembangunan Dermaga Apung di Pulau Tidung

Pembangunan Dermaga Apung di Pulau Tidung dilakukan sebagai bagian kegiatan Optimalisasi Pelabuhan Pulau Tidung Tahun Anggaran 2024. Dermaga ini dirancang untuk mengatasi perbedaan tinggi permukaan air laut saat pasang dan surut, dengan konstruksi fleksibel yang dapat menyesuaikan kondisi tersebut. Saat ini, dermaga apung telah selesai dibangun dan dapat digunakan untuk standar kapal, proses menaik-turunkan penumpang dengan lebih aman dan efisien.

Gambar 3. 16 Dermaga Apung di Pulau Tidung





3.11.2 Pengadaan Kapal Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Pemanfaatan Kapal Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas dan angkutan antara lain :

1. Sebagai Sarana Transportasi laut untuk mengangkut penumpang dari pelabuhan Muara Angke ke Wilayah Kepulauan Seribu
2. Memudahkan Aksesibilitas Masyarakat, terutama untuk warga Kepulauan Seribu
3. Penunjang Pelayanan Pelayaran di area wilayah kepulauan seribu
   - Memberikan pelayanan pelayaran untuk warga domestik, wisatawan maupun asing
4. Memberikan fasilitas yang memadai untuk masyarakat dengan harga yang terjangkau dan
5. Memberikan Pelayanan kepada penumpang dan memastikan keselataman selama berlayar

Pengadaan Kapal Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan untuk merespon kejadian kriminal dan kecelakaan lalu lintas perairan diantaraya adalah:

1. Terjadinya Pencurian Lampu Suar Fasiltias Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang mempengaruhi keselamatan pelayaran

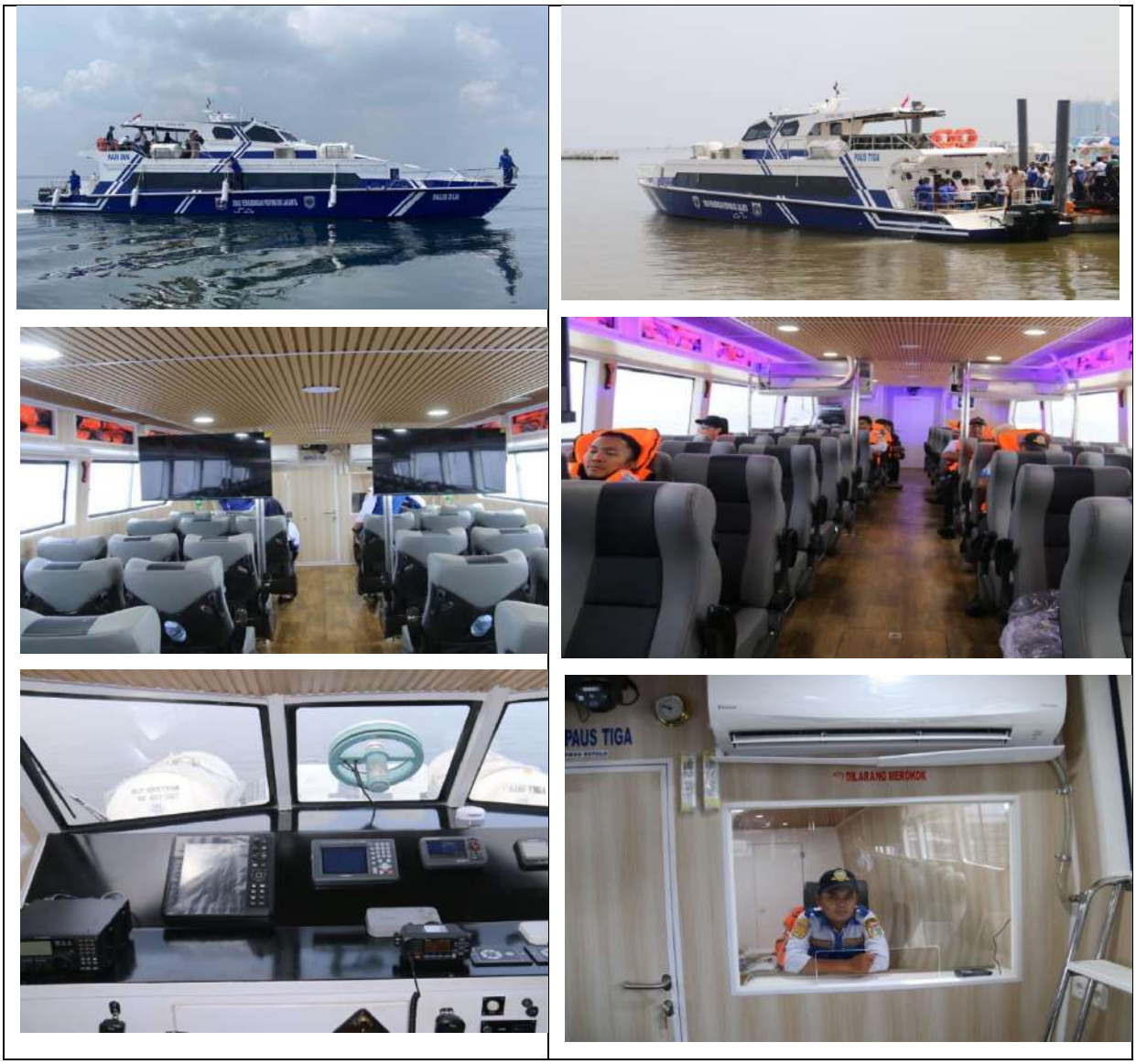
2. Terjadinya Gangguan Perompak Laut pada Kapal Nelayan
3. Terjadinya Kecelakan Laut karena kurangnya sosialisasi keselamatan pelayaran

Paradigma Jakarta menurut Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta fokus kepada pengembangan kota menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global, di mana salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah kepariwisataan. Bicara kepariwisataan Jakarta, wilayah Kepulauan Seribu sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) memiliki potensi kepariwisataan yang cukup tinggi sebab 80 persen tujuan perjalanan masyarakat menuju ke Kepulauan Seribu adalah untuk berwisata, dengan total kunjungan mencapai 1,3 juta orang selama tahun 2023 (Dishub DKI Jakarta, 2023).

Kemudahan akses (aksesibilitas) menjadi kunci dalam pengembangan sektor pariwisata, berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan berkontribusi penuh dalam mewujudkan aksesibilitas yang baik melalui penyediaan kapal pelayanan penumpang sebanyak 10 (sepuluh) unit masing-masing berkapasitas sebanyak 40 kursi, serta 1 (satu) unit berkapasitas 80 kursi. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh kapal Dinas Perhubungan berdasarkan survei persepsi terhadap penumpang adalah waktu tempuh yang cukup singkat, kondisi kapal yang aman dan nyaman, serta tarif yang terjangkau. Dari beberapa keunggulan tersebut, masyarakat mengharapkan adanya penambahan armada kapal yang berkapasitas besar.

Aspirasi masyarakat ini sejalan dengan fakta di lapangan bahwa dengan ketersediaan 11 (sebelas) unit kapal ini ternyata hanya dapat mengakomodir 6 (enam) persen dari total pergerakan penumpang ke Kepulauan Seribu yang dalam 1 (satu) tahun dapat mencapai 1,3 juta orang (Dishub DKI Jakarta, 2023). Menghadapi permintaan transportasi yang tinggi ini maka langkah konkret Dinas Perhubungan adalah melakukan pengadaan kapal pelayanan penumpang sebanyak 2 (dua) unit berkapasitas 80 kursi di Tahun Anggaran 2024, serta 2 (dua) unit kapal berkapasitas 80 kursi di Tahun Anggaran 2025.

Gambar 3. 17 Kapal Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta



3.11.3 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Listrik

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan mempunyai tugas yang salah satunya adalah “pelaksanaan pemanduan dan pengawalan pimpinan dan/atau tamu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”. dan dari 50 unit Kendaraan Dinas Operasional (KDO) khusus pemanduan dan pengawalan, 28 unit usia kendaraan sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan sudah tidak ekonomis sebagaimana di

atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas.

Untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor listrik berbasis baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2024 mengadakan 14 (empat belas) unit Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai untuk di fungsikan sebagai KDO pemanduan dan pengawalan di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi.

Gambar 3. 18 Kendaraan Dinas Operasional Listrik






DISHUB
DISHUB
DISHUB



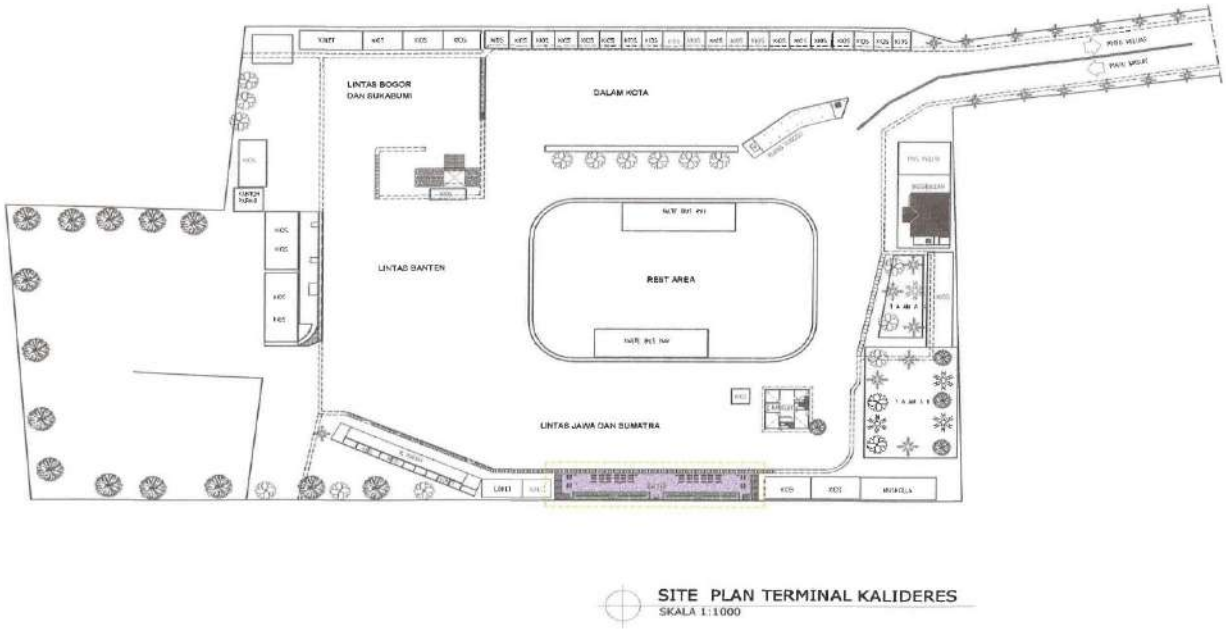

DISHUB
SHAD


10

3.11.4 Perencanaan Pekerjaan Peningkatan Standar Penyelengaraan Pelayanan (SPP) Terminal Bus Kalideres

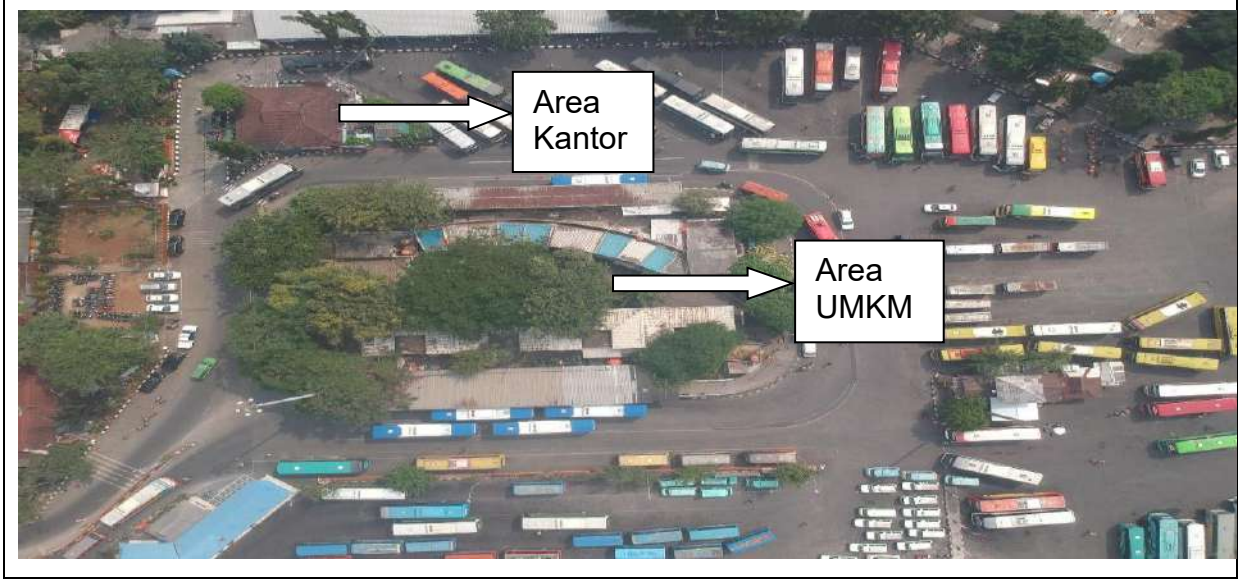
Terminal Bus Kalideres merupakan salah satu Terminal tipe A yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang melayani jurusan antar kota, dalam kota maupun simpul transportasi yang terintegrasi dengan angkutan berbasis massa. Sehubungan adanya peningkatan kegiatan aktivitas masyarakat atau pengguna Terminal Bus Kalideres, Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun Anggaran 2025 melakukan Perencanaan Pekerjaan Peningkatan Standar Penyelengaraan Pelayanan (SPP) Terminal Bus Kalideres Tahun Anggaran 2025 yang mengalokasi anggaran sebesar Rp. 6.917.633.645,- kegiatan pemeliharaan tersebut dengan program perencanaan peningkatan pembangunan area kantor dengan yang dibutuhkan adalah area ruangan rapat, ruangan Staf Tata Usaha dan Ruang Kepala Terminal Bus Kalideres serta rencana peningkatan pembangunan area UMKM yang berada di area Transjakarta.

Gambar 3. 19 Rencana Area Pekerjaan Peningkatan Standar Penyelengaraan Pelayanan (SPP) Terminal Bus Kalideres



Gambar 3. 20 Area Kantor dan Area UMKM yang Akan Dialokasikan





3.11.5 Pemberian Subsidi Transjakarta, LRT, dan MRT

a. Anggaran dan Realisasi Subsidi

Jumlah total anggaran untuk subsidi Transjakarta, LRT, dan MRT adalah Rp5.309.542.082.575 atau sebesar 74,05% dari total anggaran Dishub. Realisasi dari total anggaran Dishub adalah sebesar 91,71%. Rincian dari anggaran dan realisasi subsidi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 31 Rincian Subsidi Transjakarta, LRT, dan MRT

No.	Nama Aktivitas	APBDP (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Pemberian Subsidi untuk Pelayanan Moda Raya Terpadu melalui PT MRT Jakarta	894.575.730.302	801.476.960.779	89,59%
2	Pemberian Subsidi untuk Pelayanan Lintas Raya Terpadu melalui PT Jakarta Propertindo	505.036.271.211	439.152.124.833	86,95%
3	Pemberian Subsidi untuk Pelayanan Transjakarta melalui PT. Transportasi Jakarta	3.909.930.081.062	3.628.665.936.744	92,81%
	Total	5.309.542.082.575	4.869.295.022.356	91,71%

b. Jumlah Penumpang

Jumlah penumpang per hari dari angkutan Transjakarta, LRT, dan MRT pada tahun 2024 dapat dillihat pada Tabel 3.6

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya bobot SPM Layanan Angkutan Umum Transjakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 di dalam Naskah Perjanjian Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Transportasi Jakarta tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik *Public Service Obligation* (*PSO*)/Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta Tahun Anggaran 2024 sebanyak 80% dengan prosentase ketercapaian terhadap bobot sebanyak 96,42%, maka PT. Transportasi Jakarta memenuhi persyaratan untuk mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3.11.6 Penyelenggaraan Mudik Gratis

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas pada saat mudik lebaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan memberikan fasilitas bagi masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada periode angkutan lebaran dengan menyelenggarakan kegiatan Mudik dan

Balik gratis. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas sebagai berikut:

1. Menyediakan kendaraan bus gratis bagi masyarakat DKI Jakarta untuk melaksanakan mudik pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2024 dari Jakarta menuju 19 (sembilan belas) kota tujuan;
2. Menyediakan kendaraan truk gratis pengangkut sepeda motor bagi masyarakat DKI Jakarta yang akan membawa kendaraan Roda Dua (sepeda motor) pada saat mudik periode Angkutan Lebaran Tahun 2024 dari Jakarta menuju 7 (tujuh) kota tujuan;
3. Menyediakan kendaraan bus gratis bagi masyarakat DKI Jakarta untuk melaksanakan balik pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2024 dari 19 (sembilan belas) kota asal menuju Jakarta;
4. Menyediakan kendaraan truk gratis pengangkut sepeda motor bagi masyarakat DKI Jakarta yang akan membawa kendaraan Roda Dua (sepeda motor) pada saat balik periode Angkutan Lebaran Tahun 2024 dari 7 (tujuh) kota asal menuju Jakarta;
5. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat agar dapat beralih menggunakan angkutan umum dan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat ekonomi ke bawah untuk dapat mengikuti kegiatan mudik angkutan lebaran;
6. Meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang turut serta mengikuti mudik dan balik gratis angkutan lebaran pada tahun 2024 ke kampung halaman/kota tujuan masing–masing.

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan mudik dan balik gratis Angkutan Lebaran Tahun 2024 di DKI Jakarta merupakan salah satu program untuk menekan angka kecelakaan, meningkatkan keselamatan saat pelaksanaan mudik dan balik bagi pemudik khususnya pemudik yang menggunakan sepeda motor, serta meningkatkan kelancaran berlalu lintas dalam pelaksanaan angkutan lebaran. Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat bagi masyarakat untuk menggunakan angkutan massal sebagai sarana yang digunakan untuk mudik dan

diharapkan pula dengan adanya penyelenggaraan mudik gratis angkutan lebaran Tahun 2024 jumlah pengguna kendaraan pribadi dapat berkurang.

Berikut ringkasan jumlah mudik arus mudik pada 19 kota tujuan:

Tabel 3. 32 Ringkasan Kuota Peserta Mudik Arus Mudik

No	TUJUAN	ARUS	Target		Rekapitulasi		Relokasi		Realisasi	
			Bus	Pnp	Terdaftar	Terverifikasi	Bus	Pnp		
1	Bandar Lampung	Mudik	4	160	220	215	5	200	174	109%
2	Palembang	Mudik	3	120	159	129	3	120	120	100%
3	Tasikmalaya	Mudik	2	80	153	148	3	120	78	98%
4	Kuningan	Mudik	2	80	103	86	2	80	76	95%
5	Tegal	Mudik	8	320	396	376	8	320	319	100%
6	Pekalongan	Mudik	8	320	383	376	8	320	302	94%
7	Semarang	Mudik	17	680	791	791	18	720	675	99%
8	Kebumen	Mudik	12	480	559	549	13	520	393	82%
9	Cilacap	Mudik	7	280	347	340	7	280	266	95%
10	Purwokerto	Mudik	12	480	543	528	12	480	478	100%
11	Solo	Mudik	45	1800	2294	2283	48	1920	2032	113%
12	Wonosobo	Mudik	10	400	458	427	12	480	360	90%
13	Yogayakarta	Mudik	36	1440	1821	1803	42	1680	1446	100%
14	Sragen	Mudik	18	720	865	800	18	720	721	100%
15	Wonogiri	Mudik	55	2200	2401	2398	57	2280	2198	100%
16	Madiun	Mudik	7	280	354	301	7	280	220	79%
17	Kediri	Mudik	5	200	267	251	7	280	201	101%
18	Jombang	Mudik	4	160	175	169	4	160	165	103%
19	Malang	Mudik	4	160	210	200	5	200	164	103%
Total			259	10360	12499	12170	279	11160	10388	100%

3.12 Prestasi dan Penghargaan

Penghargaan yang diterima Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Prestasi dan Penghargaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta

No	Prestasi dan Penghargaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta
1	 **Penghargaan "Kolaborasi Kebijakan Untuk Transportasi Darat yang Inklusif dan Berkelanjutan"** Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Bandung 8-9 November 2023 Penghargaan "Kolaborasi Kebijakan Untuk Transportasi Darat yang Inklusif dan Berkelanjutan" diraih oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebagai apresiasi atas upaya luar biasa dalam mengembangkan sistem transportasi darat yang efisien, ramah lingkungan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui kebijakan inovatif, seperti pengembangan transportasi umum yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kemacetan, serta fokus pada keberlanjutan lingkungan, Dishub DKI Jakarta berhasil menciptakan solusi mobilitas yang tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga inklusivitas bagi warga kota. Penghargaan ini mencerminkan komitmen DKI Jakarta dalam membangun sistem transportasi yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

2	 **UPPKB Pulogadung, Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor Terbaik I** Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Bandung 8 November 2023 UPPKB Pulogadung, merupakan salah satu unit penyelenggara pengujian kendaraan bermotor di DKI Jakarta, berhasil meraih penghargaan sebagai "Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor Terbaik I". Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kinerja unggul UPPKB Pulogadung dalam memberikan layanan pengujian kendaraan bermotor yang profesional, transparan, dan efisien. Dengan fasilitas yang modern dan prosedur yang ketat, UPPKB Pulogadung tidak hanya memastikan kendaraan yang beroperasi di DKI Jakarta memenuhi standar keselamatan dan emisi, tetapi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas transportasi dan lingkungan di ibu kota. Pencapaian ini menggambarkan komitmen Dishub DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan publik di sektor transportasi.
3	



Penghargaan "Peran serta dan dukungan terhadap penyelengaraan Jakarta Running Festival 2024"
Apreciation Night JRF 2024

Penghargaan "Peran serta dan dukungan terhadap penyelenggaraan JRF 2024" diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi dan komitmen yang luar biasa dalam memastikan kelancaran acara Jakarta Road Festival 2024, dengan memberikan dukungan penuh dalam pengaturan lalu lintas, pengelolaan transportasi, dan koordinasi antarinstansi, sehingga acara tersebut dapat berlangsung dengan sukses dan memberikan pengalaman yang aman, tertib, dan menyenangkan bagi seluruh peserta dan pengunjung.

4



	Piagam Penghargaan Panglima Tentara Nasional Indonesia Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 10 Oktober 2023 Piagam Penghargaan Panglima Tentara Nasional Indonesia diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam mendukung tugas dan peran TNI dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas negara. Penghargaan ini mengakui upaya individu atau institusi yang telah berperan aktif dalam memperkuat pertahanan negara, menciptakan sinergi yang efektif antar lembaga, dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Piagam ini juga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan.
5	 **Penghargaan sebagai Tokoh Kolaboratif Transportasi Inklusif Terintegrasi Bidang Pengembangan Infrastruktur, Kadishub DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo** Dewan Transportasi Kota Jakarta Awards 2024 Penghargaan sebagai Tokoh Kolaboratif Transportasi Inklusif Terintegrasi Bidang Pengembangan Infrastruktur diberikan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo, sebagai penghargaan atas kepemimpinan dan dedikasinya dalam mewujudkan sistem transportasi yang inklusif dan terintegrasi di Jakarta. Melalui kolaborasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, Bapak

	Syafrin berhasil mendorong pengembangan infrastruktur transportasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendukung terciptanya mobilitas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di ibu kota. Penghargaan ini mencerminkan komitmen beliau dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk pembangunan kota Jakarta
6	 **Penghargaan Tokoh Yang Konsisten Kolaborasi dan Memperjuangkan Disabilitas di Bidang Transportasi** Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Penghargaan "Tokoh yang Konsisten Kolaborasi dan Memperjuangkan Disabilitas di Bidang Transportasi" diraih oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sebagai pengakuan atas upaya konsisten dan komitmen dalam memastikan aksesibilitas transportasi yang setara bagi penyandang disabilitas di Jakarta. Melalui berbagai kebijakan dan program inklusif, Dishub DKI Jakarta telah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem transportasi yang ramah disabilitas, seperti pembangunan fasilitas transportasi yang lebih mudah diakses, pelatihan untuk pengemudi dan petugas, serta peningkatan kesadaran publik, yang semuanya bertujuan untuk mendukung mobilitas yang lebih baik dan setara bagi seluruh warga Jakarta.

7	 **Juara 1 pada Kategori Sosok Humas Inspiratif oleh Bapak Suprapto mewakili Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta** Anugerah Humas Jakarta 2024 Bapak Suprapto berhasil meraih Juara 1 pada Kategori Sosok Humas Inspiratif, mewakili Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sebagai penghargaan atas dedikasi dan inovasinya dalam membangun komunikasi yang efektif dan transparan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pendekatan yang humanis, profesional, dan penuh empati, Bapak Suprapto telah berhasil menginspirasi banyak pihak dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran publik mengenai kebijakan dan program-program transportasi yang dilaksanakan oleh Dishub DKI Jakarta, sehingga memperkuat hubungan positif antara pemerintah dan masyarakat. Penghargaan ini mencerminkan peran penting beliau dalam menyampaikan informasi yang relevan dan membangun citra positif instansi.
8	

	 **Juara 2 pada Kategori Media Sosial oleh Unit Pengelola Angkutan Sekolah** Anugerah Humas Jakarta 2024 Unit Pengelola Angkutan Sekolah berhasil meraih Juara 2 pada Kategori Media Sosial sebagai penghargaan atas upaya kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan platform media sosial untuk menyampaikan informasi, mempererat komunikasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai layanan angkutan sekolah yang aman dan efisien. Dengan konten yang informatif dan menarik, Unit Pengelola Angkutan Sekolah berhasil menjangkau berbagai kalangan, memberikan edukasi kepada orang tua dan siswa, serta memperkenalkan program-program yang mendukung keselamatan dan kenyamanan anak-anak dalam menggunakan transportasi sekolah. Penghargaan ini mencerminkan komitmen dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan layanan yang lebih baik dan responsif.
9	



Juara 2 pada Kategori Komunikasi Publik oleh
UP Sistem Pengendalian Lalu Lintas
Anugerah Humas Jakarta 2024

UP Sistem Pengendalian Lalu Lintas meraih Juara 2 pada Kategori Komunikasi Publik sebagai penghargaan atas upaya mereka dalam mengelola dan menyebarkan informasi secara efektif terkait sistem pengendalian lalu lintas di DKI Jakarta. Melalui pendekatan komunikasi yang jelas, transparan, dan terintegrasi, UP Sistem Pengendalian Lalu Lintas berhasil menjangkau masyarakat luas, memberikan edukasi tentang kebijakan lalu lintas, serta memberikan pembaruan terkini mengenai kondisi jalan dan pengaturan lalu lintas. Penghargaan ini mencerminkan dedikasi mereka dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan terinformasi bagi seluruh pengguna jalan di Jakarta.

BAB IV
PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sesuai dengan Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) sebagai berikut :

1. Realisasi Capaian nilai Persentase Perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik pada tahun 2024 mempunyai nilai capaian sebesar 22,19% berdasarkan hasil perolehan jumlah perjalanan dengan angkutan umum sebesar 4.485.930 perjalanan/hari dan hasil perhitungan data lalu lintas tahun 2024 sebesar 20.214.870 perjalanan/hari. Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik adalah 105,82%.
2. Jumlah Titik Integrasi antarmoda merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mencapai tujuan Terwujudnya Transportasi Terintegrasi dan Berkelanjutan dan sasaran untuk Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses, dan Integrasi Transportasi. Ukuran ketercapaian titik integrasi adalah jumlah titik lokasi integrasi antarmoda transportasi umum berbasis jalan dengan transportasi umum berbasis rel dan/atau transportasi umum berbasis perairan. Target capaian Jumlah Titik Integrasi Antarmoda pada Tahun 2024 adalah 26 dan pada tahun 2024 target tersebut tercapai sepenuhnya atau sebesar 100%.
3. Jumlah anggaran yang terserap untuk mencapai kinerja tersebut dari pagu anggaran sebesar Rp5.922.424.118.832 dari total pagu anggaran sebesar Rp6.506.309.436.718, atau capaian sebesar 91,03% dengan efisiensi sebesar 96,4% dari nilai total pagu anggaran.

1.2 Saran

Mengingat kompleksnya penyelenggaraan urusan perhubungan, makaDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas aparat Dinas Perhubungan agar tetap dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Terhadap hambatan dan kendala yang ditemui terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal akan terus diupayakan peningkatan koordinasi dengan pihak- pihak terkait sesuai dengan wewenang yang dimiliki Dinas Perhubungan. Demi menjamin kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan dibutuhkan hal-hal sebagai berikut :

1. Diperlukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, karena dalam mengatasi kemacetan dibutuhkan instansi terkait sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun berikutnya harus berorientasi pada pencapaian *outcome*, sehingga target kinerja dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.
3. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan setiap kegiatan maka diperlukan koordinasi dengan berbagai instansi sebelum di mulainya program sehingga dalam pelaksanaan kegiatan segala hambatan dan permasalahan yang timbul dapat segera diatasi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
SASARAN STRATEGIS																	
1.	Terwujudnya Transportasi Terintegrasi dan Berkelanjutan	Persentase Perjalanan Penduduk menggunakan Transportasi Publik	E-SAKIP	Public transportation mode share adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar prevalensi warga untuk menggunakan transportasi umum dalam bermobilisasi; yang diukur melalui perbandingan antara jumlah perjalanan penduduk dengan angkutan umum (12 moda) dibandingkan dengan total jumlah perjalanan dalam periode waktu tertentu Moda angkutan umum yang termasuk dalam perhitungan adalah: 1. Transjakarta	20.97	-	-	-	20.97	-	-	-	22.19	-	-	-	22.19

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
				2. MRT 3. LRT 4. LRT Jabodebek 5. KRL 6. Railink 7. Bus reguler 8. Ojek (online) 9. Taksi dan Bajaj 10. Angkutan sewa khusus 11. Kapal 12. Bus Sekolah												
2.	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses, dan Integrasi Transportasi Jumlah titik integrasi antar moda	Jumlah titik integrasi antar moda	E-SAKIP	Titik lokasi integrasi antar moda transportasi umum berbasis Jalan dengan transportasi umum berbasis rel dan/atau transportasi umum berbasis perairan	26	-	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-	26
3.	Berkurangnya Ketimpangan Serta	Persentase penyelesaian rencana aksi	E-MONEV KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan		Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan													
4.	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	E-MONEV KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
5	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	E-MONEV KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim	100	100	100	100	100	100	100	98,86	100	100	100	100	100
6.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit	E-MONEV KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		Oriented Development (TOD)															
7.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapnya	E-MONEV KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD	E-MONEV KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Kesehatan Perkotaan	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi		Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi													
9.	Terakselerasinya Transformasi	Persentase penyelesaian rencana aksi	E-MONEV KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital													
10.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi	E-MONEV KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		Pemerintah (AKIP)															
11.	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	E-MONEV KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	100	100	-	100	100	61	-	45	100	61	-	45
12.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Percepatan Penanganan Kemacetan		Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Percepatan Penanganan Kemacetan Sub KSD Pembangunan dan Pengoperasian Sarana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Berorientasi Transit	Sub KSD Pembangunan dan Pengoperasian Sarana Angkutan Umum Massal Berbasis Rel		Angkutan Umum Massal Berbasis Rel													
SASARAN KHUSUS																	
1.	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada	Strategi Komunikasi	a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		saat krisis komunikasi program		program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.													
2.	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Satu Data Indonesia	Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata	3.25	-	-	-	3.25	-	-	-	100	-	-	-	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
				Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data												
3.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.	100	5	25	55	100	5	-	59.05	-	5	-	59.05	-
4.	Implementasi Penerapan	Persentase Implementasi Penerapan	Manajemen Risiko	[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang	100	-	50	-	100	-	50	-	100	-	50	-	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Manajemen Risiko	Manajemen Risiko		wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%													
5.	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri	Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).	80	-	30	-	80	-	30	-	89.3	-	30	-	89.3
6.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI	Pengembangan Kompetensi ASN	[(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun															
7.	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Manajemen Pengetahuan	Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).	100	-	-	50	50	-	-	50	50	-	-	50	50
8.	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja	71	-	-	-	71	-	-	-	90.71	-	-	-	90.71

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
				Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.													
SASARAN OPERASIONAL																	
1.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi	Inspektorat	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah	100	25	25	25	25	14.22	2.41	4.08	6.65	14.22	2.41	4.08	6.65

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran	Target Tahunan	Target				Realisasi				Validasi			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	pemeriksaan eksternal (BPK)	temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)		koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)													
3.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	TL Aduan Masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	97.79	97.72	97.41	96.34	97.79	97.72	97.41	96.34
4.	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Survey Perangkat Daerah	Hasil Jak Survei	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	92.15	92.84	91.78	94.01	92.15	92.84	91.78	94.01

Lampiran 2. Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2024

RENCANA AKSI KEGIATAN STRATEGIS DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2024
KEGIATAN STRATEGIS DAERAH : PERCEPATAN PENANGANAN KEMACETAN (2)
SUB KEGIATAN STRATEGIS DAERAH : PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SARANA ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS REL

RENCANA AKSI		SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome – Manggarai	NON - APBD (PMD)	1. Dinas Perhubungan 2. PT Jakarta Propertindo	**B03:** 1. Penyampaian dokumen final kriteria desain dan spesifikasi teknis dari Dishub kepada Kemenhub 2. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Andalalin Pembangunan Jalur LRT tahap 1B Velodrome-Manggarai (Pier 111B-198B) Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan	**B03:** 100% **B06 :** 100% **B09 :** 100% **B12 :** 100%	**B03:** Sehubungan dengan Rencana Aksi Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai dengan target penyampaian dokumen final kriteria desain dan spesifikasi teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada B03, belum dapat dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan dokumen Final Kriteria Desain dan Spesifikasi Teknis Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai) masih dalam proses revisi, untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.	1. Kabid Lalu lintas dan Angkutan Jalan 2. Kabid Perkeretaapian	1. Kasi. Manajemen Lalu lintas 2. Kasi. Prasarana dan Sarana Perkeretaapian

RENCANA AKSI	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			B06: 1. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Andalalin Pembangunan lima Stasiun LRT fase 1B (Stasiun Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, Manggarai) 2. Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Manggarai (B04) 3. Pengesahan dokumen kriteria desain dan spesifikasi teknis oleh Kemenhub 4. Rekomtek Andalalin Jalur LRT Fase 1B **B09:** Rekomtek Andalalin Stasiun LRT Fase 1B **B12:** Keputusan Gubernur tentang Izin Membangun Prasarana (IMP)		**B06:** 1. Target B06-1: Terkait dengan kelengkapan dokumen andalalin untuk Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai) berupa gambar teknis masih dalam proses perbaikan gambar oleh PT Jakarta Propertindo berdasarkan masukan dari Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta untuk Underpass Pramuka dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk Stasiun Manggarai 2. Target B06-2: Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pembangunan Jalur LRT Fase 1B segmen Manggarai belum dapat diterbitkan karena PT Jakarta Propertindo belum menyampaikan Kelengkapan Dokumen Andalalin dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Andalalin Pembangunan Jalur LRT Tahap 1B segmen manggarai (Dokumen *Detail Engineering Desain*) 3. Target B06-3: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan Dokumen Kriteria Desain dan Spesifikasi Teknis kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melalui Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor e-0586/PH.10.00 tanggal 5 Juni 2024 hal Penyampaian Dokumen Kriteria Desain dan Spesifikasi Teknis Prasarana Perkeretaapian LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai), untuk selanjutnya dilakukan		

RENCANA AKSI	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					proses pengesahan oleh Kementerian Perhubungan 4. Target B06-4: Rekomendasi Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Andalalin Pembangunan Jalur LRT Tahap 1B Velodrome-Manggarai (*Pier* 111B-198B) Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan belum dapat diterbitkan karena PT Jakarta Propertindo belum menyampaikan Kelengkapan Dokumen Andalalin dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Andalalin Pembangunan Jalur LRT Tahap 1B Velodrome-Manggarai (*Pier* 111B-198B) Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan (Dokumen *Detail Engineering Desain*) **B09:** Laporan disampaikan melalui nota dinas Plh. Kadishub kepada Asperkeu Nomor: e-0153/PH.04.00 tanggal 26 September 2024. Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Manggarai, Rekomtek Andalalin Jalur LRT Fase 1B, dan Rekomtek Andalalin Stasiun LRT Fase 1B belum dapat diterbitkan oleh Dishub karena pengesahan dokumen kriteria desain dan spesifikasi teknis oleh Kemenhub masih dalam proses pembahasan mengingat perlu pembahasan lebih detail terhadap beberapa titik krusial yang membutuhkan koordinasi terkait kewenangan beberapa		

RENCANA AKSI		SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1		2	3	4	5	6	7	8
						OPD internal dan Pemerintah Pusat terkait. Dishub measih menunggu dokumen disiapkan oleh PT Jakpro, namun demikian telah dilakukan percepatan dalam prosesnya sepanjang masih dalam koridor ketentuan perundangundangan yang berlaku. **B12:**		

RENCANA AKSI		SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1		2	3	4	5	6	7	8
2	Pembangunan MRT Fase 2A (Bundaran HI – Kota)	NON-APBD (Pinjaman LN)	1. Bappeda 2. BPKD 3. Dinas Perhubungan 4. Biro Pemerintahan 5. PT MRT Jakarta	**B03: N/A** **B06:** 1. Surat permohonan perpanjangan penlok ke Gubernur (B04) 2. Laporan proges pengadaan tanah **B09:** Laporan proges pengadaan tanah **B12:** Laporan proges pengadaan tanah	**B06:** 100% **B09:** 100% **B12:** 100%	**B06:** 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta melalui surat nomor e-0349/PH.10.00 tanggal 1 April 2024 hal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota, dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta sedang berproses paraf perbal bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk perpanjangan penetapan lokasi (per tanggal 24 Juni 2024 posisi perbal sedang berproses paraf di Walikota Administrasi Jakarta Barat) 2. Progres pengadaan tanah MRT Fase 2A (Bundaran HI - Kota): Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan surat kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor e-0608/PH.10.00 tanggal 11 Juni 2024 perihal Permohonan Pembahasan Permasalahan Lahan PT. Duta Merlin; Telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi lahan milih PT Lumbung Arthanugraha (Grand Paragon) dan Kawasan Ruko Olimo, dan selanjutnya sedang dalam proses pembuatan peta bidang dan daftar nominatif; Telah disampaikan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada	Kabid Perkeretaapian	Kasi. Jaringan Lalu lintas perkeretaapian

RENCANA AKSI	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus nomor e-0525/PH.10.02 tanggal 22 Mei 2024 perihal Permohonan Penitipan Ganti Kerugian/konsinyasi, untuk lahan milik L. Yudianto; Telah ditandatangani kesepakatan bentuk ganti kerugian lahan milik L. Yudianto dan Suhartono yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor 519/BA-31.73.AT.02.01/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, sebagai dasar pengajuan Penitipan Ganti Kerugian/Konsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat; Pada tanggal 13 Juni 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Finalisasi Pembuatan peta bidang dan daftar nominatif untuk PT Lumbung Arthanugraha (Grand Paragon) dan Kawasan Ruko Olimo yang bertempat di Kantor BPN Jakarta Barat. **B09:** Laporan progres pengadaan tanah: 1. Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan permohonan Rapat Pembahasan dengan OPD Provinsi DKI Jakarta guna kelanjutan proses pengadaan tanah milik PT Duta Merlin melalui Nota Dinas Kadishub Provinsi DKI Jakarta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Nomor e-0137/PH.10.00 tanggal 2 September 2024 perihal Laporan Progres Pengadaan Tanah		

RENCANA AKSI	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					PT Duta Merlin untuk Pembangunan MRT Fase 2A 2. Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian untuk lahan milik Grand Paragon pada tanggal 17 September 2024 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan akan dilanjutkan untuk penandatanganan pelepasan Hak 3. Telah dilaksanakan pemaparan hasil penilaian KJPP oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 27 September 2024 dan akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi pembahasan status lahan ruko olimo sebelum diadakannya musyawarah bentuk ganti kerugian 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA khusus melalui surat nomor e-0525/PH.10.00 tanggal 22 Mei 2024 perihal Permohonan Penitipan Ganti Kerugian/Konsinyasi untuk lahan milik L Yudianto. 5. Telah dilaksanakan rapat koordinasi penitipan bentuk ganti kerugian di lahan milik L Yudianto dan Drs. Suhartono Setijabudi Cs pada tanggal 11 September 2024. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus melalui surat nomor e-1031/PH.10.00 tanggal 25 September 2024 perihal Permohonan Tindak Lanjut Penitipan Ganti Kerugian untuk Pembangunan MRT Fase 2A milik L Yudianto dan Drs. Suhartono Setijabudi Cs.		

RENCANA AKSI	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12: Progres pengadaan lahan : 1. Telah dilaksanakan rapat pimpinan pada tanggal 24 November 2024 dengan pembahasan status lahan PT Duta Merlin yang terkena proyek Pembangunan MRT Fase 2A yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan hal tersebut, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan rapat koordinasi pada tanggal 26 November 2024 yang dihadiri oleh perwakilan dari Walikota Jakarta Pusat, Badan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan PT MRT Jakarta 2. Telah dilaksanakan rapat penandatanganan Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah MRT Koridor Bundaran HI-Kota untuk lahan milik PT Lumbung Artanugraha (Grand Paragon) pada tanggal 5 Desember 2024, namun dalam rapat tersebut tidak dihadiri oleh pemilik lahan Grand Paragon sehingga sesuai kesepakatan bersama, Pelepasan Hak dan Ganti Kerugian akan dijadwalkan pada akhir bulan Januari 2025 3. Telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal 14 November 2024 terkait bukti kelengkapan berkas terhadap pihak yang mengklaim bidang tanah Ruko Olimo		

RENCANA AKSI		SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1		2	3	4	5	6	7	8
						berdasarkan BA Nomor Berita Acara Rapat Nomor 1439/BA-31.73.AT.500.02.01/XI/2024 bidang tanah tersebut merupakan tanah Negara sehingga proses ganti kerugian tidak dapat ditindaklanjuti 4. Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah bersurat kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan permohonan penitipan ganti kerugian untuk lahan milik Suhartono yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan melalui surat Nomor 7083/PAN.PN.W10.U2/HK2.4/X/2024 tanggal 11 Desember 2024 hal Penyampaian Informasi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyampaikan persetujuan atas permohonan penitipan ganti kerugian untuk lahan milik Suhartono		

RENCANA AKSI		SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1		2	3	4	5	6	7	8
3	Perencanaan Pembangunan MRT East-West Phase 1 Stage 1	NON-APBD (Pinjaman LN)	1. Bappeda 2. Dishub 3. Biro Pemerintahan 4. PT MRTJ	**B03:** Input rancangan awal kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT East-West **B06:** 1. Penyampaian DPPT ke Gubernur 2. Hasil Review BED (PT MRTJ dan Dishub) 3. Pengalokasian anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT East-West dalam RKPD 2025 **B09: N/A** **B12:** Pengalokasian anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT East-West dalam APBD 2025	**B03:** 100% **B06:** 100% **B09:** 100% **B12:** 100%	**B03:** 1. Terkait dengan proses input rancangan awal kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan MRT *East-West Phase* 1 *Stage* 1 belum dapat dilaksanakan karena masih dalam tahap pembahasan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pengampu pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah MRT *East-West Phase* 1 *Stage* 1. 2. Mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwasanya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengadaan tanah sehingga perlu adanya penyesuaian dalam regulasi sebagai pendukung pelaksanaan pengadaan tanah. **3.** Sebagai alternatif untuk pelaksanaan pengadaan tanah, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, Pasal 9 poin c, disebutkan bahwa terhadap Badan Usaha yang telah ditetapkan/ditugaskan wajib melaksanakan kegiatan pengadaan tanah**.** **B06:**	Kabid Perkeretaapian	Kasi. Jaringan Lalu lintas perkeretaapian

RENCANA AKSI	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengalokasian anggara kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT *East-West*: Pada tanggal 20 Juni 2024 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan *input* rencana anggaran untuk pengadaan tanah MRT *East-West* fase 1 tahap 1 sebesar Rp 100 Milyar dan telah berproses permohonan arahan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Nota Dinas Plh. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Arahan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan MRT *East-West Line* **Hasil Review BED:** PT MRTJ telah melaksanakan audiensi 1 Kajian Alinyemen *East-West* dengan *stakeholder* pada tanggal 27 Mei 2024 yang membahas tentang *review* alinyemen dalam rangka optimalisasi desain dan integrasi di sepanjang jalur MRT *East-West* **Penyampaian DPPT ke Gubernur:** 1. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan MRT *East-West* Fase 1 Tahap 1 pada tanggal 31 Mei 2024 bertempat di Badan		

RENCANA AKSI	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perencanaan Pembangungan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil pembahasan pada rapat tersebut masih perlu dilakukan pertimbangan dan penetapan instansi yang dapat melaksanakan pembebasan lahan dan diharapkan PT MRTJ dapat mengkaji ulang *timeline* pengadaan lahan yang telah diusulkan mengingat perlunya pertimbangan kapasitas fiscal dan SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam rapat pembahasan juga disampaikan bahwasanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) masih dalam proses finalisasi *review* oleh PT MRT Jakarta sebelum diberikan kepada PJ. Gubernur DKI Jakarta 2. Pada tanggal 19 Juni 2024 dilaksanakan Rapat Pembahasan Lanjutan Rencana Pengadaan Tanah MRT *East-West* Fase 1 Tahap 1 bertempat di Badan Perencanaan Pembangungan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hasil pembahasan rapat sebagai berikut: ○ Perlu dilakukan kaji ulang instansi yang akan melakukan pengadaan lahan dilihat dari tugas dan fungsi OPD sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor		

RENCANA AKSI	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					57 Tahun 2022 Tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; ○ Bappeda akan melaporkan kepada kepala TAPD terhadap potensi pengadaan lahan dengan memperhatikan alternatif-alternatif yang disampaikan oleh OPD yang menghadiri rapat tersebut. **B12:** 1. PT MRT Jakarta telah menyampaikan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah melalui Surat Direktur PT MRTJ Nomor 242/BOD-CONS/KN.03.03 tanggal 11 November 2024 perihal Penyampaian *Draft* DPPT MRT Lin Timur Barat Fase 1 tahap 1 (Tomang-Medan Satria) pada Area DKI Jakarta 2. Telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut DPPT yang melibatkan PT MRTJ dan instansi internal Pemprov yang terlibat (Biro Pemerintahan, Bappeda, Biro Perekonomian, DCKTRP) pada tanggal 20 November 2024 3. Telah dilaksanakan Audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 2 Desember 2024, dn didapatkan arahan bahwa untuk Dokumen		

RENCANA AKSI		SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1		2	3	4	5	6	7	8
						Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) pengadaan lahan MRT Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria) dibuat dan diajukan secara bertahap (staging) persegmen atau skala prioritas konstruksi disesuaikan dengan timeline pekerjaan 4. Telah disampaikan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada Direktur Utama PT MRT Jakarta Nomor e-1502/PH.10.00 tanggal 12 Desember 2024 hal Permohonan Penyesuaian DPPT MRT East-West		

RENCANA AKSI KEGIATAN STRATEGIS DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2024
KEGIATAN STRATEGIS DAERAH : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN (8)
SUB KEGIATAN STRATEGIS DAERAH : PENYEDIAAN JALAN DAN INFRASTUKTUR PELENGKAPNYA

RENCANA AKSI		SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelesaian Trotoar Complete Street Di Provinsi DKI Jakarta	APBD	Dinas Perhubungan & Suku Dinas Perhubungan 5 (lima) Wilayah Jakarta	**B03: N/A** **B06: N/A** **B09:** 1.Terlaksananya relokasi dan pengamanan aset Dinas dan Suku Dinas Perhubungan disekitar lokasi pembangunan trotoar 2. Terlaksananya pengamanan lalu lintas dan penertiban parkir disekitar lokasi pembangunan trotoar 3. Terkirimnya rekomendasi lalin kepada Dinas dan Suku Dinas Bina Marga	**B09: 100%** **B12: 100%**	**B09:** Tindaklanjut dari Rencana Aksi Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya Periode B09 Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sebagaimana berikut: 1. Telah terlaksana relokasi dan pengamanan aset milik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Perhubungan 5 (lima) Wilayah Kota Adminitrasi Jakarta, dan Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana data terlampir 2. Telah dilaksanakan pengamanan lalu lintas dan penertiban parkir sekitar lokasi pembangunan trotoar sebagaimana data terlampir 3. Telah terbit dan terkirim kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta terkait rekomendasi pembangunan trotoar antara lain (dokumen terlampir): a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta nomor e-0165/PH.04.00 tanggal 12 Februari 2024 Hal Tanggapan Permohonan Rekomendasi Pembangunan Trotoar Jalan H.R. Rasuna Said; b. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta nomor e-0891/PH.04.00 tanggal 14 Agustus 2024 Hal Tanggapan Permohonan Rekomendasi Penataan Trotoar Jalan M.T Haryono sisi Utara dan Sekitarnya.	1. Kabid. Lalu lintas Jalan 2. Kabid. Pengendalian dan Operasional Lalu lintas dan AJ 3. Ka. UP perparkiran 4. Ka. UP SPLL 5, Ka.Sudin Perhubungan 5 (lima) Wilayah Jakarta	1. Kasi. Rekayasa Lalu lintas Jalan 2. Kasi. Penegakan Hukum 3. Kasubag. TU UP Perparkiran 4. Kasubag. TU UP SPLL 5. Kasi. Lalu lintas Sudinhub 5 (lima) Wilayah Jakarta 6. Kasi Dalops Sudinhub 5 (lima) Wiayah Jakarta

RENCANA AKSI		SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1		2	3	4	5	6	7	8
				B12: Terlaksananya kegiatan marka jalan dan penyeberangan, jalur sepeda serta rambu di sekitar lokasi pembangunan trotoar		**B12:** 1. Rencana Aksi Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya Periode B12 Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud, diampu oleh beberapa UKPD di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, antara lain: a. Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; b. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan; c. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat; d. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat; e. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara; f. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur. 2. Tindaklanjut dari Rencana Aksi Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya Periode B12 Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di sekitar lokasi pembangunan trotoar (lokasi dan dokumentasi terlampir); 3. Mengalir penjelasan di atas, bahwa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Rencana Aksi Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya Periode B12 Tahun Anggaran 2024 dan tercapai 100% (seratus persen).		

RENCANA AKSI		SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1		2	3	4	5	6	7	8
2	Pelaksanaan bulan tertib trotoar	APBD	Dinas Perhubungan & Suku Dinas Perhubungan 5 (lima) Wilayah Jakarta	**B03**: Terlaksananya bulan tertib trotoar TW 1 **B06**: Terlaksananya bulan tertib trotoar TW 2 **B09**: Terlaksananya bulan tertib trotoar TW 3 **B12**: Terlaksananya bulan tertib trotoar TW 4	**B03: 100%** **B06: 100%** **B09: 100%** **B12: 100%**		1. Kabid. Lalu lintas Jalan 2.Kabid. Pengendalian dan Operasional Lalu lintas dan AJ 3.Ka. UP perparkiran 4. Ka. UP SPLL5, Ka.Sudin Perhubungan 5 (lima) Wilayah Jakarta	1. Kasi. Rekayasa Lalu lintas Jalan 2.Kasi. Penegakan Hukum 3. Kasubag. TU UP Perparkiran 4. Kasubag. TU UP SPLL 5. Kasi. Lalu lintas Sudinhub 5 (lima) Wilayah Jakarta 6. Kasi Dalops Sudinhub 5 (lima) Wiayah Jakarta

RENCANA AKSI KEGIATAN STRATEGIS DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2024
KEGIATAN STRATEGIS DAERAH : PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN PERKOTAAN (8)
SUB KEGIATAN STRATEGIS DAERAH : PENGEMBANGAN TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD)

RENCANA AKSI		SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1		2	3	4		7	8	9
1	Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Peningkatan dan Pengembangan Area Stasiun Tanah Abang	APBD	DINAS PERHUBUNGAN	**B03: N/A** **B06:** Penerbitan rekomendasi MRLL pekerjaan complete street (Mei) **B09: N/A** **B12:** Tersedianya prasarana lalu lintas dan kelengkapan jalan lainnya	**B06: 100%** **B12: 100%**	**B06:** 1. Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Area Stasiun Tanah Abang pada tanggal 29 Mei 2024 di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (Bidang Lalu Lintas Jalan dan Bidang Perkeretaapian), Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta (Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota dan Bidang Kelengkapan Jalan), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, PT KAI Daop 1 dan PT MITJ 2. Telah disampaikan surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0565/PH.04.00 tanggal 4 Juni 2024 Hal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Stasiun Tanah Abang 3. Mengalir penjelasan di atas, bahwa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta belum dapat menerbitkan Rekomendasi MRLL pekerjaan *complete street* dikarenakan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta belum menyampaikan desain trotoar dan jalan penataan kawasan stasiun Tanah Abang yang telah sinkron dan terintegrasi dengan	1. Kabid. Lalu Lintas Jalan 2. Ka. UP SPLL	1. Kasi. Rekayasa Lau lintas 2. Kasubag. TU UP SPLL

RENCANA AKSI	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4		7	8	9
					perencanaan pengelola kawasan. Atas hal tersebut, dengan ini saya sampaikan permohonan target B06 atas rencana aksi Penerbitan Rekomendasi MRLL pekerjaan *complete street* (Mei) dapat mencapai 100% (seratus persen) **B12:** dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Rencana Aksi Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya Periode B12 Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh UKPD di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, antara lain: a. Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; b. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat; 2. Tindaklanjut dari Rencana Aksi Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya Periode B12 Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di sekitar Area Stasiun Tanah Abang (lokasi dan dokumentasi terlampir); 3. Mengalir penjelasan di atas, bahwa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Rencana Aksi Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya Periode B12 Tahun Anggaran 2024 dan tercapai 100% (seratus persen).		